

**PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA  
PERIODE 2012-2023**

**SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Pinky Hamdhan Sari

Nomor Mahasiswa : 21313128

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA**  
**PERIODE 2012-2023**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana jenjang Strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas  
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Nama : Pinky Hamdhan Sari  
Nomor Mahasiswa : 21313128  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2025

Penulis,



Pinky Hamdhan Sari

## PENGESAHAN

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia Periode 2012-2023

Nama : Pinky Hamdhan Sari  
Nomor Mahasiswa : 21313128  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 10 Januari 2025  
telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,



Dr. Rokhedi Priyo Santoso S.E., MIDEc.

**BERITA ACARA**

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA PERIODE 2012-2023**

Disusun oleh : PINKY HAMDHAN SARI

Nomor Mahasiswa : 21313128

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Selasa, 11 Februari 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dr. Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.

Penguji : Mustika Noor Mifrahi, S.E.I.,M.E.K.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Anugerah kasih sayang dan nikmat yang diberikan-Nya telah menjadi sumber kekuatan, membekali saya dengan ilmu, serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Dengan segala kemudahan dan keberkahan yang dilimpahkan-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia Periode 2012-2023*". Dalam proses penulisan skripsi ini, saya mendapatkan bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan segala nikmatnya serta kekuatan bagi penulis.
2. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Kepada Bapak Dr.Rokhedi Priyo Santoso S.E., MIDEc. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan tugas akhir ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Kepada kakak perempuan saya Erika Wijayanti, yang telah banyak memberikan nasihat dan ilmu bermanfaat selama penulisan tugas akhir ini dilakukan.
5. Kepada Hanif Alfarizi Ulhaq yang telah bersedia kebersamaian dan menemani penulis selama proses penulisan tugas akhir ini, sehingga penulis mampu melalui segala rintangan yang dihadapi.
6. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Naailatul Munaa, Febri Siti Nurjanah, yang telah banyak membantu penulis dengan menciptakan lingkungan pertemanan yang suportif sehingga penulisan tugas akhir ini dapat dengan cepat terselesaikan.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran dan cahaya keimanan. Dengan izin dan pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia Periode 2012-2023*", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan saya tentu memberikan ruang bagi munculnya kekurangan, kesalahan, maupun kekhilafan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan masukan berupa koreksi yang membangun, kritik yang memperbaiki, serta saran yang baik demi penyempurnaan karya ini.

Harapan besar saya, semoga skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pembacanya, tetapi juga menjadi bahan referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan keberkahan dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Batasan Masalah.....	21
1.4 Tujuan Penelitian.....	21
BAB 2 Kajian Pustaka dan Landasan Teori .....	23
2.1 Kajian Pustaka.....	23
2.2 Landasan Teori.....	30
2.3 Kerangka Penelitian.....	60
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	61
3.2 Metode Analisis.....	61
BAB 4 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	69
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	69
4.1.1 Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	69
4.1.2 Variabel Indeks Gini.....	69
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan .....	69
4.2.1 Analisis Tipologi Ketimpangan.....	69
4.2.2 Analisis Indeks Williamson.....	77

4.2.3 Analisis Korelasi Pearson.....	81
BAB 5 Simpulan dan Saran.....	85
5.1 Simpulan .....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN.....	89

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. 1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari ke-34 Provinsi.....	13
Grafik 4. 1 Trend Indeks Williamson 2012-2023.....	78
Grafik 4. 2 Trend Korelasi Pearson.....	83

## DAFTAR TABEL

**No table of figures entries found.**

Tabel 3. 1	Matrik dari Tipologi Klassen.....	63
Tabel 3. 2	Matrik dari Tipologi Ketimpangan.....	65
Tabel 4. 3	Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi di Indonesia .....	77
Tabel 4. 4	Analisis Korelasi Pearson dengan SPSS.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data Penelitian.....	89
Lampiran II. Analisis Indeks Williamson .....	96
Lampiran III. Analisis Indeks Ketimpangan.....	110
Lampiran IV. Analisis Korelasi Pearson.....	112

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi dalam pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, mengevaluasi perubahan ketimpangan antar wilayah, serta mengkaji dan mengukur hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan analisis korelasi antara indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang berfokus pada analisis data numerik. Data yang digunakan berupa data deret waktu (time series) yang bersumber dari data sekunder, seperti yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dengan periode kajian tahun 2012–2023. Metode yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan kuantitatif, serta teknik analisis seperti Tipologi Ketimpangan, Indeks Williamson, dan Korelasi Pearson.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai contoh, di Bali ditemukan hubungan negatif antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan ketimpangan pendapatan, yang sesuai dengan kurva Kuznets. Sebaliknya, di Kalimantan Barat, hubungan tersebut cenderung positif, yang bertentangan dengan pola yang diusulkan oleh kurva Kuznets.

**Kata Kunci :** Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan pendapatan, Indeks Gini, Tipologi Ketimpangan, Indeks Williamson, Korelasi Pearson, Kurva Kuznets

# BAB 1

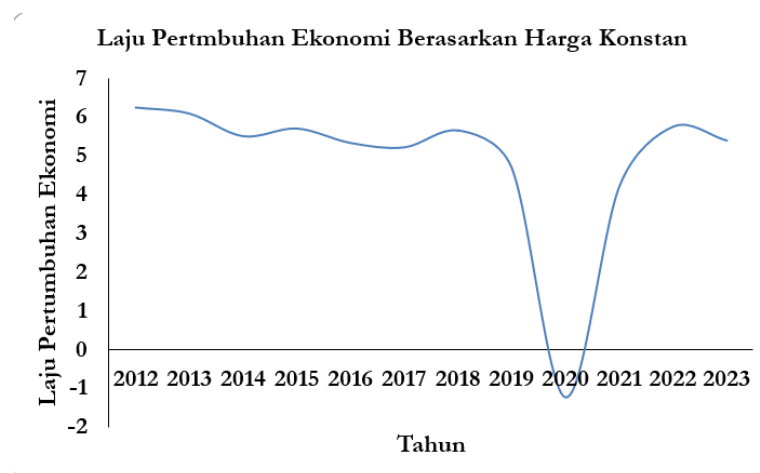
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap aspek kehidupan juga terus mengalami berkembang. Program pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap merupakan salah satu program yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara material dan spiritual. Untuk dapat mencapai tujuan nasional tersebut, program pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan pembangunan yang mengarah pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Salah satu ukuran utama untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Ukuran ini dapat menunjukkan seberapa banyak barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dianggap sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih besar, sehingga menjadikannya komponen penting dalam perekonomian. Sejak tahun 2012 pertumbuhan ekonomi ke-34 provinsi di Indonesia Dapat dilihat pada grafik 1.1

**Grafik 1. 1**  
**Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari ke-34 Provinsi**



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia diolah

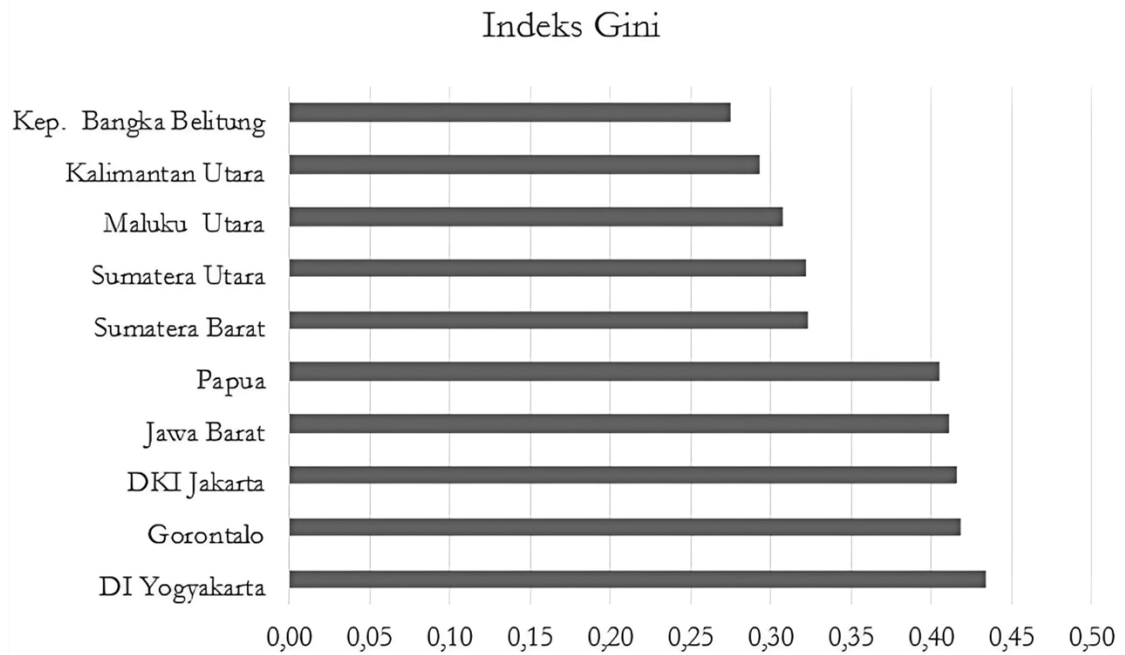
Berdasarkan grafik rata-rata laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi terjadi secara tidak konsisten selama periode penelitian yakni tahun 2012-2023. Terdapat periode terjadi pertumbuhan yang tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2012 yang mencapai laju pertumbuhan sebesar 6,25% dan mengalami stagnasi dalam kurun waktu 2013-2018 pada angka 5% sebelum pada akhirnya mengalami penurunan drastis pada akhir tahun 2019-2020 pada angka -1,23% akibat adanya fenomena Covid-19. Setelah mengalami penurunan, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun-tahun berikutnya.

Selaras dengan penjelasan grafik di atas, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang digunakan untuk menilai perkembangan suatu negara. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012 hingga 2023 mengalami dinamika yang signifikan. Meskipun terdapat kenaikan pertumbuhan di seluruh provinsi, namun masih terdapat perbedaan yang mencolok di antara wilayah-wilayah tersebut. Beberapa provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara yang lain mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antar provinsi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, dan stabilitas sosial. Ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang mencerminkan adanya perbedaan yang mencolok dalam tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah atau dapat pula terjadi antar kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Ketimpangan antar wilayah sering kali terjadi dalam bentuk disparitas infrastruktur, tingkat investasi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan kondisi geografis provinsi-provinsi di Indonesia yang beragam dan karakteristik pembangunan yang berbeda antar provinsi menyebabkan ketimpangan ini menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi.

Selain ketimpangan antar wilayah dalam suatu negara, ketimpangan lain yang terjadi ialah ketimpangan yang terjadi antar masyarakat dalam lingkup suatu wilayah. Indeks Gini menjadi salah satu ukuran mengenai ketimpangan antar masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks Gini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan atau kekayaan antar masyarakat dalam suatu wilayah. Perkembangan mengenai ketimpangan masyarakat antar provinsi di Indonesia dapat dilihat dalam Grafik 1.2 berikut.

**Grafik 1. 2**  
**Rata-rata Indeks Gini Provinsi di Indonesia tahun 2012-2023**



Sumber : BPS Indonesia diolah

Berdasarkan Grafik 1.2 yang menyajikan data rata-rata indeks gini provinsi-provinsi di Indonesia selama periode tahun 2012-2023, Provinsi D.I.Yogyakarta memiliki indeks gini tertinggi, yaitu, 0,43 dibandingkan dengan provinsi lainnya. Angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang signifikan. Ketimpangan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti urbanisasi, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan, serta konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu. Selain Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo dan DKI Jakarta juga menunjukkan angka yang cukup tinggi hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang masih cukup tinggi terjadi pada daerah tersebut khususnya Provinsi Jakarta yang pada periode tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Provinsi yang menunjukkan tingkat ketimpangan sedang ialah Provinsi Jawa Barat dengan nilai indeks gini sebesar 0,41, Papua dengan nilai indeks gini sebesar 0,40, dan Sulawesi Selatan dengan nilai indeks gini sebesar 0,40. Meskipun angka ketimpangan tersebut

tidak lebih tinggi dari provinsi-provinsi sebelumnya namun angka ini masih menunjukkan adanya masalah dalam distribusi pendapatan yang harus diatasi.

Di sisi lain, provinsi seperti Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,27 dan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,29 menunjukkan indeks gini yang jauh lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang lebih merata, sumber daya yang lebih terdistribusi, atau kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan.

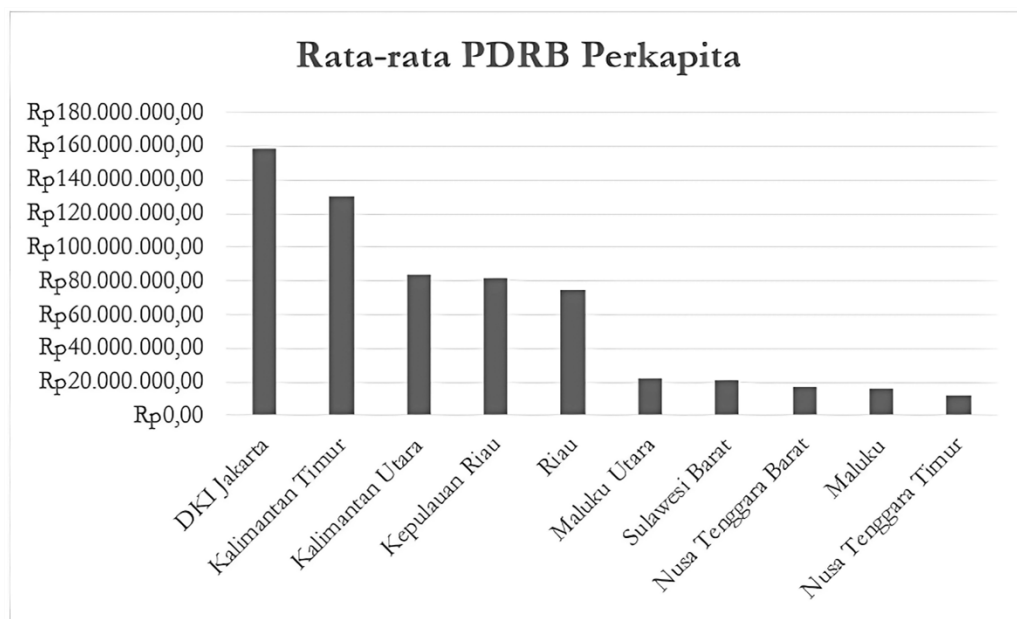
Secara umum, perkembangan indeks gini antar provinsi di Indonesia ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal ketimpangan pendapatan. Provinsi dengan angka di atas 0,4 menunjukkan masih diperlukannya perhatian lebih dalam hal kebijakan sosial dan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sedangkan provinsi dengan indeks gini yang lebih rendah dapat dijadikan tolak ukur bagi provinsi lain dalam upaya menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Selain perkembangan indeks gini, ketimpangan yang terjadi dalam lapisan masyarakat dapat dirasakan dengan adanya perbedaan pendapatan perkapita antar masyarakat dalam suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan total pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Hal tersebut memberikan gambaran terhadap rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara atau wilayah. Pendapatan perkapita seringkali digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi. Dimana semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu wilayah maka hal tersebut mengindikasikan semakin tinggi pula kehidupan rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah tersebut.

Pendapatan perkapita juga berfungsi untuk melakukan analisis ekonomi dan sosial serta digunakan untuk membantu pemerintah dan lembaga dalam merencanakan kebijakan pembangunan dan melakukan identifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Adanya perbedaan pendapatan perkapita antar wilayah yang cukup mencolok menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam wilayah tersebut. Wilayah dengan pendapatan perkapita tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan. Perbedaan pendapatan perkapita yang mencolok dan

mengarah pada terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah berdampak pada ketidakpuasan dan ketegangan yang dirasakan antar masyarakat. Ketimpangan tersebut juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial, dimana individu dari wilayah yang memiliki pendapatan lebih rendah mungkin kesulitan untuk meningkatkan status perekonomiannya.

**Grafik 1. 3 Rata-rata PDRB perkapita Provinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2023 (Juta Rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia diolah

Berdasarkan data tabel rata-rata PDRB perkapita ke-34 Provinsi di Indonesia diatas, dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir mengalami perkembangan pendapatan perkapita yang sangat pesat. Menurut unggahan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, (2023) menjelaskan bahwa tingginya pendapatan perkapita Provinsi DKI Jakarta didorong oleh beberapa faktor diantaranya, investasi dan konsumsi rumah tangga, transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan, serta stabilitas ekonomi. Sedangkan berdasarkan sumber lain pendapatan perkapita Provinsi DKI Jakarta dapat meningkat secara pesat juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang dibuktikan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan pada

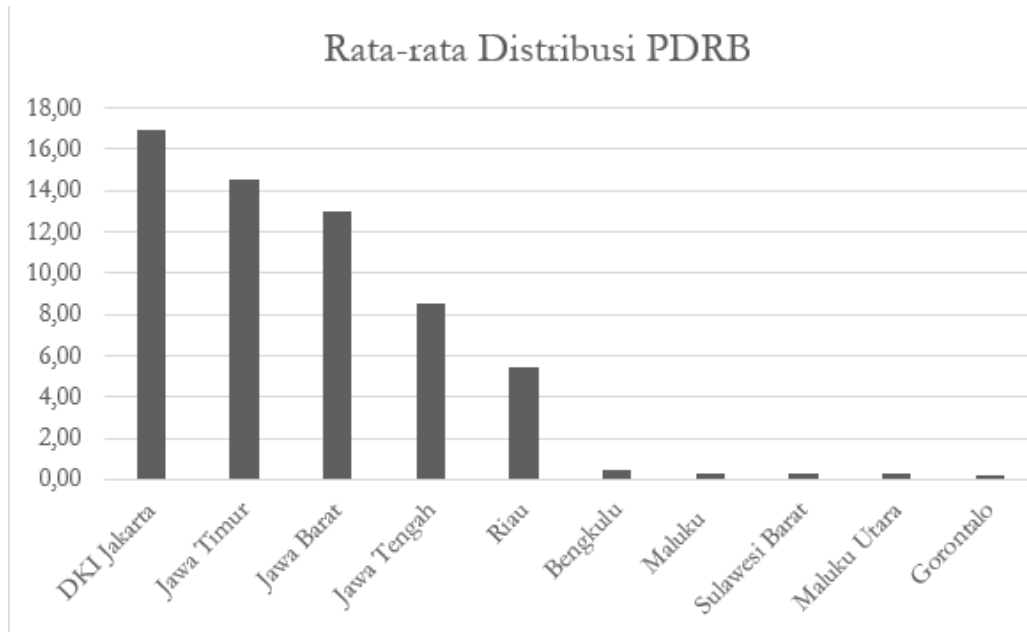
wilayah tersebut. Sitorus et al., (2024). Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendapatan perkapita yang cukup rendah diantara provinsi-provinsi lainnya.

Ketimpangan ekonomi antar provinsi dapat menjadi lebih tinggi ketika terdapat perbedaan pendapatan per kapita yang besar; hal ini diyakini disebabkan oleh variasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah provinsi. Selain itu, ketimpangan antar provinsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor seperti investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, investasi asing, ketimpangan pendapatan, serta situasi pembangunan manusia dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan karena, ketika suatu wilayah tumbuh, seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan PDB negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya meningkatkan PDB negara tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memungkinkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di negara tersebut.

Namun, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan ketimpangan peran pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional negara seperti yang dapat kita lihat dalam Grafik 1.4 mengenai, rata-rata distribusi PDRB terhadap PDRB 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan harga berlaku.

**Grafik 1. 4**  
**Rata-rata Distribusi PDRB terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi di Indonesia**  
**(Persen)**



Sumber : BPS Indonesia diolah

Data mengenai distribusi PDRB terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi di Indonesia memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi setiap wilayah provinsi terhadap total PDRB nasional. Provinsi dengan nilai PDRB yang tinggi diindikasikan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih intensif baik dalam sektor industri, perdagangan, maupun jasa. Provinsi dengan karakteristik tersebut merupakan wilayah provinsi unggulan. Analisis distribusi PDRB mampu mengungkapkan ketimpangan ekonomi yang terjadi antar provinsi. Jika terdapat provinsi dengan PDRB yang sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang jauh lebih rendah maka hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar wilayah.

Berdasarkan data grafik 1.4 mengenai rata-rata distribusi PDRB terhadap PDRB 34 Provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2012-2023, menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki kontribusi PDRB tertinggi dengan nilai mencapai 16,90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pertumbuhan ekonomi negara. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan

dengan nilai masing-masing sebesar 14,50 % dan 13,02%. Ketiga Provinsi di Pulau Jawa ini secara bersama-sama menyumbang hampir 44% dari total PDB nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih tersentral di Pulau Jawa.

Beberapa Provinsi, seperti Gorontalo dan Maluku Utara berada pada peringkat terakhir penyumbang PDB nasional yang menunjukkan bahwa provinsi tersebut dimungkinkan masih mengalami keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan masih menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi, infrastruktur, serta akses pada kebutuhan-kebutuhan penunjang kesejahteraan. Data mengenai distribusi PDRB di atas mencerminkan masih tingginya ketimpangan yang terjadi dalam hal pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Seperti halnya antara Provinsi di Pulau Jawa yang lebih mendominasi daripada provinsi-provinsi lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan maka penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai pembagian wilayah-wilayah tersebut berdasarkan klasifikasi pertumbuhan dan ketimpangan, mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan, serta melihat evolusi ketimpangan selama periode penelitian merupakan hal yang penting mengingat latar belakang masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah di provinsi-provinsi di Indonesia.

Untuk memahami pola ketimpangan pertumbuhan ekonomi di antara provinsi-provinsi di Indonesia, perlu dilakukan kajian terhadap tipologi ketimpangan. Metode ini membantu untuk menemukan perbedaan-perbedaan penting dalam kinerja ekonomi regional, selain mengamati konsentrasi pusat-pusat ekonomi. Indeks Gini adalah ukuran utama dalam menilai distribusi pendapatan. Dengan melihat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini, dapat dinilai apakah pertumbuhan ekonomi mendorong pemerataan pendapatan atau justru memperburuk ketimpangan.

Dengan menekankan aspek spasial dari ketimpangan ekonomi, indeks Williamson menawarkan perspektif alternatif. Analisis ini sangat penting untuk mengenali tren ketimpangan ekonomi regional secara umum. Data kuantitatif mengenai arah dan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini dapat diperoleh melalui studi korelasi Pearson. Analisis ini dapat menunjukkan apakah ada korelasi positif atau negatif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pemilihan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia Periode 2012-2023” dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa meskipun beberapa provinsi mengalami pertumbuhan yang pesat, provinsi lainnya masih tertinggal dan mengalami stagnasi. Ketimpangan ini sering kali disebabkan oleh faktor geografis, sumber daya alam, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah yang tidak merata. Dengan fokus pada provinsi di Indonesia, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih merata dan efektif, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana variasi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia ?
2. Bagaimana perkembangan ketimpangan pendapatan antar wilayah ?
3. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya dibatasi pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2012 – 2023. Untuk mengidentifikasi pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi digunakan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto Riil perkapita, Jumlah Penduduk Setiap Provinsi di Indonesia, Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi di Indonesia dan jumlah penduduk di Indonesia.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variasi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia, mengevaluasi perkembangan ketimpangan pendapatan antar wilayah, serta mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan analisis korelasi antara indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai distribusi pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia serta hubungan antara kedua variabel tersebut di tingkat provinsi.

## **BAB 2**

### **Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu yang mengambil tema tentang analisis ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Indonesia dan berguna bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

Penelitian Hidayah dan Tallo (2020). Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019,” dengan menggunakan metode Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Location Quotient, mereka menemukan bahwa pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Pendapatan per kapita, yang sebenarnya meningkat, berkorelasi terbalik dengan kejadian ini. Studi ini juga mengungkapkan bahwa, sesuai dengan tipologi Klassen, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada masalah kesenjangan ini. Jawa Tengah memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang signifikan ( $IW = 0,63$ ), berdasarkan hasil analisis ketimpangan dengan menggunakan Indeks Williamson, yang mengindikasikan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu, menurut penelitian Location Quotient (LQ), industri manufaktur dan jasa pendidikan merupakan dua industri teratas di Jawa Tengah. Industri lainnya masih berada di daerah tertinggal, yang menurunkan tingkat pertumbuhan PDB.

Studi “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 2015-2019” oleh Ambar dkk. (2021) menggunakan metodologi yang sama, yaitu dengan menggunakan korelasi Pearson, indeks Williamson, dan tipologi Klassen. Berdasarkan pertumbuhan dan PDB per kapita, studi ini menemukan bahwa daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara dapat dikategorikan ke dalam berbagai kelompok pembangunan ekonomi. Beberapa kabupaten, termasuk Halmahera Utara dan Kota Tidore, dianggap sebagai daerah tertinggal, sedangkan Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah dianggap sebagai daerah yang maju dan berkembang pesat. Ketimpangan ekonomi telah

meningkat, berdasarkan analisis Indeks Williamson, yang memiliki indeks rata-rata rendah sebesar 0,277. Terbatasnya aktivitas pertambangan di beberapa daerah dan aglomerasi sektor perdagangan yang hanya terfokus di Kota Ternate menjadi penyebab utama peningkatan ketimpangan ini. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan memiliki hubungan yang negatif berdasarkan korelasi Pearson ( $r = -0,379$ ), meskipun hubungan ini tidak signifikan secara statistik ( $p = 0,529$ ).

Kedua studi ini menunjukkan bagaimana hasil yang diperoleh menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antarprovinsi meskipun alat analisis yang sama-tipologi Klassen dan Indeks Williamson-digunakan. Di Jawa Tengah, penelitian Hidayah dan Tallo (2020) menunjukkan kesenjangan yang lebih besar, tetapi penelitian Ambar dkk. (2021) menunjukkan berkurangnya kesenjangan di Maluku Utara. Keduanya menekankan betapa pentingnya industri unggulan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah dan bagaimana konsentrasi industri tertentu dapat meningkatkan atau menurunkan ketimpangan ekonomi daerah.

Dengan menggunakan tipologi Klassen dan indeks Williamson, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Huda (2020) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali” untuk periode 2009-2018 dan oleh Ismail (2020) yang berjudul “Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antardaerah di Provinsi Kalimantan Barat” menunjukkan bahwa pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dapat dikaji. Keduanya menggunakan klasifikasi wilayah berdasarkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang berada dalam kategori yang sama, sedangkan di Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar diklasifikasikan sebagai daerah yang cepat berkembang dan cepat naik. Namun, terdapat variasi tingkat ketimpangan. Sementara ketimpangan di Kalimantan Barat cukup rendah selama periode tersebut, Indeks Williamson di provinsi Bali menunjukkan tren penurunan.

Meskipun hipotesis Kuznets U terbalik tidak didukung, Kurniawan (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang mencolok antara pertumbuhan PDRB per kapita dan ketimpangan di Bali, yang sejalan dengan kesimpulan teoritis kurva Kuznets. Sebaliknya, Ismail (2020) menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB dan ketimpangan di Kalimantan Barat memiliki kecenderungan positif, sehingga berlawanan dengan kurva Kuznets. Temuan-temuan ini menyiratkan bahwa, tergantung pada situasi ekonomi regional

dan kebijakan yang diikuti, dampak pembangunan ekonomi terhadap ketimpangan dapat bervariasi. Meskipun kedua studi tersebut menggunakan teknik analisis yang sebanding, pola-pola ketimpangan ekonomi di berbagai daerah menunjukkan variasi yang mencolok. Studi Ismail (2020) di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi seringkali tetap konstan meskipun terjadi peningkatan PDRB, sedangkan studi Kurniawan (2020) di Provinsi Bali menunjukkan adanya hubungan yang substansial antara peningkatan PDRB per kapita dan penurunan ketimpangan. Hal ini mengimplikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dan distribusi kegiatan ekonomi dapat memengaruhi ketimpangan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semata.

Penelitian Kurniawan (2020) dan Ismail (2020) sama-sama menyimpulkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi di masing-masing wilayah, pola ketimpangan distribusi pendapatan berbeda-beda. Kurniawan (2020) mencatat penurunan ketimpangan di Bali, sementara Ismail (2020) menunjukkan ketimpangan yang tetap rendah di Kalimantan Barat. Ini mengindikasikan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi mungkin memiliki efektivitas yang berbeda dalam mengatasi ketimpangan, yang didukung oleh kebijakan lokal serta distribusi sumber daya yang tidak merata.

Dalam periode tahun 2011-2021, makalah penelitian Sondakh dkk. (2023) yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Empat Kota di Provinsi Sulawesi Utara” Sondakh (2023) menggunakan analisis tipologi Klassen dan indeks Williamson. Dengan nilai rata-rata ketimpangan sebesar 0,37, hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Manado tergolong ringan. Tiga kota lainnya, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu, memiliki tingkat ketimpangan yang rendah dengan nilai masing-masing 0,21, 0,13, dan 0,17. Manado dan Bitung didefinisikan sebagai daerah yang masih dapat berkembang dengan cepat (kuadran III), Tomohon sebagai daerah yang maju tetapi tertekan (kuadran II), dan Kotamobagu sebagai daerah yang maju tetapi berkembang pesat (kuadran I), menurut tipologi Klassen. Sondakh (2023) menyarankan pemerintah Manado sebagai pusat bisnis dan Bitung sebagai pusat industri untuk memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di Manado dan Bitung.

Dengan menggunakan analisis Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Korelasi Pearson, penelitian yang dilakukan oleh Annibras & Amin (2023), berjudul “Studi Spatio-

Temporal Ketimpangan Regional di Pulau Jawa Tahun 2013-2022”, menggunakan Tipologi Klassen yang memisahkan pembangunan ekonomi Jawa ke dalam empat kategori. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur sangat bergantung pada perkembangan industri di sana. Dengan pertumbuhan 3,56% Provinsi DKI Jakarta, wilayah yang maju dan tumbuh cepat pada 2021-2022, mengalami kontraksi akibat wabah COVID-19, masuk ke dalam kuadran I. Dengan nilai Indeks Williamson yang meningkat, Jawa Timur mencatatkan ketimpangan paling tinggi di Pulau Jawa, sedangkan DKI Jakarta memiliki ketimpangan paling rendah. Dengan koefisien korelasi sebesar -0,71, Analisis Korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan negatif yang substansial antara ketimpangan regional dan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,486, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan regional berbanding terbalik dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan yang substansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, (2021) berjudul “Analisis Ketimpangan Antar Wilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan” pada periode 2012-2019 menggunakan beberapa metode analisis, yaitu Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Korelasi Pearson, dan Shift Share, serta menguji Hipotesis Kuznet. Berdasarkan analisis Indeks Williamson, ketimpangan antar kabupaten/kota di Kalimantan menunjukkan fluktuasi dengan tren penurunan. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai 1,2525 dan menurun hingga 0,9269 pada 2016, meskipun sempat meningkat kembali pada 2017 dan menurun lagi pada 2019.

Dalam analisis Indeks Entropi Theil, ditemukan bahwa ketimpangan antar provinsi di Kalimantan lebih signifikan dibandingkan dengan ketimpangan di dalam provinsi. Sebesar 72,17 persen ketimpangan total disebabkan oleh perbedaan antar provinsi, di mana Kalimantan Timur berkontribusi besar terhadap ketimpangan ini. Provinsi ini memiliki ketimpangan antar kabupaten/kota tertinggi dengan nilai 0,55621, yang disebabkan oleh perbedaan besar antara PDRB per kapita di Kota Bontang dan Hulu Sungai Utara.

Uji Korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara PDRB per kapita dan indeks ketimpangan, dengan setiap kenaikan 1 persen pada pendapatan per kapita mengurangi ketimpangan sebesar 0,016025 persen. Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak terlalu kuat, dengan nilai signifikansi  $>0,05$ . Meski begitu, secara simultan, variabel PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi ketimpangan antar wilayah.

Penelitian ini juga menguji Hipotesis Kuznet, namun tidak menemukan pola hubungan berbentuk kurva U terbalik, sehingga hipotesis tersebut tidak berlaku di Kalimantan. Melalui analisis Shift Share, ditemukan bahwa ekonomi Kalimantan tumbuh sebesar Rp4.733.640.507,57 selama periode penelitian, terutama didorong oleh peranan nasional dan keunggulan kompetitif. Sektor transportasi, pendidikan, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki daya saing yang tinggi, sementara sektor pertanian tetap berkontribusi positif meskipun tergolong sebagai sektor agak kuat. Sektor pertambangan, walaupun memiliki kontribusi terbesar, tergolong agak lemah, sedangkan sektor industri pengolahan tergolong lemah namun mencatat perkembangan yang signifikan, menandakan adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju industri.

Penelitian yang dilakukan oleh Boemiya et al., (2023), yang berjudul "Determinant Economic Growth In Java Island", fokus utama adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2006 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan tiga pendekatan model: Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji statistik seperti Chow Test, Hausman Test, dan Breusch-Pagan Test, untuk memastikan konsistensi dan validitas estimasi model.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Investasi memiliki dampak positif yang berarti, di mana peningkatan investasi, baik domestik maupun asing, berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi. PAD juga berpengaruh positif, menandakan bahwa provinsi yang mampu memaksimalkan pendapatan daerahnya cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pendapatan ini, jika dikelola dengan efektif, dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif, meskipun tidak sekuat dua variabel lainnya. Hal ini menandakan bahwa dalam konteks tertentu, ketimpangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan insentif untuk berinovasi. Namun, temuan lain menunjukkan bahwa pengangguran dan kejahatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi dan meningkatnya angka kejahatan dianggap sebagai faktor

penghambat yang signifikan, karena keduanya menciptakan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan investor. Penelitian ini memberikan wawasan penting bahwa dalam konteks Pulau Jawa, investasi dan pengelolaan sumber daya lokal (PAD) adalah faktor kunci yang harus didorong melalui kebijakan ekonomi yang tepat, sementara pengangguran dan kejahatan perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arabi, Kunna, dan I Al-Suhaimi (2022) mengenai "Did the Saudi Economic Growth Distributed Equally?" memberikan perspektif yang relevan dalam konteks ketimpangan ekonomi, terutama dalam menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi selama periode 1999-2018 tidak tersebar merata di antara populasi. Penelitian ini menggunakan Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL) untuk menganalisis hubungan antara pendapatan per kapita dan ketidaksetaraan pendapatan, yang diukur dengan koefisien Gini.

Berlawanan dengan teori Kuznets yang menyatakan bahwa ketimpangan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, analisis ini mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita justru membantu meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa, sebaliknya, pembangunan ekonomi justru dapat memperburuk ketimpangan dan bukannya selalu membantu mewujudkan pemerataan pendapatan. Hal ini sangat penting karena, tanpa adanya hukum yang mendukung distribusi yang lebih adil, pembangunan ekonomi dengan sendirinya bukanlah jaminan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi.

Studi ini cukup relevan dengan isu yang sedang berkembang saat ini, yaitu kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Seperti halnya di Arab Saudi, Indonesia memiliki pembangunan ekonomi yang tidak merata antar provinsi. Hal yang terkait erat dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi (PDRB) suatu daerah dapat memperburuk atau mengurangi kesenjangan antar daerah adalah ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan melalui Indeks Williamson

Hasil penelitian di Arab Saudi membuktikan bahwa, jika tidak ada kebijakan yang tepat, pembangunan ekonomi dapat memperburuk kesenjangan kekayaan. Dalam studi di Indonesia, di mana distribusi pembangunan PDRB yang tidak merata berpotensi mempengaruhi perbedaan ekonomi antar provinsi, hal ini dapat menjadi paralel yang relevan. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka kerja di mana elemen-elemen lain, seperti

kebijakan fiskal atau krisis ekonomi global, dapat menjadi faktor penentu utama ketimpangan ekonomi, yang berpotensi terjadi di Indonesia selama periode penelitian (2012-2023).

Khususnya di wilayah Tunis Raya, penelitian oleh Hadi Mousavi (2020) yang berjudul “Kesenjangan Ketenagakerjaan Regional di Tunisia pasca-2011: Sebuah Studi Komparatif Menggunakan ESDA” menawarkan perspektif baru yang penting tentang ketidaksetaraan pekerjaan spasial di Tunisia. Studi ini menemukan pusat-pusat lapangan kerja dan memperlihatkan perbedaan yang mencolok dalam tingkat pengangguran di daerah perkotaan dan pedesaan dengan menggunakan pendekatan Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA). Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan oleh angka pengangguran di Gafsa sebesar 26,8%, daerah pedalaman seperti Gafsa dan Kasserine memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah pesisir.

Terjadinya autokorelasi spasial positif yang mengimplikasikan bahwa wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi seringkali cenderung berdekatan satu sama lain, sehingga menghasilkan pola geografis yang memperburuk ketimpangan regional-adalah hasil signifikan lainnya dari penelitian ini. Selain itu, pembentukan Indeks Pembangunan Daerah (RDI) menunjukkan bahwa daerah dengan RDI yang rendah umumnya memiliki tingkat pengangguran yang lebih besar, yang mengimplikasikan adanya korelasi langsung antara tingkat pembangunan dan kesempatan kerja.

Hasil ini relevan dengan penelitian saya tentang ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia karena variasi spasial dalam akses terhadap lapangan kerja dan pembangunan ekonomi seringkali mempengaruhi ketimpangan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti Tunisia, beberapa provinsi di Indonesia di luar pulau utama Jawa dan Sumatera memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, sehingga memperparah kesenjangan regional.

Terkait dengan Indonesia, studi ini juga menggarisbawahi perlunya lapangan pekerjaan untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Khususnya dalam hal distribusi pendapatan dan pertumbuhan PDB, ketimpangan antar provinsi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja yang adil, terutama di daerah-daerah yang memiliki PDB lebih rendah. Kebijakan yang mendukung pembangunan daerah yang lebih seimbang-seperti yang direkomendasikan dalam penelitian ini-juga sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan antar provinsi di Indonesia agar kemakmuran ekonomi dapat dibagi secara merata ke seluruh wilayah.

## 2.2 Landasan Teori

### 1. Teori Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

Ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan suatu fenomena umum yang sering terjadi dalam proses pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Ketimpangan ekonomi tidak hanya terjadi pada negara yang sedang berkembang namun juga terjadi di negara yang sudah maju hanya saja dengan tingkat ketimpangan yang berbeda. Pada awalnya ketimpangan disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada masing - masing daerah. Dampak dari adanya perbedaan ini menjadikan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Hal tersebut menjadikan beberapa wilayah di suatu negara memiliki kondisi daerah yang relatif maju (*development region*) dan daerah relatif terbelakang (*underdevelopment region*).

Ketimpangan antar daerah ini membawa dampak yang cukup serius terhadap proses pembangunan daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Dampak yang umum terjadi akibat dari adanya ketimpangan ekonomi ini adalah adanya kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan dampak politik dan ketentraman masyarakat. Sebab itu, aspek ketimpangan ekonomi antar daerah ini perlu adanya penanggulangan melalui formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlu digarisbawahi bahwa ketimpangan ekonomi antar daerah berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*income distribution*) antar rumah tangga atau kelompok masyarakat dalam suatu perekonomian. Ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan perbedaan antara daerah maju dan daerah tertinggal yang diukur dengan tingkat PDRB per kapita daerah. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan antara kelompok individu kaya dan miskin yang diukur dengan nilai pendapatan rumah tangga rata - rata pada setiap kelompok masyarakat. (Sjafrizal, 2018:119-120)

Pada dasarnya ketimpangan ekonomi antar daerah terjadi akibat adanya perbedaan struktur ekonomi, pola lokasi dan konsentrasi kegiatan ekonomi antar ruang (*spatial economics*) pada suatu daerah. Struktur dan pola lokasi tersebut ditentukan oleh distribusi kegiatan ekonomi antar ruang yang sangat dipengaruhi oleh keuntungan lokasi dari setiap tempat yang cenderung menimbulkan konsentrasi kegiatan ekonomi. Hirschmann (1958) mengemukakan

bahwa transmisi pertumbuhan ekonomi antar ruang ternyata tidak lancar, sehingga cenderung menimbulkan adanya daerah yang bertumbuh cepat (*growing points*) dan daerah yang bertumbuh lambat (*lagging region*).

Distribusi kegiatan ekonomi antar daerah akan sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh pada keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Konsentrasi ekonomi yang cukup cepat sering terjadi pada daerah yang memiliki keuntungan lokasi yang cukup tinggi. Daerah dengan konsentrasi kegiatan yang tinggi akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, hal tersebut terjadi karena daerah dengan konsentrasi yang tinggi didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi (*agglomeration economies*) sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga cenderung lebih baik. Berbanding terbalik dengan daerah - daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi relatif rendah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang cenderung lebih tertinggal.

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar lokasi dan daerah pada suatu negara sangat beragam bergantung pada kondisi geografis, kandungan sumber daya alam, serta distribusi penduduk antar daerah. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, kemudahan dalam melakukan kegiatan produksi dan transportasi pada lokasi tertentu menjadi faktor pendorong terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut. Sebab itu, tidak heran apabila konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut banyak terdapat pada daerah lokasi pertambangan, daerah pertanian yang subur atau di sekitar pelabuhan. Namun, tidak jarang terdapat pengecualian karena adanya kondisi - kondisi khusus pada lokasi tertentu yang dapat mendorong berkembangnya kegiatan produksi barang dan jasa.

Selaras dengan apa yang telah diungkapkan oleh Hirschman (1958), konsentrasi kegiatan ekonomi pada lokasi - lokasi tertentu cenderung semakin menjadi meningkat, hal tersebut terjadi karena transmisi pertumbuhan ekonomi antar daerah umumnya tidak berjalan secara seimbang (*unbalanced*). Kondisi tersebut umumnya terjadi karena variasi yang cukup besar dalam keuntungan lokasi antar daerah yang berdampak pada terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah - daerah tertentu (*spatial concentration*). Akibatnya, Hirschman mengidentifikasi adanya tendensi struktur ekonomi daerah yang cenderung terbagi atas dua kelompok utama, yaitu “Pusat Pertumbuhan” (*Growing Points*) dan “Daerah Terbelakang Atau Tertinggal” (*Lagging Regions*).

Pusat pertumbuhan merupakan daerah - daerah yang mengalami proses pertumbuhan cepat karena ditunjang oleh adanya keuntungan lokasi (*Locational Advantages*)

yang dapat menimbulkan berbagai bentuk keuntungan eksternal terhadap kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Sedangkan daerah terbelakang atau tertinggal merupakan daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasi yang cukup untuk mendorong proses kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang terbelakang atau tertinggal akan cenderung rendah sehingga berdampak pada penyediaan lapangan pekerjaan menjadi sangat terbatas sehingga tingkat pengangguran akan meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi cenderung lebih rendah. Daerah dengan pertumbuhan yang cepat sering kali disebut daerah utara (*north regions*) sedangkan daerah yang tumbuh dengan lambat sering kali disebut daerah selatan (*south region*). (Sjafrizal, 2018:121-122).

Kerangka teoritis terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah semula dikemukakan oleh Borts (1960) yang muncul sebagai analisis lebih lanjut dari teori pertumbuhan ekonomi regional neo-klasik yang dipelopori oleh Solow (1957). Analisis yang dilakukan oleh Borts menjadi sangat terkenal dalam ekonomi regional karena analisisnya mampu memberikan penjelasan secara teoritis, mengapa terjadi tendensi peningkatan (*divergency*) dan penurunan (*covergency*) dalam ketimpangan ekonomi antar daerah (*regional disparity*).

Analisis yang dilakukan oleh Borts dimulai dengan anggapan bahwa telah terdapat suatu tingkat ketimpangan ekonomi regional dalam suatu perekonomian yang terjadi karena perbedaan dalam kandungan sumber daya alam (*natural resources endowment*). Borts mengasumsikan, bahwa setiap daerah menghasilkan suatu output yang sama dengan fungsi produksi yang sama pula maka daerah yang mempunyai proporsi modal terhadap tenaga kerja yang lebih besar akan memiliki tingkat upah riil tertinggi dan *marginal product of capital* (MPC) terendah. Borts menetapkan lima asumsi untuk memahami formulasi modelnya secara lebih lanjut, asumsi tersebut antara lain:

1. Jumlah penawaran tenaga kerja daripada seluruh daerah adalah sama. Jalan satu-satunya untuk menambah penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah melalui pemindahan penduduk (*migrasi*) dari daerah lainnya
2. Daerah hanya menghasilkan satu jenis barang yang bersifat homogen
3. Ongkos transport antar daerah diasumsikan nol sehingga harga barang antar daerah adalah sama

4. Fungsi produksi pada setiap daerah adalah sama dengan sifat *Constant Returns to Scale* terhadap input modal dan tenaga kerja
5. Tidak diperlukan biaya untuk mengubah output menjadi benda modal yang diperlukan untuk kegiatan produksi.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari model ketimpangan ekonomi antar daerah oleh Borts adalah :

1. Peranan permintaan terhadap faktor produksi kapital muncul sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya mobilitas modal dan peningkatan upah antar daerah
2. Pengaruh dari perbedaan upah terhadap tingkat efisiensi investasi (MEI) hanya terjadi dalam jangka pendek yang selanjutnya akan mendorong pula terjadinya peningkatan produktivitas tenaga kerja (MPL), Akan tetapi, dalam jangka panjang akan cenderung terjadi penyamaan (*equalization returns*) yang selanjutnya mendorong terjadi pengurangan tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah (*convergency*).
3. Perpindahan penduduk (migrasi) dari daerah dengan upah yang rendah ke daerah dengan upah yang tinggi terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang terjadinya penyamaan balas jasa tenaga kerja (upah) sehingga mendorong terjadinya konvergensi dalam ketimpangan ekonomi antar daerah. Hal ini akan terjadi apabila migrasi dapat berlanjut dan semua hambatan mobilitas tenaga kerja dan mengarahkan modal untuk pindah ke daerah dengan tingkat upah rendah.

Terdapat dua alasan mengapa daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup cepat dapat menikmati kenaikan tingkat upah :

1. Peningkatan pendapatan melalui peningkatan investasi akan meningkatkan harga barang dan jasa sehingga mengakibatkan peningkatan nilai Marginal Product of Labor (MPL). Kondisi selanjutnya akan mendorong pula kenaikan upah riil apabila harga barang yang diimpor dari daerah lain lebih rendah dari nilai upah nominal daerah yang bersangkutan
2. Akumulasi modal akan mampu meningkatkan Marginal Physical Product of Labor apabila kenaikan tersebut dapat meningkatkan rasio modal terhadap tenaga kerja di setiap sektor produksi. Hal ini akan membutuhkan akumulasi modal yang sejalan dengan kenaikan harga output pada sektor padat karya relatif dibandingkan dengan sektor yang padat modal. (Sjafrizal, 2018:121-126).

Teori selanjutnya mengenai ketimpangan ekonomi antar daerah dijelaskan melalui paham neo-klasik yang dikemukakan oleh North (1956) dimana teori ini merupakan lanjutan

dari teori balas jasa faktor produksi yang disampaikan Borts (1960) sebelumnya. Dalam analisis ini dimunculkan sebuah asumsi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar daerah. Hipotesis tersebut kemudian umum dikenal sebagai hipotesis neo-klasik yang kemudian menarik perhatian para ekonom dan perencana pembangunan daerah.

Berdasarkan hipotesis neo-klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai pada titik puncak, setelah itu bila proses pembangunan terus berlanjut maka akan diikuti dengan penurunan ketimpangan secara berangsur-angsur. Berdasarkan hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa pada negara - negara yang sedang berkembang umumnya ketimpangan antar daerahnya cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara yang sudah maju ketimpangan antar daerahnya cenderung rendah. Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan antar daerah adalah berbentuk U terbalik (*reverse U-shape Curve*). Berdasarkan hipotesis analisis neo-klasik tersebut dapat pula diperkirakan bahwa negara - negara yang sedang berkembang ketimpangan ekonomi antar daerah cenderung tinggi dan meningkat (divergensi), akan tetapi semakin maju pembangunan suatu negara maka akan terjadi proses penurunan tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah (konvergensi).

Pentingnya membedakan antara hipotesis neo-klasik dengan Kuznetz Hipotesis agar tidak menimbulkan kerancuan. Hipotesis neo-klasik menyangkut dengan tendensi perkembangan ketimpangan ekonomi regional antar waktu yang diukur menggunakan Indeks Williamson, sedangkan Hipotesis Kuznetz menyangkut dengan tendensi perkembangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur menggunakan Koefisien Gini (Gini Ratio). Namun demikian, kedua aspek tersebut dapat berkaitan satu dengan yang lainnya atau tidak sama sekali.

Negara dengan taraf berkembang cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi ketika proses pembangunan, hal tersebut terjadi karena ketika terjadi proses pembangunan baru dimulai di negara berkembang kesempatan dan peluang pembangunan yang pada umumnya dimanfaatkan oleh daerah - daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan daerah - daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak semata disebabkan oleh faktor ekonomi namun

juga disebabkan oleh faktor sosial budaya sehingga akibatnya ketimpangan antar daerah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat pada daerah yang kondisinya lebih baik, sedangkan untuk daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Kondisi yang berlainan terjadi pada negara yang sudah maju dimana kondisi daerah pada umumnya sudah dalam kondisi yang lebih baik dari aspek sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, hambatan - hambatan sosial dan budaya dalam proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan merata antar daerah. Hal tersebut mengakibatkan proses pembangunan di negara maju akan cenderung mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Validitas atau kebenaran dari hipotesis yang dikemukakan oleh neo-klasik ini kemudian diuji oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar daerah pada negara maju dengan negara berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis neo-klasik ternyata terbukti benar secara empirik. Maka hal tersebut membuktikan bahwa proses pembangunan suatu negara tidak secara otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar daerah tetapi pada tahap permulaan justru terjadi kenaikan ketimpangan. Fakta empirik selanjutnya menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi di negara - negara sedang berkembang sebenarnya bukanlah akibat dari kesalahan pemerintah atau masyarakat, namun hal tersebut terjadi secara alamiah (natural) di semua negara. (Sjafrizal, 2018:126-128)

## **2. Ukuran Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi antara daerah ini bukan semata permasalahan yang biasa. Oleh sebab itu dibutuhkan alat ukur yang dapat menjelaskan secara komprehensif permasalahan mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai alat ukur ketimpangan antar daerah.

Perlu diingat di sini, bahwa berbeda dengan analisis distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, sedangkan analisis mengenai ketimpangan pembangunan antar daerah ini melihat perbedaan tingkat pembangunan antar daerah. Hal

yang dicoba dipecahkan dalam analisis ini adalah melihat perbedaan antara daerah maju dan daerah terbelakang.

Ukuran ketimpangan pembangunan antar daerah pada awalnya yang dilakukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studi oleh Jeffrey G. Williamson (1966). Dalam ilmu statistik, indeks ini merupakan coefficient of variation yang umum digunakan untuk mengukur perbedaan pada suatu hal. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal tersebut dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, perlu diketahui bahwa indeks ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu antara lain, sensitif terhadap definisi daerah yang digunakan dalam perhitungan, namun meski demikian indeks ini umum digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah.

Berlainan dengan gini rasio yang umum digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Williamson Index menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita sebagai data dasar. Alasan penggunaan hal tersebut adalah, karena pada analisis ini yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar daerah bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Ini berarti bahwa data yang relevan untuk mewakili hal tersebut sebagai dasar pengukuran ketimpangan regional adalah PDRB per kapita untuk masing-masing daerah. Apabila nilai Williamson Index mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila nilai mendekati 0 berarti pembangunan ekonomi sangat merata

Indeks lain yang umum digunakan untuk ketimpangan pembangunan antar daerah adalah Theil Index seperti yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yang menganalisis mengenai ketimpangan di Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam mengukur Theil Index serupa dengan yang digunakan untuk menghitung Williamson Index, yaitu PDRB perkapita dan jumlah penduduk untuk setiap daerah. Serupa dengan penafsiran Williamson Index, yaitu apabila nilai Index mendekati 1 artinya pembangunan sangat timpang sedangkan apabila nilai mendekati 0 artinya pembangunan sangat merata.

Penggunaan Theil Index untuk mengukur ketimpangan memiliki beberapa kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara bersamaan sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas. Untuk kasus di Indonesia sendiri, dengan menggunakan metode ini dapat dihitung ketimpangan dalam provinsi dan kabupaten/kota serta antar provinsi, kabupaten dan kota. Kedua, dengan menggunakan

Index Theil dapat pula dihitung kontribusi yang disebabkan oleh ketimpangan di dalam daerah yang bersangkutan (within) dan ketimpangan yang disebabkan oleh ketimpangan antar daerah (between).

Theil Index juga sering dikaitkan dengan analisis mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan ketimpangan daerah dengan cara menggunakan metode regresi terhadap hasil perhitungan indeks yang telah dilakukan. Dalam analisis ini Indeks Theil menjadi dependent variabel dan beberapa variabel tertentu menjadi variabel independen. Mengikuti teori neoklasik variabel independen yang digunakan adalah pendapatan perkapita yang menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara. Sedangkan persamaan yang digunakan berbentuk kuadratik karena hubungan antara ketimpangan pembangunan antar daerah dengan tingkat pembangunan suatu negara bersifat non-linier.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa faktor lain yang juga dapat menentukan perubahan ketimpangan pembangunan antar daerah selain pendapatan perkapita, variabel faktor tersebut antara lain, konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang (perdagangan) dan faktor produksi antar daerah. Bahkan kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung pula mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah tersebut dapat diukur dengan menggunakan indeks Location Quotient (LQ) atau Industrial Concentration Index (ICI), Indeks LQ dan ICI ini dapat dianalisis dengan menggunakan nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi sebagaimana terdapat dalam data PDRB masing-masing daerah atau dengan menggunakan data jumlah pekerja (employment) untuk masing-masing sektor.

Mobilitas barang (perdagangan) antar daerah sudah dipastikan akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar daerah karena, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam Teori Heckscher-Ohlin dalam Ilmu Ekonomi Internasional bahwa bila kegiatan perdagangan internasional dan antar daerah kurang lancar maka proses penyamaan harga faktor produksi akan terganggu. Hal tersebut berakibat pemerataan proses pembangunan antar daerah akan cenderung terhambat dan ketimpangan pembangunan antar daerah akan meningkat. Alokasi investasi antar daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar daerah

karena investasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan proses pembangunan daerah.

Alternatif lain yang dapat pula dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya ketimpangan adalah dengan menggunakan analisis shift share. Dengan menggunakan metode ini akan mampu mengetahui apakah penyebab ketimpangan tersebut berasal dari dalam daerah itu sendiri (proportionality shift and differential shift) atau apakah penyebab ketimpangan tersebut berasal dari luar daerah (regional share). (Sjafrizal, 2018:128-133)

### **3. Penyebab Umum Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah**

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai beberapa faktor yang dimungkinkan dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain :

#### **a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam**

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antara daerah adalah perbedaan yang cukup besar dalam kandungan sumber daya alam yang tersedia dalam suatu daerah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sumber daya alam yang terdapat di Indonesia pada dasarnya cukup besar. Di Indonesia sendiri kita tahu bawah terdapat daerah yang memiliki potensi minyak dan gas alam, namun pada daerah lain tidak memiliki. Di sisi lain terdapat daerah yang memiliki tambang batu bara, namun daerah lain tidak memilikinya. Beberapa contoh tersebut berlaku pula pada tingkat kesabaran lahan pada lokasi tertentu yang juga sangat bervariasi sehingga hal sangat mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing - masing daerah.

Adanya perbedaan kandungan sumber daya alam ini sangat mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang memadai akan mampu memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang terbatas. Perbedaan kandungan sumber daya alam antar daerah ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, apakah pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara cepat atau lambat.

Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang terbatas akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat, hal tersebut terjadi karena daerah ini hanya akan mampu memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi yang lebih tinggi sehingga daya saing daerah tersebut menjadi melemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan daerah yang

bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian, terlihat bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah meningkat pada suatu negara.

#### b. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor selanjutnya yang berpotensi mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah apabila terjadi perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan di sini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar daerah karena, perbedaan demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi geografis yang baik akan cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, kondisi ini akan berdampak pada peningkatan investasi pada daerah dengan kondisi demografis yang baik tersebut. Peningkatan investasi pada daerah dengan kondisi demografis yang mendukung juga akan berdampak pula pada peningkatan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Kondisi sebaliknya terjadi pada daerah yang memiliki kondisi demografis yang tidak mendukung, maka hal tersebut akan mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas kerja masyarakat setempat yang cenderung menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi para penanam modal (investor) sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan akan cenderung menjadi lebih rendah.

#### c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antar daerah dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan jasa yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang merupakan program pemerintah (transmigrasi) atau migrasi secara mandiri atau spontan. Alasan mengapa kelancaran mobilitas barang dan jasa dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi antar daerah adalah, karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat didistribusikan atau dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Proses migrasi yang tidak lancar juga berpengaruh terhadap kelebihan tenaga

kerja suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan sehingga daerah terbelakang mengalami kesulitan dalam mendorong kegiatan ekonomi pada daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tidak lagi diragukan bahwa ketimpangan ekonomi antar daerah akan cenderung relatif tinggi pada negara yang sedang berkembang dimana mobilitas barang dan jasa kurang lancar karena terbatasnya fasilitas transportasi dan komunikasi serta masih adanya beberapa daerah yang masih terisolir.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Adanya konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi pada suatu daerah tertentu menjadi faktor lain yang akan mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung terjadi secara lebih cepat pada daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih besar daripada daerah yang lain. Kondisi ini selanjutnya mampu mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan serta tingkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang rendah, yang selanjutnya akan mendorong terjadinya pengangguran serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat pada daerah tersebut.

Adanya konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, karena adanya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, sebagai contoh adanya minyak bumi, gas, dan batu bara dan bahan mineral lainnya yang terkonsentrasi pada satu wilayah. Selain itu, adanya lahan yang subur juga turut serta mempengaruhi kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor pertanian. *Kedua*, lebih meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara juga ikut serta mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. *Ketiga*, kondisi demografis (kependudukan) juga memiliki pengaruh karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi di tempat sumber daya manusia tersedia dalam jumlah cukup dan dengan kualitas yang lebih baik.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar daerah

Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah dengan alokasi investasi yang lebih besar melalui pemerintah atau dari investor swasta akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih cepat. Kondisi yang seperti disebutkan, tentu saja mampu mendorong terjadinya proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Hal tersebut berbanding terbalik

pada daerah dengan alokasi investasi oleh pemerintah dan swasta yang rendah berakibat pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah tersebut kurang baik.

Alokasi investasi pemerintah ke daerah banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Apabila sistem pemerintahan yang berlaku bersifat *sentralistik* maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat sehingga berakibat pada ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, apabila sistem pemerintah yang berlaku adalah sistem *desentralistik* maka alokasi dana investasi pemerintah akan lebih banyak dialokasikan pada tingkat daerah, sehingga hal tersebut akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pembangunan daerah.

Namun, hal di atas tidak terjadi pada investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam hal menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sedangkan keuntungan suatu daerah ditentukan pula oleh ongkos transport, baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan oleh seorang pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha, dan sewa tanah. Keuntungan aglomerasi termasuk kedalam keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi yang terkait pada suatu daerah. Fakta tersebut membuktikan bahwa investasi oleh pihak swasta lebih banyak teralokasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, hal tersebut mengakibatkan daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan. (Sjafrizal, 2018:136-139)

#### **4. Model Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Pemikiran mengenai teori pertumbuhan ekonomi regional ini pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun lima puluhan yang lalu. Teori mengenai pertumbuhan ekonomi regional dipelopori oleh Douglas C. North (1955) dan kemudian dilanjutkan oleh George H. Borts (1960). Tujuan utama dari adanya teori pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk memahami secara rinci dan mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau regional. Ketertarikan pada aspek ini muncul karena pada kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi regional terjadi secara bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa terdapat daerah yang pertumbuhannya terjadi sangat tinggi dan ada pula daerah yang memiliki

pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Adanya variasi pertumbuhan ekonomi ini tentu saja akan langsung mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Selain tujuan di atas, teori pertumbuhan ekonomi regional juga bertujuan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan ketimpangan pembangunan antar daerah (*regional economic disparity*). Hubungan ini dapat muncul dalam dua bentuk, yakni *divergensi* dan *konvergensi*, dimana *divergensi* merupakan suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi berakibat pada peningkatan ketimpangan pembangunan antar daerah. Sedangkan *konvergensi* merupakan kondisi dimana pertumbuhan ekonomi akan cenderung menurunkan tingkat ketimpangan antar daerah.

Untuk menjawab seluruh pertanyaan di atas akan dijelaskan menggunakan enam model pertumbuhan yang cukup terkenal dan banyak diterapkan dalam praktik kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Berikut ini merupakan beberapa model pertumbuhan ekonomi regional tersebut :

a. Model Basis Ekspor (*Export-Base Model*)

Model dengan basis ekspor pada mulanya dikemukakan oleh Douglas C. North pada tahun 1955 yang didasarkan pada hasil studi yang dilakukan pada negara bagian di Amerika Serikat. Berdasarkan model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya ditentukan oleh besarnya nilai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Apabila suatu daerah tertentu mampu mendorong pertumbuhan produksi pada sektor-sektor yang memiliki keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor maka pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki hal tersebut akan mengalami pertumbuhan yang meningkat dengan cepat. Hal tersebut dapat terjadi karena peningkatan pada kegiatan ekspor tersebut akan mampu memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang cukup besar bagi perekonomian daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Blair (1991), secara teoritis model basis ekspor ini dapat diformulasikan dengan menggunakan apa yang disebut dengan *Formal Income Model*. Dalam model ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dapat ditampilkan dalam bentuk persamaan berikut :

$$Y = C + MI + MO$$

Dimana Y merupakan PDRB regional pada suatu daerah yang bersangkutan berdasarkan harga konstan, C merupakan konsumsi, MI menunjukkan arus uang masuk ke daerah karena adanya kegiatan ekspor dan MO adalah arus uang keluar karena adanya aktivitas impor.

Model diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh perkembangan basis yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Sedangkan besar kecilnya pengaruh juga ditentukan oleh nilai koefisien multiplier pada daerah yang bersangkutan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, hipotesis yang dapat ditarik dari model basis ekonomi ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan positif dengan peningkatan kegiatan sektor basis pada daerah yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena ekspor suatu daerah dihasilkan oleh sektor basis pada daerah yang bersangkutan. Ekspor yang dimaksud dalam hal ini dapat berbentuk perdagangan dengan luar negeri atau perdagangan antar daerah dalam suatu negara.

b. Model Interregional Income

Model *Interregional Income* merupakan perluasan dari model pertumbuhan ekonomi regional dengan basis ekspor dengan memasukkan unsur hubungan dan interaksi ekonomi antar daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi struktur administrasi daerah yang mana kita ketahui bahwa suatu negara biasanya terdapat banyak daerah, baik dalam bentuk provinsi atau dalam bentuk kabupaten/kota.

Model Ekonomi Antar Daerah dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Model ini berbeda dengan model basis ekspor yang mengasumsikan bahwa ekspor dan perdagangan antar daerah sebagai unsur di luar model (*exogenous variable*). Maka dalam model ini, ekspor dan perdagangan antar daerah diasumsikan berperan sebagai faktor yang berada dalam sistem perekonomian pada daerah yang bersangkutan (*endogenous variable*) yang fluktuasinya ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar daerah.

Secara lebih lanjut, kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal (investasi). Disamping itu, agar analisis menjadi lebih realistis maka pada model antar daerah ini diikutsertakan pula unsur pemerintah daerah yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan (*Government Revenue*), baik dalam bentuk pajak daerah dan dana perimbangan (*Regional Transfer*) dan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*), baik keperluan konsumsi dan investasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, unsur mobilitas investasi antar daerah juga turut diperhitungkan sesuai dengan prinsip Teori Ekonomi oleh Keynes. Model Ekonomi Antar Daerah dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M_i)$$

Dimana  $Y_i$ ,  $C_i$ ,  $G_i$ ,  $X_i$  dan  $M_i$  merupakan pendapatan regional (PDRB), konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah daerah, serta ekspor dan impor. Sedangkan subskrip  $i$  menunjukkan daerah (*region*). Persamaan ini memiliki implikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan melihat pada peningkatan pendapatan regional untuk periode tertentu. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi suatu regional atau daerah akan mempengaruhi pula pertumbuhan ekonomi regional lain yang terkait. Tentu saja pengaruh ini akan lebih besar dirasakan pada daerah - daerah yang lokasinya berdekatan satu dengan yang lainnya (daerah tetangga)

c. Model Shift Share

Model ini merupakan salah satu bentuk analisis pertumbuhan ekonomi regional yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi pada daerah tertentu. Analisis *shift-share* cukup terkenal dalam dalam ilmu ekonomi regional karena mampu mengidentifikasi peranan ekonomi nasional dan kekhususan daerah yang bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua unsur ini merupakan aspek penting dalam ilmu ekonomi regional.

Model pertumbuhan *Shift-Share* pada dasarnya merupakan penguraian (*decomposition*) secara matematis dari peningkatan nilai tambah yang melambungkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada regional yang bersangkutan dalam periode tertentu. Berdasarkan analisis *Shift-Share* dapat diketahui bahwa peningkatan produksi atau nilai tambah suatu sektor daerah dapat diuraikan menjadi tiga komponen bagian besar yaitu,

1. *Regional Share*, merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar, yaitu peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat dari kebijakan nasional yang berlaku pada seluruh daerah,
2. *Proportionality Shift*, merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.
3. *Differential Shift*, merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif, unsur pertumbuhan inilah yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah yang bersangkutan.

d. Model Neo-Klasik Spasial

Model ini dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada teori pertumbuhan oleh Sollow (1957). Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau regional akan sangat ditentukan oleh kemampuan regional tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak semata hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah yang terjadi karena perbedaan upah dan hasil pengembalian investasi antar daerah. Karena kunci pertumbuhan ekonomi antar daerah merupakan peningkatan kegiatan produksi, maka sejalan dengan Richardson (1978), model neoklasik ini dapat dituliskan mulai dari fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi adalah dalam bentuk Cobb-Dougllass maka dapat dituliskan :

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

Dimana Y melambangkan PDRB, K dan L masing-masing adalah modal dan tenaga kerja. Dalam hal ini penganut model neo klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Hal ini berakibat pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli hanya terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan ekonomi regional cenderung melebar. Kondisi ini akan mampu mendorong terjadinya proses divergensi, yaitu pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkatkan ketimpangan ekonomi antar daerah.

Namun, apabila proses pembangunan terus berlanjut dengan diiringi semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Akibatnya, modal dan tenaga kerja yang pada awalnya hanya terkonsentrasi pada daerah maju, perlahan akan berpindah ke daerah yang relatif terbelakang. Maka, pertumbuhan ekonomi pada daerah yang kurang maju secara bertahap menunjukkan peningkatan sehingga terjadi proses konvergensi atau suatu proses dimana pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar regional. Kesimpulan kedua yang disampaikan oleh neo-klasik dan kemudian dikenal sebagai Hipotesis Neo Klasik yang sering digambarkan menggunakan kurva U terbalik yang menghubungkan antara indeks ketimpangan dengan tingkat pembangunan nasional.

Sesuai dengan kesimpulan ini, hipotesis yang dapat ditarik pada model ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan peningkatan jumlah tenaga kerja suatu daerah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. *Kedua*, pada awal proses pembangunan ketimpangan regional cenderung

mengalami peningkatan, namun setelah titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan ketimpangan pembangunan antar daerah akan menurun dengan sendirinya.

e. Model Penyebab Berkumulatif

Model penyebab berkumulatif (*cumulative causation model*) ini pertama kali dikemukakan oleh Nikolas Kaldor yang ditunjukkan untuk mengkritik terdapat teori model neo-klasik. Model penyebab berkumulatif tidak setuju apabila pemerataan pembangunan antar daerah mampu dicapai dengan sendirinya hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar. Menurut model penyebab berkumulatif, ketimpangan pembangunan daerah hanya mampu dikurangi melalui program pemerintah yang secara intensif memang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Menurut model ini, apabila upaya tersebut hanya diserahkan pada mekanisme pasar maka ketimpangan ekonomi antar daerah diperkirakan akan tetap terus meningkat seiring dengan peningkatan proses pembangunan ekonomi nasional.

Richardson (1978) kemudian mencoba memformulasikan argumentasi model penyebab berkumulatif ini dengan sederhana dengan menggunakan persamaan linier. Formulasi model ini diawali dengan adanya hubungan positif antara peningkatan produksi regional (PDRB),  $y$ , yang mewakili pertumbuhan ekonomi regional. Formulasi tersebut adalah sebagai berikut :

$$r = \alpha + \beta y$$

Dimana  $\alpha$  dan  $\beta$  merupakan konstanta. Hipotesis yang dapat ditarik dari model penyebab berkumulatif ini untuk kegiatan penelitian, antara lain bahwa terdapat proses pertumbuhan yang berkumulatif sehingga pengurangan ketimpangan regional tidak dapat diserahkan kepada pasar, namun melalui kebijakan pemerintah yang intensif. Dengan demikian, hipotesis yang dapat ditarik dari model ini sebagai penelitian antara lain menyangkut dengan tendensi ketimpangan pembangunan antar daerah, yaitu apakah bersifat menurun atau meningkat.

f. Model Kota dan Desa

Model kota dan desa (*center-periphery model*) merupakan suatu teori pertumbuhan ekonomi regional yang dipelopori oleh Gurnal Myrdal (1956). Dalam model ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh adanya sinergi yang kuat antara kegiatan ekonomi daerah pedesaan (*rural*) dan daerah perkotaan (*urban*). Sebagaimana diketahui pada umumnya daerah pedesaan mayoritas merupakan daerah pertanian, sedangkan daerah perkotaan didominasi oleh kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Keterkaitan ini muncul karena pada umumnya bahan baku sektor industri masih berasal

dari sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Demikian halnya dengan sektor perdagangan yang sebagian besar masih berbentuk komoditi pertanian.

Adanya sinergi antara daerah pedesaan dan perkotaan tersebut dapat direalisasikan apabila terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi pada kedua daerah tersebut. Keterkaitan ini biasanya dapat dikembangkan melalui hubungan input (*backward linkages*) dan hubungan output (*forward linkages*) antara kegiatan yang saling terkait. Ini berarti bahwa sinergi pembangunan antar daerah pedesaan dan perkotaan akan mampu direalisasikan apabila hasil produksi sektor pertanian di daerah pedesaan sebagian besar digunakan oleh kegiatan industri, perdagangan dan jasa pada daerah perkotaan terkait. Sedangkan hasil produksi daerah perkotaan sebagian besar dimanfaatkan oleh daerah pedesaan terkait.

Dampak adanya keterkaitan antar kota-desa ini, akan mampu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi daerah sehingga daya saing produksi yang dihasilkan juga akan dapat ditingkatkan. Peningkatan efisiensi dan daya saing produksi ini merupakan kekuatan utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan.

Di lain pihak keterkaitan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan tersebut akan dapat pula mendorong terwujudnya apa disebut oleh Mirdal sebagai Efek Rembesan (*Trickling-down Effect*). Melalui proses ini, pemerataan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan akan dapat diperbaiki sehingga kemakmuran masyarakat secara keseluruhan akan mampu ditingkatkan pula. (Sjafrizal, 2018:98-116).

## **5. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli**

Teori pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai berbagai faktor yang dapat menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi satu dengan lainnya sehingga terjadinya proses pertumbuhan ekonomi. (Boediono, 1985:2).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam kurun waktu jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kenaikan output perkapita. Pada hal ini terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Output perkapita merupakan output total dibagi dengan dengan jumlah penduduk. (Boediono, 1985:1)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu masyarakat antara lain :

1. Akumulasi Modal

Semua investasi baru dalam bentuk tanah (tanah), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Jika sebagian besar pendapatan saat ini ditabung untuk kemudian diinvestasikan untuk meningkatkan output di masa depan, ini disebut akumulasi modal. Pabrik, mesin, peralatan, dan barang baru yang akan meningkatkan modal fiskal negara, yaitu jumlah riil bersih dari semua barang modal produktif secara fiskal, sehingga negara tersebut dapat mencapai tingkat output yang lebih tinggi pada akhirnya.

2. Pertumbuhan Penduduk

Secara tradisional, pertumbuhan penduduk dan hubungannya dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, atau tenaga kerja, telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja terkait dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

3. Kemajuan Teknologi

Cara-cara lama dan baru untuk melakukan pekerjaan tradisional diperbarui melalui kemajuan teknologi. Ada dua kategori kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi netral, yang terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama

Dalam Ilmu Ekonomi tidak hanya terdapat suatu teori pertumbuhan, melainkan terdapat bermacam teori pertumbuhan. Hingga saat ini (dan masa mendatang) tidak ada suatu teori yang menyeluruh serta lengkap serta yang merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku (Boediono, 1985:2). Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut, teori tersebut antara lain :

- a. Teori - teori Klasik

- Adam Smith

Menurut Adam Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Kedua aspek tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam aspek Pertumbuhan Output total, Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dalam tiga unsur pokok yaitu, sumber daya

alam yang tersedia (atau faktor produksi “tanah”), sumber-sumber manusiawi (Jumlah penduduk), dan stok barang kapital yang ada.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya selama sumber-sumber ini belum dimanfaatkan sepenuhnya, yang memiliki peranan dari proses produksi adalah dua unsur produksi yang lain yaitu jumlah penduduk dan stok kapital yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi akan terus berjalan sepanjang sumber sumber daya alam masih tersedia.

Unsur yang kedua merupakan sumber-sumber manusiawi atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan yang pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya pembagian sistem kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang tenaga kerja sebagai salah satu input proses produksi. Menurut Adam Smith, perkembangan penduduk akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dikarenakan perkembangan penduduk akan memperluas pasar. Pada tahap ini dianggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia melalui proses pertumbuhan atau penurunan penduduk.

Unsur yang ketiga dalam aspek pertumbuhan output total adalah stok barang kapital yang ada. Menurut Adam Smith, stok kapital (K) memiliki dua pengaruh terhadap tingkat output total (Q), yaitu pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini pengaruh modal secara langsung terhadap output total karena penambahan K yang diikuti oleh penambahan tenaga kerja akan meningkatkan Q. Semakin banyak input, maka semakin banyak pula output yang didapatkan. Pengaruh secara tidak langsung dari K terhadap Q adalah berupa peningkatan produktivitas per kapita yang memungkinkan adanya tingkat spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Menurut Adam Smith semakin besar stok kapital maka semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang berakibat pada semakin tinggi produktivitas per kapita.

Aspek yang kedua dari konsep pertumbuhan Adam Smith adalah pertumbuhan penduduk, telah disebutkan bahwa penduduk bersifat “pasif” dalam proses pertumbuhan output, yang berarti dalam jangka panjang berapapun jumlah tenaga kerja

yang dibutuhkan oleh proses produksi akan tersedia melalui pertumbuhan penduduk. Menurut Adam Smith, penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah substansi, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk seseorang agar bisa mempertahankan hidupnya. Apabila tingkat upah berada di atas tingkat upah substansi, maka pertumbuhan penduduk akan meningkat. Sebaliknya, jumlah penduduk akan mengalami penurunan apabila tingkat upah yang berlaku jatuh di bawah tingkat upah substansi. (Boediono, 1985:16).

- David Ricardo

Melalui David Ricardo, teori pertumbuhan Klasik mengalami pengembangan lebih lanjut. Pengembangan tersebut berupa penjabaran model pertumbuhan menjadi suatu model yang lebih tajam, baik dalam konsep-konsep yang dipakai maupun dalam hal mekanisme proses pertumbuhan itu sendiri. Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan, antara lain, teori tentang nilai dan harga barang, teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh proses produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah serta teori bunga dan laba, teori tentang perdagangan internasional, dan yang terakhir yaitu teori tentang akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh David Ricardo tidak jauh berbeda dengan pemikiran Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu, David Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Arsyad, 2004:58-59).

Aspek pertumbuhan yang dikemukakan oleh David Ricardo memiliki beberapa ciri-ciri antara lain, jumlah tanah yang terbatas, tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun bergantung pada apakah tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah = *naturalwage*), akumulasi modal terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik investasi, kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu, dan sektor pertanian masih dominan.

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (*marginal product*) yang lebih dikenal dengan *the law of diminishing returns*. Selama tenaga kerja yang dipekerjakan pada lahan tanah dapat menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada akhirnya akan menekan tingkat upah ke bawah. Proses tersebut akan berhenti ketika tingkat upah turun hingga tingkat upah alamiah, jika tingkat upah turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) akan menurun. Dan tingkat upah akan naik lagi hingga tingkat upah alamiah, pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Maka dari faktor produksi tanah dan tenaga kerja, terdapat suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu berlakunya *the law of diminishing returns*.

Menurut David Ricardo, akumulasi modal dan kemajuan teknologi memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang artinya akumulasi modal dan kemajuan teknologi dapat memperlambat bekerjanya *the law of diminishing returns* yang pada gilirannya akan mampu memperlambat penurunan tingkat hidup ke tingkat hidup minimal. Inilah proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo, proses ini tidak lain adalah proses tarik menarik antara kekuatan *the law of diminishing returns* dengan kemajuan teknologi. Namun pada akhirnya proses tarik menarik tersebut dimenangkan oleh *the law of diminishing returns*, keterbatasan faktor produksi tanah (sumber daya alam) akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara hanya mampu tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber daya alamnya. Apabila seluruh potensi sumber daya alam telah digunakan secara penuh maka perekonomian akan berhenti tumbuh dan masyarakat akan mencapai posisi stasionernya dengan ciri-ciri sebagai berikut : tingkat output konstan, jumlah penduduk konstan, pendapatan perkapita juga menjadi konstan, tingkat upah pada tingkat alamiah (minimal), tingkat keuntungan pada tingkat minimal, akumulasi modal berhenti, dan tingkat sewa tanah yang maksimal.

- Thomas Robert Malthus

Malthus menitikberatkan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian tergantung pada jumlah output yang

dihasilkan oleh tenaga kerja, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut (Jhingan, M.L., 1983:121). Sebagaimana yang ditulis oleh Malthus “pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding” pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan apabila pertumbuhan tersebut akan meningkatkan “effective demand”. Peningkatan permintaan efektif tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan (Suryana, 2000:55).

Produksi dan distribusi merupakan dua unsur pokok kesejahteraan dapat dicapai dalam jangka pendek, asal dikombinasikan pada proporsi yang besar. Tenaga kerja, modal, dan organisasi merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan pembangunan ekonomi. Malthus menekankan faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan ekonomi, faktor tersebut antara lain, kenyamanan atas kekayaan, konstitusi, dan hukum yang baik yang dilaksanakan sebagaimana mestinya, kerja keras dan kebiasaan teratur, serta sifat jujur pada umumnya (Malthus, 1836 :309:310) dalam (Suryana, 2000:55). Menurut Malthus, “peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin dapat tercapai tanpa penanaman modal secara terus-menerus”. Sumber akumulasi modal adalah laba yang berasal dari tabungan para pemilik modal. Dalam upaya meningkatkan proses pembangunan ekonomi, Malthus menyumbang pemikirannya dengan beberapa saran antara lain,

1. melalui pertumbuhan berimbang di sektor pertanian dan sektor industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor tersebut dapat menaikkan produktivitas yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi.
2. Meningkatkan permintaan efektif, melalui pendistribusian kesejahteraan dan pemilik tanah secara adil serta memperluas perdagangan internal dan eksternal. Kedua perdagangan ini dapat meningkatkan keinginan selera dan hasrat untuk mengkonsumsi secara mutlak maka perlu untuk menjaga harga pasar komoditi dan mencegah berkurangnya laba.

- John Stuart Mill

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah teori yang diberikan oleh Mill. Teori yang dikemukakan oleh Mill bersifat unik, karena membahas hampir seluruh faktor yang penting bagi perekonomian masa kini. Mill menekankan faktor-faktor seperti tabungan, tingkat laba, kemajuan teknologi, distribusi pendapatan yang adil, perluasan perdagangan luar negeri, perubahan kelembagaan dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Menurut Mill tingkat akumulasi modal tergantung pada jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan atau besarnya sisa hasil usaha serta tergantung pada kuatnya kecenderungan untuk menabung. Dikarenakan tabungan tergantung pada besarnya sisa hasil usaha, maka tabungan akan meningkat seiring dengan naiknya laba dan sewa untuk membuat sisa hasil usaha tersebut. Pada bagian lain, kecenderungan seseorang menabung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, tingkat laba dan keinginan untuk menabung atau apa yang disebut Mill sebagai “keinginan efektif untuk mengakumulasi modal”. Menurut Mill dalam suatu perekonomian, tingkat laba pada gilirannya cenderung akan menurun karena hasil yang semakin menurun pada sektor pertanian dan seiring dengan penambahan penduduk. Namun, penurunan laba dapat dicegah dengan beberapa faktor, antara lain

1. Kerugian modal pada masa krisis
2. Perbaikan teknik
3. Perkembangan perdagangan luar negeri
4. Pinjaman pemerintah untuk mengeluarkan yang tidak produktif, dan
5. Melakukan ekspor modal ke negara jajahan untuk memproduksi barang konsumsi guna keperluan negara asal

Dalam analisis selanjutnya Mill mengemukakan, bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perubahan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha - usaha untuk menghilangkan penghambat pembangunan, seperti adat istiadat, kepercayaan dan berfikir tradisional. Perbaikan atau perubahan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang dinilai dapat memperbaiki mutu dan efisien faktor-faktor produksi yang pada akhirnya akan menciptakan pembangunan ekonomi. Menurut Mill, pendidikan memegang peran yang penting dalam proses pembangunan ekonomi, karena dengan adanya pendidikan akan berakibat pada meningkatnya pengetahuan teknik masyarakat dan meningkatnya ilmu pengetahuan. (Suryana, 2000:56-57)

b. Teori-teori Modern

- Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peran penting investasi dalam jangka panjang. Melalui teori Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan agregat tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya akan berpengaruh terhadap permintaan agregat, namun juga berpengaruh terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi yang lebih panjang, investasi mampu menambah stok kapital, misalnya bangunan pabrik, akses jalan, dan sebagainya (Boediono, 1985:59).

Harrod-Domar menyatakan bahwa hubungan antara peningkatan stok kapital dengan penawaran agregat adalah, bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat, akan berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Output yang dimaksud adalah output potensial, output ini bisa dihasilkan dengan stok kapital (atau kapasitas pabrik) yang ada (Boediono, 1985:60).

Teori Harrod-Domar memiliki beberapa asumsi antara lain :

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*Full employment*) dan barang-barang modal terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, maka pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak dimasukkan
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, maka fungsi tabungan dimulai dari nol
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*capital-output-ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio* = ICOR) (Arsyad, 2004:64-65).

Menurut Harrod-Domar pada setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatannya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal seperti gedung, peralatan, dan material yang rusak. Namun, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal (Arsyad, 2004:66).

- Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau perubahan transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi bukan sekedar menyangkut perubahan dalam struktur ekonomi, namun juga menyangkut proses yang menyebabkan beberapa hal antara lain :

1. Perubahan reorientasi organisasi ekonomi
2. Perubahan masyarakat
3. Perubahan cara penanaman modal, dari penanaman modal yang tidak produktif menjadi lebih produktif
4. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dari *family system* menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan
5. Perubahan pandangan masyarakat yang mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh alam, menjadi berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menimbulkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktural sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Rostow juga mengemukakan tahapan proses pembangunan ekonomi terjadi dalam lima tahap :

1. *The traditional society*

merupakan kondisi suatu masyarakat yang strukturnya masih berkembang dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan serta sikap yang masih primitif dan pola pikir yang masih irasional,

2. *the precondition for take-off*

Tahap prasyarat tinggal landas ini di definisikan Rostow sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat mulai mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*self sustained growth*). Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan sering terjadi secara otomatis.

3. *the take off*

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi hampir selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbentuknya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta

inovasi-inovasi dan meningkatkan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Maka tingkat pendapatan perkapita akan meningkat.

4. *the drive to maturity*

Tahap menuju kedewasaan ini diartikan oleh Rostow sebagai masa dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir di seluruh aspek kegiatan ekonomi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi dan juga oleh kebijakan pemerintah.

5. *the age of high mass consumption.*

Tahap konsumsi tingkat tinggi merupakan tahap akhir dari teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow, pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi (Arsyad, 2004:48-54).

● Simon Kuznet

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “Kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya” (Kuznet, 1871) dalam (Suryana, 2000:64). Kuznet mengelompokkan definisi tersebut dalam tiga komponen penting yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat melalui meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Peningkatan output yang terus-menerus dan terpelihara merupakan tujuan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang adalah tanda kematangan ekonomi.
2. Teknologi maju menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan dalam menyediakan berbagai macam barang kepada masyarakat. Kemajuan ekonomi memberikan dasar pra-kondisi untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya memang suatu yang diperlukan, akan tetapi kondisinya belum cukup untuk merealisasikan pertumbuhan potensial yang terdapat dalam teknologi baru

3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Pembaruan teknologi haruslah diiringi dengan pembaharuan sosial.

Tingginya tingkat produktivitas perkapita merupakan hasil dari meningkatnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang cepat. Tingginya tingkat pendapatan perkapita menyebabkan tingginya tingkat konsumsi per kapita, dengan demikian memberikan insentif untuk mengubah struktur produksi (karena jika penghasilan meningkat, maka permintaan akan barang-barang industri dan jasa lebih banyak dari pada permintaan akan produk pertanian). Teknologi yang maju diperlukan guna mencapai tingkat output dan mencapai perubahan-perubahan struktural yang menyebabkan skala produksi karakteristik unit usaha ekonomi mengubah organisasi dan lokasi.

Kemajuan teknologi juga sering dikaitkan sebagai penyebab riil mengapa terjadi jurang (*Gap*) ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin yang semakin melebar. Hal tersebut terjadi karena negara yang sudah maju dapat mengadakan penelitian-penelitian ilmiah, sedangkan bagi negara yang miskin sulit untuk melakukannya. Negara-negara yang sudah maju dapat memberikan teknologi mekanisme untuk mempertahankan dan memelihara kekuatannya sendiri serta kemajuan ekonomi yang terus menerus, yang sama sekali di luar kemampuan negara-negara yang sedang berkembang (Suryana, 2000:64-65).

- Schumpeter

Dalam teorinya, Schumpeter menekankan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan, Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama *inovasi*, dan pelakunya adalah para wiraswasta atau inovator atau entrepreneur. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya dapat diterangkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur (Boediono, 1985:47-48).

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi bukan merupakan suatu proses yang harmonis atau gradual, namun merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh karena adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk perkembangan ekonomi, faktor penting adalah *entrepreneur* yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk mengembangkan produk nasional.

Schumpeter memiliki keyakinan bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisir barang-barang yang diperlukan masyarakat secara keseluruhan. Para golongan pengusaha itulah yang menciptakan inovasi dan pembaharuan dalam perekonomian.

Berikutnya, Schumpeter membedakan penanaman modal dalam perekonomian menjadi dua golongan, yaitu penanaman modal otonom dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonom dalam jangka panjang ditentukan oleh penemuan alam baru dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu penanaman modal otonomi memiliki arti penanaman modal untuk menciptakan pembaruan. Sedangkan penanaman modal terpengaruh adalah penanaman modal yang diakibatkan adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan atau keuntungan-keuntungan perusahaan (Suryana, 2000:57-58).

- Solow - Swan

Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri - sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama model *neo-klasik*. Serupa dengan teori Harrod - Domar, model Solow - Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi

Kerangka umum dari model Solow - Swan hampir mirip dengan model Harrod - Domar, tetapi model Solow - Swan lebih cocok karena :

1. menghindari masalah “ketidakstabilan” yang merupakan ciri *warranted rate of growth* dalam model Harrod - Domar, dan
2. Bisa lebih cocok digunakan untuk menjelaskan masalah - masalah distribusi pendapatan

Kecocokan ini terutama disebabkan karena Solow dan Swan menggunakan bentuk fungsi produksi yang lebih mudah dimanipulasikan secara aljabar. Dalam model Harrod - Domar, output dan kapital dan output tenaga kerja masing - masing dihubungkan oleh suatu fungsi yaitu “Fungsi Produksi” (Boediono, 1985:81).

Terdapat empat anggapan yang melandasi model *neo-klasik* (Boediono, 1985:82)

1. Tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu
2. Adanya fungsi produksi yang berlaku pada setiap periode
3. Adanya kecenderungan untuk menabung *propensity to save* oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi dari output

#### 4. Seluruh tabungan masyarakat diinvestasikan

Untuk keseimbangan jangka panjang sendiri, Solow mengatakan bahwa posisi *long run equilibrium*, akan mampu tercapai apabila kapital per kapita,  $k$ , telah mencapai tingkatan yang stabil, artinya tidak adanya perubahan. Apabila nilai kapital konstan maka *long run equilibrium* akan mampu tercapai. Hal ini menjadi karakteristik posisi keseimbangan yang pertama (Boediono, 1985:88).

Karakteristik dari posisi keseimbangan yang kedua ialah, mengenai laju pertumbuhan output, kapital dan tenaga kerja. Pada posisi *long run equilibrium* laju pertumbuhan output biasa disimpulkan dari karakteristik bahwa output perkapita adalah konstan dan penduduk tumbuh sesuai dengan asumsi. Definisi output perkapita adalah output total tumbuh dengan laju jumlah penduduk per tahun (Boediono, 1985:90).

Karakteristik yang ke tiga dari posisi keseimbangan menurut Solow adalah, mengenai stabilitas dari posisi keseimbangan tersebut. Posisi keseimbangan model Solow - Swan bersifat stabil, dalam arti apabila kebetulan perekonomian tidak pada posisi keseimbangan, maka akan muncul kekuatan-kekuatan yang cenderung membawa kembali perekonomian tersebut pada posisi keseimbangan jangka panjang (Boediono, 1985:91).

Karakteristik berikutnya mengenai posisi keseimbangan adalah, menyangkut tingkat konsumsi dan tingkat tabungan (investasi). Tingkat tabungan (investasi) perkapita pada posisi keseimbangan adalah konstan, apa yang tidak ditabung dikonsumsi sehingga konsumsi perkapita juga konstan pada posisi equilibrium

Karakteristik yang terakhir dari posisi keseimbangan adalah, dengan imbalan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi atau aspek distribusi pendapatan. Karena hanya terdapat dua macam faktor produksi yaitu kapital dan tenaga kerja, maka output total akan habis terbagi antara para pemilik kapital dan pemilik faktor produksi tenaga kerja (Boediono, 1985:93).

- Federich List

List dipandang sebagai salah seorang pelopor yang mengemukakan landasan bagi pertumbuhan pemikiran ekonomi dengan mazhab historismus. Pemikiran - pemikiran List tertulis dalam bukunya yang berjudul *Das Nationale der Politischen Oekonomie* (1840). List berpendapat bahwasanya sistem liberalisme yang *laissez - faire* mampu menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya bergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan.

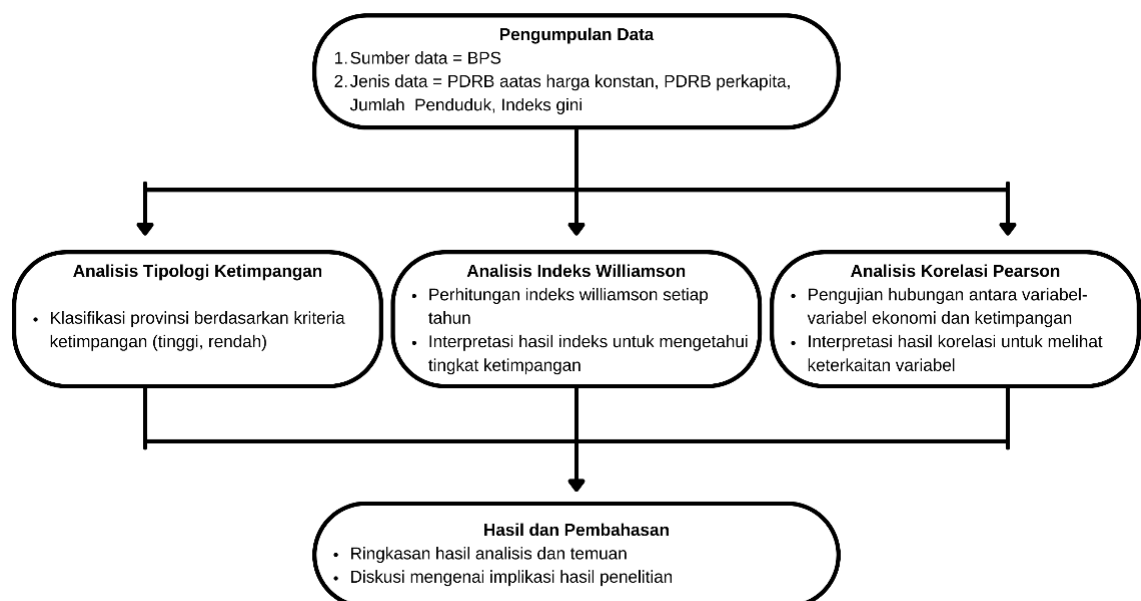
Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. List juga menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah diantara masyarakat.

List membagi proses perkembangan ekonomi kedalam lima tahapan yaitu, tahap primitif, tahap berternak, pertanian, pertanian dan industri pengolahan (manufacturing) dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan yang dilakukan List dalam menentukan tahapan perkembangan ekonomi ini berdasarkan pada “Cara Produksi”nya.

Selain membagi proses perkembangan ekonomi kedalam beberapa tahapan, List juga memberikan pendapatnya bahwa daerah dengan jenis iklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.

Pada akhirnya, sektor industri pengolahan sangat perlu dikembangkan dalam pembangunan ekonomi, walaupun pada awalnya perlu diberikan perlindungan, terutama untuk industri yang baru berkembang (infant industries). Di lain pihak, sektor pertanian tidak memerlukan perlindungan sebab sektor pertanian akan mendapatkan manfaat dengan sendirinya dari pertumbuhan industri (Arsyad, 2004).

### 2.3 Kerangka Penelitian



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data time series yang bersumber dari data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber data seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan berbagai data yang mendukung penelitian guna mendukung kepentingan penelitian. Data yang diambil merupakan data dengan kurun waktu dari tahun 2012 - 2023.

Untuk melakukan klasifikasi kuadran wilayah Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan alat analisis Tipologi Ketimpangan yang merupakan pengembangan dari alat analisis Tipologi Klassen. Sedangkan untuk menguji tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah digunakan pengujian Indeks Williamson. Yang terakhir merupakan pengujian untuk mengetahui hubungan antara Variabel (X) yang merupakan pertumbuhan ekonomi dan variabel (Y) berupa ketimpangan yang didefinisikan dengan Indeks Gini maka dilakukan pengujian Korelasi Pearson. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diakses melalui publikasi dari website BPS Indonesia. Data yang digunakan meliputi :

1. Data PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 2010 untuk provinsi di Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2012-2023
2. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 setiap provinsi dalam kurun waktu tahun 2012-2023
3. Data jumlah penduduk Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2023
4. Data Indeks Gini Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2023

#### **3.2 Metode Analisis**

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian Tipologi Ketimpangan, Indeks Williamson, dan Korelasi Pearson.

- a. Untuk Mengklasifikasikan Ketimpangan Pertumbuhan antar Provinsi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan alat analisis Tipologi Ketimpangan yang merupakan pengembangan dari alat analisis Tipologi Klassen. Pengembangan tersebut perlu dilakukan karena penelitian ini berfokus pada analisis ketimpangan pertumbuhan

ekonomi antar daerah di Indonesia. Maka tentu saja dalam analisis tersebut harus menggabungkan dua aspek utama dalam penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi dengan ukuran ketimpangan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah:

1. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2012-2023
  2. Indeks Gini menurut Provinsi di Indonesia dalam tahun 2012-2023
- b. Untuk menghitung tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan pengujian menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson antar Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2023. Data yang digunakan dalam perhitungan Indeks Williamson ini adalah :
1. PDRB Perkapita Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2023
  2. PDRB Perkapita rata-rata seluruh Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2023
  3. Jumlah penduduk Provinsi di Indonesia dalam tahun 2012-2023
  4. Jumlah keseluruhan penduduk Provinsi di Indonesia tahun 2012-2023
- c. Sedangkan untuk mengetahui korelasi antara pertumbuhan PDRB dengan ketimpangan antar provinsi di Indonesia, digunakan analisis menggunakan analisis korelasi Pearson. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah :
1. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (2010) di Provinsi Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2023
  2. Indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan antar daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2023

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu :

- a. Analisis deskriptif, merupakan suatu metode dengan menggunakan data angka yang sebenarnya untuk melihat gambaran data yang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada daerah tertentu
- b. Analisis Kuantitatif, merupakan metode yang menggunakan data-data yang berupa angka yang sebenarnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan :

1. Tipologi Ketimpangan

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini. Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan Indeks Gini sebagai sumbu horizontal.

Tipologi ketimpangan ini merupakan pengembangan dari analisis Tipologi Klassen, dimana tipologi kelasen digunakan untuk melakukan analisis mengenai klasifikasi daerah serta ketimpangan berdasarkan dua aspek utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam tipologi kelasen menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horizontal. Berikut merupakan bentuk matrik dari tipologi Klassen:

**Tabel 3. 1**  
**Matrik dari Tipologi Klassen**

<b>Laju Pertumbuhan (r)</b> \ <b>PDRB Perkapita (y)</b>	<b><math>y_i &gt; y</math></b>	<b><math>y_i &lt; y</math></b>
<b><math>r_i &gt; r</math></b>	Daerah cepat maju	Daerah berkembang cepat
<b><math>r_i &lt; r</math></b>	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Dimana :

$r$  = Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah (%)

$y$  = Rata-rata PDRB per kapita daerah (Rupiah)

$r_i$  = Pertumbuhan ekonomi daerah yang diamati (i) (%)

$y_i$  = PDRB Perkapita daerah yang diamati (i) (Rupiah)

Berdasarkan Tipologi Klassen, suatu daerah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income = Rapid Growth Region*). Yaitu merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat PDRB per kapita yang tinggi. Biasanya daerah ini merupakan pusat perekonomian yang besar dan telah dimanfaatkan secara maksimal.
2. Daerah yang maju tapi tertekan (*High Income but Low Growth = Retarded Region*), merupakan daerah yang dalam tahap maju namun pertumbuhan ekonominya tidak begitu cepat di masa yang akan datang meski daerah tersebut memiliki potensi pembangunan yang sangat besar
3. Daerah yang berkembang cepat/bertumbuh (*High Growth but Low Income = Growing Region*) merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada masa yang akan datang, daerah dengan klasifikasi demikian diperkirakan akan terus berkembang dengan cukup pesat
4. Daerah yang relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income = Relatively Backward Region*), merupakan daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah. Namun hal ini tidak berarti bahwa daerah tersebut tidak akan berkembang di masa yang akan datang. Melalui pengembangan potensi yang ada termasuk sumber daya manusianya, diperkirakan daerah dengan kategori ini akan dapat mengejar ketertinggalannya (Kuncoro, 2004:121).

Berbeda halnya dengan tipologi ketimpangan, fokus utama dari tipologi Klassen adalah pada status ekonomi relatif daerah, tanpa mempertimbangkan ketimpangan yang terdapat di dalam daerah tersebut. Dalam Tipologi Ketimpangan yang merupakan pengembangan dari Tipologi Klassen ini, mampu menambahkan dimensi baru dengan memasukkan Indeks Gini sebagai alat ukur ketimpangan di dalamnya. Dengan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini, tipologi ketimpangan ini tidak hanya mampu melihat dimensi pertumbuhan ekonomi saja, namun juga melihat bagaimana pertumbuhan tersebut didistribusikan di antara masyarakat dalam daerah yang bersangkutan. Hal tersebut memungkinkan adanya analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berdampak berbeda pada berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih realistik mengenai ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi antar daerah, indeks gini dinilai dapat digunakan untuk membandingkan ketimpangan di berbagai daerah, karena mampu memberikan wawasan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berdampak berbeda di berbagai daerah. Misalnya apabila dua daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang sama, namun jika salah satu daerah tersebut memiliki indeks gini yang lebih tinggi maka hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata dan mungkin hanya menguntungkan kelompok tertentu. Berikut merupakan bentuk matrik dari tipologi ketimpangan:

**Tabel 3. 2**  
**Matrik dari Tipologi Ketimpangan**

<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<p><b>(IV)</b> Daerah Maju-Merata (High Growth - Low Inequality)</p>	<p><b>(I)</b> Daerah Maju-Timpang (High Growth - High Inequality)</p>
	<p><b>(II)</b> Daerah Berkembang-Merata (Low Growth - Low Inequality)</p>	<p><b>(III)</b> Daerah Tertinggal-Timpang (Low Growth - High Inequality)</p>
	<b>Indeks Gini</b>	

Dalam Indeks Ketimpangan ini suatu daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu :

- a. Kuadran I merupakan, daerah maju-timpang (*High Growth - High Inequality*), dimana pada daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta ketimpangan yang tinggi pula, dengan kondisi rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi keseluruhan daerah serta rata-rata ketimpangan lebih

tinggi pada daerah yang bersangkutan dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan seluruh daerah. Pada kategori memiliki karakteristik dengan tingkat PDRB yang tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi namun masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan (indeks gini tinggi). Daerah dengan kategori ini biasanya berada pada tahap awal industrialisasi atau tengah mengalami transformasi ekonomi.

b. Kuadran II, merupakan daerah berkembang-merata (*Low Growth - Low Inequality*), dimana pada daerah ini memiliki laju pertumbuhan rendah dan ketimpangan yang rendah, dengan kondisi rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta rata-rata ketimpangan daerah yang bersangkutan juga lebih rendah dari rata-rata ketimpangan secara keseluruhan. Wilayah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dan ketimpangan yang rendah. Kondisi ini mungkin mencerminkan adanya distribusi pendapatan yang relatif merata, namun potensi pertumbuhan ekonomi yang belum tergalai sepenuhnya. Wilayah ini mungkin berada dalam tahap transisi atau sedang mencari model pembangunan yang lebih berkelanjutan.

c. Kuadran III, merupakan daerah tertinggal-timpang (*Low Growth - High Inequality*), dimana pada daerah ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang rendah atau di bawah rata-rata nasional dan ketimpangan yang tinggi (nilai indeks gini tinggi), dengan kondisi rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah dan rata-rata ketimpangan pada daerah yang bersangkutan lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan rata-rata indeks gini nasional. Wilayah dengan kategori ini cenderung terjebak dalam stagnasi ekonomi serta masih bergantung pada sumber daya alam atau sektor tradisional yang mendominasi perekonomian.

d. Kuadran IV, merupakan daerah maju-merata (*High Growth - Low Inequality*), dimana pada daerah ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta ketimpangan yang rendah, dengan kondisi rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan kondisi ketimpangan wilayah yang lebih rendah dari ketimpangan nasional. Wilayah ini merupakan kondisi ideal, yaitu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketimpangan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini menandakan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Wilayah ini telah berhasil mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan.

## 2. Indeks Ketimpangan Williamson

Fenomena ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau suatu daerah ternyata bukanlah hal yang sederhana dan mudah, karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. Adakalanya masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi ketika melihat banyak kelompok miskin pada daerah yang bersangkutan. Akan tetapi, ada pula masyarakat merasakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi ketika melihat adanya segelintir kelompok kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin.

Menanggapi masalah di atas, seorang sejarawan ekonomi bernama Jeffrey Williamson, merumuskan suatu perhitungan matematis untuk dapat mendefinisikan tingkat ketimpangan suatu daerah yang bersangkutan. Dalam perumusan Indeks Williamson ini, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk meneliti hubungan antara ketimpangan regional dengan tingkat pembangunan ekonomi. Rumus dari Indeks Ketimpangan Williamson adalah sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i^n (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}, 0 < V_w < 1$$

Dimana :

$y_i$  = PDRB Perkapita daerah  $i$

$\bar{y}$  = Rata-rata PDRB Perkapita seluruh daerah

$f_i$  = Jumlah Penduduk daerah  $i$

$n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka Indeks Williamson berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai mendekati 0 memiliki arti bahwa terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sedangkan nilai mendekati 1 memiliki arti bahwa terjadi ketimpangan sempurna antar daerah (Sjafrizal, 2018 : 128-129).

### 3. Korelasi Pearson

Korelasi merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Kedua variabel yang dianalisis dikatakan berkorelasi apabila perubahan variabel yang satu akan diikuti dua variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan.

Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan antar provinsi di Indonesia, dalam hal ini pertumbuhan PDRB dengan Indeks Gini, maka digunakan metode Korelasi Pearson (Pearson Product Moment) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

r = Korelasi Pearson

X = Pertumbuhan PDRB

Y = Indeks Gini

N = Jumlah Observasi

Nilai Korelasi Pearson dinyatakan dengan bilangan antara 0 (nol) sampai +1 atau 0 (nol) sampai -1. Apabila koefisien korelasi (r) mendekati =1 atau -1 maka terdapat hubungan yang kuat, sebaliknya apabila nilai 0 (nol) berarti hubungan antar kedua variabel tersebut lemah atau bahkan tidak terdapat hubungan. Apabila r sama dengan +1 atau -1 berarti terdapat hubungan positif sempurna atau negatif sempurna (Djarwanto Ps , Subagyo, 1985).

## BAB 4

### Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai deskripsi data penelitian, hasil dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan serta akan dicantumkan hasil pengujian untuk analisis tipologi ketimpangan, indeks williamson, dan korelasi pearson.

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

##### 4.1.1 Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan variabel yang menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan. Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini digunakan dalam analisis tipologi ketimpangan serta korelasi pearson.

##### 4.1.2 Variabel Indeks Gini

Variabel Indeks Gini Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2023 merupakan ukuran ketimpangan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2023. Ketika nilai indeks gini mendekati 1 maka menunjukkan ketimpangan yang sempurna antar wilayah di Indonesia, sebaliknya ketika nilai indeks gini mendekati 0 maka menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah di Indonesia tergolong rendah.

#### 4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

##### 4.2.1 Analisis Tipologi Ketimpangan

Alat analisis Tipologi Ketimpangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan dua indikator utama, yaitu :

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
2. Indeks Gini Ratio

Dengan cara menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu horizontal dan indeks gini sebagai sumbu vertikal. Ke-34 provinsi Indonesia dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu provinsi dengan kategori Maju-Timpang (*High Growth - Low Inequality*), provinsi dengan kategori berkembang-merata (*Low Growth - Low Inequality*), provinsi dalam kategori tertinggal-timpang (*Low Growth - High Inequality*), serta provinsi dengan kategori maju-merata (*High Growth - Low Inequality*).

**Tabel 4. 1**  
**Tipologi Ketimpangan Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023**

Provinsi	Kuadran	Rata - rata Indeks Gini Ratio	Rata-rata Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen)
Aceh	2	0,32	2,87
Sumatera Utara	2	0,32	4,57
Sumatera Barat	2	0,32	4,60
Riau	2	0,34	2,51
Jambi	2	0,34	4,70
Sumatera Selatan	2	0,36	4,78
Bengkulu	2	0,35	4,63
Lampung	2	0,34	4,43
Kepulauan Bangka Belitung	4	0,27	3,94
Kepulauan Riau	2	0,35	4,47
DKI Jakarta	1	0,42	4,98
Jawa Barat	3	0,41	4,69
Jawa Tengah	2	0,37	4,44
DI Yogyakarta	3	0,43	4,77
Jawa Timur	3	0,38	4,80
Banten	3	0,38	4,79
Bali	3	0,38	4,08
Nusa Tenggara Barat	3	0,37	3,86
Nusa Tenggara Timur	2	0,35	4,14
Kalimantan Barat	2	0,34	4,58
Kalimantan Tengah	4	0,33	5,42
Kalimantan Selatan	2	0,34	4,20
Kalimantan Timur	2	0,34	2,43

Kalimantan Utara	2	0,29	4,73
Sulawesi Utara	1	0,39	5,32
Sulawesi Tengah	4	0,35	10,82
Sulawesi Selatan	1	0,40	6,11
Sulawesi Tenggara	1	0,40	6,07
Gorontalo	1	0,42	5,51
Sulawesi Barat	1	0,36	5,36
Maluku	4	0,34	5,05
Maluku Utara	4	0,31	9,84
Papua Barat	3	0,40	3,66
Papua	3	0,40	4,78
<b>Rata - Rata</b>		<b>0,359</b>	4,88

<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>(IV)</b> Daerah Maju-Merata (High Growth - Low Inequality)	<b>(I)</b> Daerah Maju-Timpang (High Growth - High Inequality)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalimantan Tengah</li> <li>• Kepulauan Bangka Belitung</li> <li>• Sulawesi Tengah</li> <li>• Maluku</li> <li>• Maluku Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gorontalo</li> <li>• Sulawesi Barat</li> <li>• Sulawesi Utara</li> <li>• Sulawesi Selatan</li> <li>• DKI Jakarta</li> <li>• Sulawesi Tenggara</li> </ul>
	<b>(II)</b> Daerah Berkembang-Merata (Low Growth - Low Inequality)	<b>(III)</b> Daerah Tertinggal-Timpang (Low Growth - High Inequality)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceh</li> <li>• Sumatera Utara</li> <li>• Sumatera Barat</li> <li>• Riau</li> <li>• Jambi</li> <li>• Sumatera Selatan</li> <li>• Bengkulu</li> <li>• Lampung</li> <li>• Kepulauan Riau</li> <li>• Jawa Tengah</li> <li>• Nusa Tenggara Timur</li> <li>• Kalimantan Barat</li> <li>• Kalimantan Selatan</li> <li>• Kalimantan Timur</li> <li>• Kalimantan Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Barat</li> <li>• Jawa Timur</li> <li>• Banten</li> <li>• Bali</li> <li>• Nusa Tenggara Barat</li> <li>• Papua Barat</li> <li>• Papua</li> <li>• DI Yogyakarta</li> </ul>

#### Indeks Gini

Berdasarkan tabel di atas, dengan membandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2012-2023 untuk setiap daerah dengan rata-rata keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi serta rata-rata indeks gini dalam kurun waktu 2012-2023 untuk

setiap wilayah dengan rata-rata nasional indeks gini, maka provinsi-provinsi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :

1. Daerah maju-timpang (*High Growth - High Inequality*)

Kelompok wilayah maju-timpang terdiri dari DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Keenam provinsi yang masuk ke dalam kelompok maju-timpang dibentuk oleh beberapa elemen, antara lain: Didorong oleh sektor jasa, perbankan, perdagangan, pariwisata dan pertanian.

DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Namun demikian, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kesenjangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapatan antara penduduk di daerah pinggiran dan pusat kota. Hal ini disebabkan oleh terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di beberapa tempat dan terbatasnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pendidikan yang layak.

Provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun, kesenjangan di provinsi-provinsi ini juga cukup besar. Hal ini terutama terjadi di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Sementara masyarakat pedesaan masih menghadapi banyak tantangan termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, konsentrasi investasi dan pembangunan infrastruktur biasanya lebih berpihak pada kota-kota besar, secara umum, wilayah yang tumbuh cepat merupakan fase awal industrialisasi atau urbanisasi.

Pada titik ini, sektor-sektor modern dengan intensitas modal yang biasanya lebih tinggi dan orientasi pasar mendorong ekspansi ekonomi. Namun, proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat terkadang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan kebijakan distribusi pendapatan yang berkelanjutan, sehingga memperparah ketimpangan. Menurut hipotesis Kuznets, ketimpangan pendapatan akan meningkat pada fase awal industrialisasi, namun kemudian menurun seiring dengan meningkatnya pembangunan. Sementara itu, pada situasi lain, kurangnya kebijakan yang tepat untuk mendistribusikan pendapatan dapat menyebabkan ketimpangan terus meningkat. Kondisi di enam provinsi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi masalah utama dan

hipotesis Kuznets tidak sepenuhnya berlaku. Hasil analisis tersebut sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh

2. Daerah Berkembang-Merata (*Low Growth - Low Inequality*)

Daerah yang berkembang-merata ditandai dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan pertumbuhan rendah-ketimpangan rendah relatif stagnan, namun distribusi pendapatan di antara penduduk lebih merata. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara termasuk dalam kategori ini. Hasil analisis tersebut sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Tallo (2020) dengan menggunakan Tipologi Klassen, Hidayah dan Tallo menemukan bahwa Jawa Tengah termasuk dalam kategori daerah tertinggal, ditandai dengan wilayah Jawa Tengah memiliki Pendapatan perkapita serta pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Sebagai contoh, pembangunan ekonomi Provinsi Aceh telah terhambat oleh berbagai faktor, seperti dampak konflik berkepanjangan dan infrastruktur yang kurang memadai, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, ketimpangan pendapatan di Aceh relatif rendah, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di antara penduduk lebih merata, meskipun pertumbuhannya lambat.

Pola yang sama juga terlihat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua provinsi ini memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang kuat, pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut tidak cukup untuk menyebabkan terjadinya ketimpangan. Kesejahteraan penduduk di kedua provinsi ini secara umum stabil, meskipun tidak ada pertumbuhan yang signifikan.

Riau dan Jambi, yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, juga mengalami pertumbuhan yang lambat. Ketimpangan pendapatan tetap rendah sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pemerataan, meskipun faktanya pendapatan sektor ini tidak terdistribusi secara merata. Kebijakan tersebut antara lain Program Diversifikasi Sektor Ekonomi, Program Dukungan UMKM, dan pengembangan infrastruktur ekonomi dan sosial.

Sumatera Selatan dan Bengkulu memiliki potensi pertanian yang besar, namun pembangunan ekonomi mereka terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai dan terbatasnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, ketimpangan pendapatan di kedua provinsi ini masih relatif rendah.

Lampung dan Kepulauan Riau juga menunjukkan pertumbuhan yang lambat, tetapi dengan ketimpangan yang minimal. Lampung dan Kepulauan Riau, yang sama-sama bergantung pada sektor perdagangan dan pariwisata serta memiliki sektor pertanian yang dominan, dihadapkan pada tantangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama tetap memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Meskipun merupakan provinsi yang lebih maju, Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan yang stagnan. Meskipun pertanian dan industri kecil terus mendominasi perekonomian, ketimpangan pendapatan tetap rendah sebagai hasil dari kebijakan redistribusi yang lebih baik.

Pertumbuhan yang lambat juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, yang terkenal dengan sektor pertanian dan pariwisatanya. Namun demikian, ketimpangan pendapatan di Nusa Tenggara Timur relatif rendah, sebuah cerminan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan.

Meskipun memiliki kekayaan alam yang berlimpah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara juga mengalami keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, provinsi-provinsi ini memiliki kesenjangan ekonomi yang rendah karena adanya kebijakan yang mendukung pemerataan dan pembangunan infrastruktur.

Secara umum, wilayah-wilayah ini berada dalam fase transisi, di mana pembangunan ekonomi tidak cukup untuk menghasilkan kemajuan yang substansial, tetapi distribusi pendapatan tetap konsisten. Dalam konteks teori hipotesis Kuznets, wilayah-wilayah ini mungkin berada dalam fase di mana ketimpangan pendapatan tidak meningkat secara signifikan, meskipun pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Hal ini mengimplikasikan bahwa, berlawanan dengan hipotesis Kuznets, yang memprediksi bahwa ketimpangan akan meningkat pada fase-fase awal industrialisasi, namun pada kondisi wilayah dengan kategori

berkembang-merata mengalami kondisi dimana ketimpangan tetap rendah pada fase ini, meskipun pertumbuhannya tidak berjalan secara optimal.

### 3. Daerah Tertinggal-Timpang (*Low Growth - High Inequality*).

Wilayah yang diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal-timpang ini memiliki kesejahteraan penduduk yang rendah dan pembangunan ekonomi yang terbatas. Ciri-cirinya adalah pembangunan ekonomi yang rendah dan kesenjangan yang besar. Daerah yang relatif terbelakang adalah daerah yang memiliki kesenjangan pendapatan yang cukup besar, namun pembangunan ekonominya bertahap.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penyebaran hasil pembangunan. Tidak semua lapisan masyarakat menikmati kemajuan ekonomi yang sama, sehingga kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin terlihat jelas. Berdasarkan prinsip tahapan pertumbuhan, suatu negara atau wilayah akan melewati berbagai fase dalam proses pembangunannya. Daerah yang berada di kuadran tiga dalam kategori daerah tertinggal-timpang bisa jadi masih berada di fase awal pembangunan atau menunjukkan stagnasi dalam proses pembangunan.

Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Papua merupakan daerah dengan kondisi yang belum berkembang. Berdasarkan beberapa kriteria, antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, provinsi-provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar namun kemajuannya terkadang tidak merata. Delapan provinsi ini masuk dalam kategori daerah yang relatif terbelakang. Urbanisasi yang cepat, konsentrasi industri di beberapa tempat, dan perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat menyebabkan ketimpangan.

Meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, DI Yogyakarta masih menghadapi kendala dalam mendiversifikasi ekonominya dan menciptakan kesempatan kerja yang memadai. Bali masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global karena ketergantungannya yang terus berlanjut pada industri pariwisata. Selain itu, percepatan ekspansi pariwisata dapat menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, namun tantangan utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan

infrastruktur yang tidak memadai. Papua Barat dan Papua diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal-timpang sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, konflik sosial, dan isolasi geografis, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya tingkat ketimpangan di provinsi-provinsi ini.

#### 4. Daerah Maju-Merata (*High Growth - Low Inequality*)

Memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan penduduk yang juga tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Daerah dengan klasifikasi maju-merata berada pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan masyarakatnya cukup baik ditandai dengan nilai indeks gini yang rendah. Wilayah dengan klasifikasi cepat maju antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.

Perkembangan ekonomi Provinsi Bangka Belitung dipengaruhi oleh sektor pertambangan timah dan pariwisata, yang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada kondisi lima provinsi dalam kondisi daerah yang berkembang pesat. Pendapatan daerah secara substansial dipengaruhi oleh sektor pariwisata yang berkembang pesat, terutama di pulau-pulau kecil. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan juga berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan.

Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, meliputi komoditas kehutanan dan pertanian. Sektor pertambangan dan perkebunan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, sementara investasi infrastruktur meningkatkan aksesibilitas. Kalimantan Tengah memiliki hutan tropis yang luas dan merupakan salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia, sehingga menjadi daya tarik pariwisata.

Pertanian, perikanan, dan pariwisata merupakan faktor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Kebijakan pemerintah untuk memperluas layanan kesehatan dan pendidikan juga telah membantu mewujudkan kesetaraan upah. Keindahan alam dan Taman Nasional Lore Lindu menjadikan provinsi ini sebagai tujuan wisata yang menarik.

Maluku dan Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yang meliputi pertambangan, perikanan, dan hasil laut serta rempah-rempah. Sektor perikanan dan pariwisata, serta kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan, merupakan pendorong utama ekspansi ekonomi yang substansial. Maluku, yang juga disebut sebagai “Kepulauan Rempah-rempah”, memiliki sejarah yang kaya akan perdagangan rempah-rempah, yang terus menjadi daya tarik bagi para wisatawan.

Pada tahap awal industrialisasi dan urbanisasi, daerah-daerah yang termasuk dalam kategori maju-merata ini didorong oleh sektor-sektor modern sehingga mengalami perkembangan ekonomi. Namun, mereka mampu mempertahankan ketimpangan yang minimal, yang mengimplikasikan bahwa daerah tersebut mungkin telah melewati fase di mana ketimpangan meningkat.

#### 4.2.2 Analisis Indeks Williamson

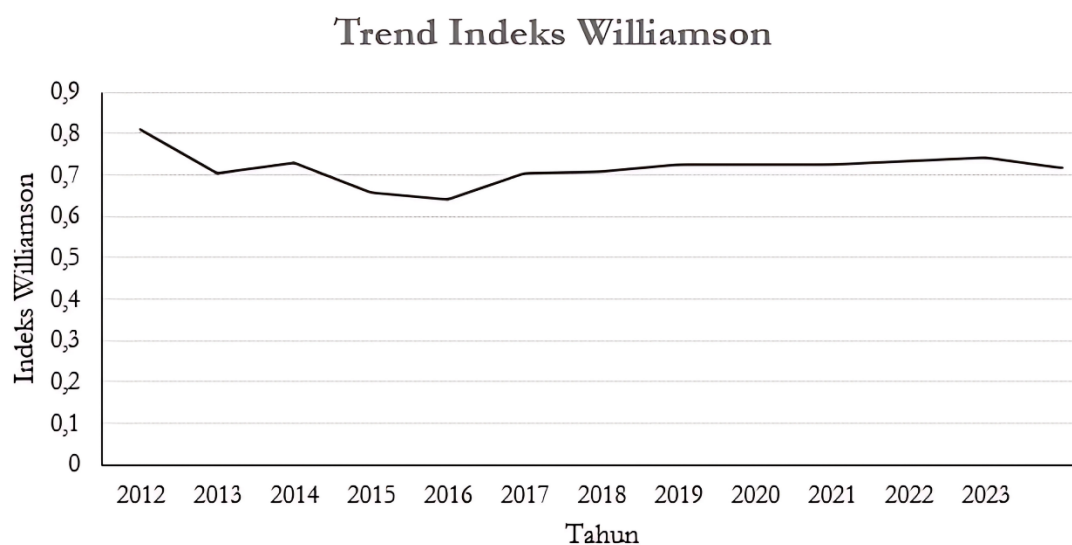
Indeks Ketimpangan Williamson digunakan untuk menganalisis dan memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan di provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melihat distribusi PDRB per kapita di antara wilayah-wilayah provinsi di Indonesia. Indeks Ketimpangan Williamson mengindikasikan bahwa ketimpangan antar provinsi di Indonesia semakin menurun ketika nilainya mendekati nol. Sebaliknya, nilai Indeks Ketimpangan Williamson yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa ketimpangan antar provinsi di Indonesia semakin besar.

**Tabel 4. 1**  
**Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi di Indonesia**

Tahun	Indeks Williamson
2012	0,81
2013	0,70
2014	0,73
2015	0,66
2016	0,64
2017	0,71

2018	0,71
2019	0,72
2020	0,72
2021	0,73
2022	0,73
2023	0,74
<b>Rata-rata</b>	<b>0,72</b>

**Grafik 4. 1**  
**Trend Indeks Williamson 2012-2023**



Pada tabel 4.3 yang menunjukkan nilai Indeks Williamson dari tahun 2012 hingga 2023, terlihat bahwa nilai indeks mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2012, nilai indeks mencapai 0,81, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai indeks mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 pada tahun 2016, yang mencerminkan perbaikan dalam pemerataan pendapatan antar provinsi. Namun, setelah tahun 2016, tren ketimpangan kembali meningkat, dengan nilai indeks mencapai 0,74 pada tahun 2023, yang merupakan puncak tertinggi dalam periode penelitian ini. Hasil analisis tersebut sesuai dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Annibras dan Amin (2023) mengenai “Studi Spatio-Temporal Ketimpangan Regional di Pulau Jawa Tahun 2013-2022”.

Dalam Penelitian tersebut ditemukan bahwa ketimpangan yang terjadi khususnya di Pulau Jawa selama kurun waktu Penelitian cenderung mengalami peningkatan.

Data Indeks Ketimpangan Williamson pada tabel menunjukkan tren yang berfluktuasi secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar provinsi di Indonesia cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut. Jika dikaitkan dengan Hipotesis Kuznet, hipotesis ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai puncak ketimpangan. Oleh karena itu, Indonesia masih berada pada tahap awal atau menengah dari proses industrialisasi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan ketimpangan yang meningkat. Beberapa karakteristik dari tahap awal atau menengah dari proses industrialisasi antara lain:

Pertumbuhan ekonomi, terutama karena konsumsi dan investasi, sangat pesat di Indonesia. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, yang mengakibatkan pertumbuhan populasi di kota-kota besar. Meskipun sektor industri berkembang, sektor ini masih terkonsentrasi di area tertentu. Masih tingginya angka ketimpangan pendapatan antara si kaya dengan si miskin dan antara daerah maju dan berkembang.

Seiring dengan terus meningkatnya nilai Indeks Ketimpangan di berbagai provinsi di Indonesia, maka akan semakin terlihat jelas bahwa kesenjangan antara provinsi-provinsi yang kaya dan yang miskin semakin besar. Fakta bahwa sebagian besar pembangunan ekonomi Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta dan daerah-daerah di sekitarnya, merupakan salah satu penyebab meningkatnya Indeks Ketimpangan. Sebagai akibatnya, terdapat perbedaan besar dalam tingkat pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Faktor ketiga adalah perluasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang merupakan perkembangan positif, namun jika tidak didukung oleh perkembangan daerah lain, maka akan menyebabkan peningkatan ketimpangan.

Keterbatasan infrastruktur adalah elemen lain yang berkontribusi terhadap kenaikan indeks ketimpangan. Hal ini dikarenakan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang tidak memadai di banyak lokasi, seperti di Indonesia bagian timur, dapat menyulitkan akses ke pasar, informasi, dan teknologi yang lebih luas. Faktor lain yang berkontribusi terhadap melebarnya kesenjangan antar provinsi-provinsi di Indonesia adalah pasokan energi yang

tidak merata. Di daerah-daerah yang lebih terbelakang. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan infrastruktur, selain itu keterbatasan infrastruktur juga turut menjadi kendala bagi pengembangan ekonomi pada daerah dengan kategori relatif tertinggal sehingga hal tersebut semakin memperlebar jurang ketimpangan antar Provinsi di Indonesia.

Sumber daya alam juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan antar wilayah di Indonesia, karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan di beberapa wilayah dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan kesenjangan pembangunan. Ketergantungan sektoral beberapa daerah pada satu atau dua sektor utama, seperti pertambangan atau pertanian, tanpa adanya spesialisasi ekonomi menyebabkan daerah tersebut kehilangan daya saing, yang berakibat pada kesenjangan antar daerah.

Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, tidak mengherankan jika kualitas sumber daya manusia sering kali menjadi elemen yang mendasari perbedaan antar wilayah. Sebagai contoh, perbedaan produktivitas tenaga kerja dapat diakibatkan oleh perbedaan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Selain pendidikan, akses terhadap fasilitas kesehatan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah, karena kesehatan dapat menurunkan atau meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk.

Terakhir, kebijakan pemerintah di setiap daerah seringkali memperburuk ketimpangan. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau tidak tepat sasaran dapat memperburuk ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Selain itu, korupsi yang masih menjadi masalah di pemerintahan dapat menghambat distribusi sumber daya yang efisien dan efektif.

Kenaikan indeks ketimpangan antar provinsi di Indonesia telah mengharuskan adanya intervensi pemerintah, termasuk kebijakan redistribusi, karena peningkatan ketimpangan yang signifikan mengharuskan adanya pembaruan kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih efektif untuk menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta antara daerah maju dan daerah tertinggal. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan daerah-daerah yang belum berkembang dengan meningkatkan infrastruktur, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Reformasi sistem politik dan kebijakan harus terus

dievaluasi dan diperbaiki untuk menghasilkan kondisi yang lebih sesuai dalam mengatasi hambatan-hambatan pembangunan. Investasi pada sektor pendidikan yang berkualitas akan membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dari waktu ke waktu dan membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

#### 4.2.3 Analisis Korelasi Pearson

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menguji dan memahami interaksi antara dua atau lebih variabel kuantitatif adalah korelasi. Dua variabel dianggap berkorelasi jika perubahan yang teratur, dalam arah yang sama atau berlawanan dalam satu variabel akan mengikuti perubahan dalam variabel lainnya.

Untuk dapat mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar provinsi di Indonesia dengan Indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan antar Provinsi di Indonesia, maka digunakan metode Korelasi Pearson (Pearson Product Moment). Hasil Perhitungan korelasi dengan menggunakan Korelasi Pearson yang diolah menggunakan software SPSS dapat dilihat pada tabel 4.2.4.

**Tabel 4. 2**  
**Analisis Korelasi Pearson dengan SPSS**

<b>Tahun</b>	<b>Korelasi Pearson</b>	<b>Signifikansi (5%)</b>
2013	-0,021	0,909
2014	0,254	0,153
2015	0,186	0,293
2016	0,448	0,008
2017	0,059	0,739
2018	0,058	0,746
2019	-0,095	0,591
2020	-0,057	0,747
2021	-0,249	0,156
2022	0,032	0,855
2023	-0,259	0,139



**Grafik 4. 2**  
**Trend Korelasi Pearson**



Analisis ini juga menunjukkan arah dan kekuatan interaksi kedua variabel. Dimana angka negatif menunjukkan hubungan negatif di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya akan turun, nilai positif menunjukkan hubungan positif di mana variabel lainnya cenderung meningkat juga ketika satu variabel meningkat.

Kolom Signifikansi menunjukkan tingkat kepercayaan peneliti terhadap hasil uji korelasi. Nilai signifikansi kurang dari 5% menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan secara statistik. Namun, hubungan antara dua variabel tidak signifikan secara statistik jika nilai signifikansi melebihi 5%. Hasil uji korelasi Pearson antara indeks Gini dan tingkat pertumbuhan ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nilai korelasi Pearson yang dihasilkan berkisar antara -0,021 pada tahun 2013 hingga -0,259. Selain itu, sebagian besar nilai signifikansi melebihi 0,05, sehingga hubungan antara kedua variabel ini umumnya tidak signifikan secara statistik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, sepanjang periode penelitian, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia tidak memiliki korelasi yang signifikan dan terus-berlanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selalu

berarti penurunan ketimpangan, dan sebaliknya. Keberagaman hubungan ini mengimplikasikan bahwa tingkat ketimpangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pertumbuhan ekonomi, seperti kebijakan distribusi pendapatan, struktur ekonomi, dan kondisi sosial. Hasil analisis tersebut sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Ambar dkk (2021) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi di Maluku. Pada penelitian tersebut di temukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan dengan nilai ( $r = -0,379$ ).

Perubahan kebijakan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dapat mempengaruhi hubungan antara kedua variabel ini. Strategi menurunkan subsidi bahan bakar, misalnya, dapat meningkatkan inflasi dan memperparah kesenjangan; sedangkan kebijakan menaikkan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dapat menurunkan ketimpangan. Sistem ekonomi yang beragam di setiap daerah dapat menyebabkan terjadinya tren interaksi yang berbeda antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, daerah yang sebagian besar bergantung pada sektor primer (pertanian dan pertambangan) seringkali menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang mengembangkan sektor industri.

Tingkat pendidikan, kesehatan, dan akses pada infrastruktur merupakan contoh faktor-faktor sosial yang dapat menyebabkan ketimpangan. Daerah yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan akses terbatas pada layanan publik umumnya memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan dapat dipengaruhi oleh sejumlah kondisi seperti krisis ekonomi atau pandemi. Sebagai contoh, ketimpangan cenderung meningkat selama krisis ekonomi karena pembangunan ekonomi mengalami keterlambatan.

## **BAB 5**

### **Simpulan dan Saran**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2023", maka beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Provinsi-provinsi di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipologi berdasarkan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi:
  - a. Daerah Maju-Timpang (*High Growth - High Inequality*) : Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.
  - b. Daerah Berkembang-Merata (*Low Growth - Low Inequality*): Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
  - c. Daerah Tertinggal-Timpang (*Low Growth - High Inequality*) : Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Papua.
  - d. Daerah Maju-Merata (*High Growth - Low Inequality*): Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.
2. Indeks ketimpangan Williamson mencerminkan perubahan tingkat ketimpangan antar wilayah dari tahun 2012 hingga 2023. Selepas periode penurunan sesaat pada tahun 2016, ketimpangan kembali meningkat hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 (0,7418). Konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu (seperti Jawa) serta keterbatasan infrastruktur di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian Timur, menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan.
3. Korelasi Pearson antara indeks Gini dan pertumbuhan ekonomi secara umum menunjukkan hubungan yang tidak signifikan secara statistik dan menunjukkan hubungan yang bersifat fluktuatif. Berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat pola yang

seragam dan konsisten yang menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan, atau sebaliknya. Kebijakan redistribusi pendapatan, perubahan struktur ekonomi, dan kondisi sosial memiliki dampak yang lebih penting terhadap ketimpangan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada Bab IV, ditemukan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih tergolong relatif tertinggal, dengan nilai Indeks Ketimpangan yang masih relatif tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memprioritaskan program dan kebijakan yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan mengedepankan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan upaya bersama untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1).
- Annibras, N. Z., & Amin, C. (2023). *Kajian Spasio-Temporal Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa (2013-2022)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Boediono, Dr. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.
- Boemiya, H., Wahyuliyana, I., Mustiko, B., & Susila Adi Irawan, L. (2023). E C H N I U. *Technium Social Sciences Journal*, 47, 379–397.
- Djarwanto Ps , Subagyo, P. (1985). *Statistika Induktif*. BPFE
- Hadi Mousavi, M. D. N. (2020). A new decade for social changes. *Technium Social Sciences Journal*, 6(December), 101–105.
- Hidayah, R. A. D. N., & Tallo, A. J. (2020). Analisis Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019 dengan Metode Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Location Quotient. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(3), 339–350.
- Ismail, A. (2020). Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat. *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat*, 11, 143–159.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. (2023). Kinerja APBN dan APBD yang Tumbuh Positif mendorong Optimisme menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2023. *Kementerian Keuangan RI*, November, 1–2.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Perencanaan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi, dan Peluang*. Erlangga.

- Kurniawan, R., & Huda, S. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Bali. *JDEP*, 3(2), 91–99.
- Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis ketimpangan antar wilayah dan pergeseran struktur ekonomi di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 131–154.
- Sitorus, Y. F., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 110–121.  
<https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.692>
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada.
- Sondakh, C. A., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Empat Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 1–12.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Data Penelitian

PDRB Perkapita 2012-2017

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	23.099,13	23.228,59	23.129,04	22.524,31	22.835,29	23.363,00
Sumatera Utara	28.036,88	29.339,21	30.477,07	31.637,41	32.885,09	34.184,00
Sumatera Barat	23.744,01	24.857,64	25.982,83	27.080,76	28.164,93	29.312,00
Riau	72.396,34	72.297,05	72.390,88	70.769,78	70.569,36	70.740,00
Jambi	32.417,72	34.012,10	35.878,09	36.753,52	37.728,80	38.834,00
Sumatera Selatan	28.577,89	29.656,76	30.636,27	31.549,30	32.699,50	34.060,00
Bengkulu	18.143,51	18.919,30	19.626,72	20.302,48	21.039,84	21.752,00
Lampung	21.794,83	22.770,68	23.647,27	24.581,78	25.568,57	26.615,00
Kepulauan Bangka Belitung	31.172,42	32.081,30	32.859,64	33.480,38	34.132,87	34.934,00
Kepulauan Riau	70.930,00	73.743,33	76.313,81	78.625,43	80.295,60	79.744,00
DKI Jakarta	123.962,38	130.060,31	136.312,34	142.913,61	149.831,90	157.637,00
Jawa Barat	23.036,00	24.118,31	24.966,86	25.845,50	26.923,51	27.971,00
Jawa Tengah	20.950,62	21.844,87	22.819,16	23.887,06	24.959,49	26.089,00
DI Yogyakarta	20.183,88	21.037,70	21.867,90	22.688,36	23.565,68	24.534,00
Jawa Timur	29.508,40	31.092,04	32.703,39	34.271,81	35.970,78	37.724,00
Banten	27.716,47	28.910,66	29.846,64	30.813,03	31.781,56	32.948,00
Bali	26.689,58	28.129,67	29.668,90	31.093,61	32.689,09	34.130,00
Nusa Tenggara Barat	14.276,69	14.809,84	15.369,94	18.475,14	19.305,79	19.091,00
Nusa Tenggara Timur	10.030,98	10.396,76	10.742,32	11.087,91	11.468,79	11.863,00
Kalimantan Barat	21.062,22	21.971,93	22.712,65	23.456,52	24.308,85	25.198,00
Kalimantan Tengah	27.749,01	29.106,40	30.216,73	31.619,18	32.899,58	34.371,00
Kalimantan Selatan	25.547,77	26.423,90	27.220,27	27.786,68	28.540,05	29.579,00
Kalimantan Timur	124.501,88	133.868,68	133.086,11	128.603,13	125.385,50	126.625,00
Kalimantan Utara	-	74.106,93	77.152,60	76.823,46	76.635,46	78.919,00
Sulawesi Utara	25.145,96	26.445,86	27.805,52	29.196,47	30.679,97	32.297,00
Sulawesi Tengah	22.724,47	24.490,98	25.316,27	28.778,64	31.151,08	32.860,00
Sulawesi Selatan	24.507,17	26.083,42	27.749,47	29.435,92	31.302,53	33.234,00
Sulawesi Tenggara	25.489,79	26.815,36	27.896,05	29.202,70	30.476,39	31.894,00
Gorontalo	16.650,27	17.639,12	18.622,44	19.474,13	20.427,46	21.478,00
Sulawesi Barat	17.169,06	18.008,81	19.232,05	20.250,51	21.067,91	22.001,00
Maluku	13.129,11	13.572,07	14.219,62	14.740,38	15.321,18	15.942,00
Maluku Utara	15.691,01	16.332,22	16.869,52	17.533,78	18.177,30	19.193,00
Papua Barat	55.047,84	57.581,36	59.142,59	60.064,13	61.242,01	62.170,00
Papua	36.280,03	38.621,36	39.271,88	41.376,97	44.342,14	45.577,00
Jumlah	1.097.363,32	1.222.374,52	1.261.752,84	1.296.723,78	1.334.373,85	1.378.880,00

PDRB Perkapita 2018-2023

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	24.014,00	24.842,00	25.018,00	25.356,00	26.062,00	26.800,00
Sumatera Utara	35.570,00	36.854,00	36.175,00	36.582,00	37.781,00	39.140,00
Sumatera Barat	30.471,00	31.427,00	30.696,00	31.265,00	32.167,00	33.188,00
Riau	70.737,00	72.509,00	76.885,00	78.319,00	80.774,00	83.071,00
Jambi	40.026,00	41.812,00	41.926,00	42.898,00	44.515,00	46.007,00
Sumatera Selatan	35.660,00	37.126,00	37.323,00	38.182,00	39.719,00	41.278,00
Bengkulu	22.495,00	23.505,00	23.106,00	23.546,00	24.238,00	24.948,00
Lampung	27.736,00	28.895,00	26.747,00	27.150,00	27.974,00	28.907,00
Kepulauan Bangka Belitung	35.762,00	37.173,00	36.308,00	37.621,00	38.744,00	39.909,00
Kepulauan Riau	81.206,00	81.139,00	85.013,00	86.585,00	89.637,00	92.930,00
DKI Jakarta	165.769,00	174.813,00	170.089,00	175.005,00	183.598,00	192.133,00
Jawa Barat	29.160,00	30.413,00	30.181,00	30.935,00	32.247,00	33.482,00
Jawa Tengah	27.285,00	28.696,00	26.484,00	27.093,00	28.248,00	29.370,00
DI Yogyakarta	25.776,00	27.009,00	27.754,00	29.116,00	30.411,00	31.748,00
Jawa Timur	39.580,00	41.512,00	39.686,00	40.780,00	42.636,00	44.423,00
Banten	34.184,00	35.914,00	37.165,00	38.339,00	39.790,00	41.228,00
Bali	35.896,00	37.297,00	34.217,00	33.124,00	34.481,00	36.203,00
Nusa Tenggara Barat	18.020,00	18.219,00	17.583,00	17.716,00	18.647,00	18.687,00
Nusa Tenggara Timur	12.274,00	12.762,00	12.961,00	13.077,00	13.261,00	13.513,00
Kalimantan Barat	26.111,00	27.200,00	24.954,00	25.794,00	26.735,00	27.560,00
Kalimantan Tengah	35.548,00	37.870,00	37.149,00	37.955,00	39.856,00	40.960,00
Kalimantan Selatan	30.615,00	31.611,00	32.212,00	32.895,00	34.133,00	35.343,00
Kalimantan Timur	127.354,00	134.411,00	125.765,00	127.368,00	131.239,00	137.510,00
Kalimantan Utara	80.205,00	88.300,00	86.824,00	88.974,00	92.393,00	95.638,00
Sulawesi Utara	33.912,00	35.687,00	33.670,00	34.776,00	36.369,00	38.064,00
Sulawesi Tengah	39.049,00	42.055,00	45.052,00	49.690,00	56.577,00	62.584,00
Sulawesi Selatan	35.244,00	37.474,00	36.246,00	37.501,00	38.973,00	40.285,00
Sulawesi Tenggara	33.279,00	35.310,00	35.709,00	36.570,00	37.956,00	39.342,00
Gorontalo	22.539,00	24.168,00	24.313,00	24.594,00	25.270,00	26.086,00
Sulawesi Barat	22.953,00	24.164,00	22.666,00	22.898,00	23.071,00	23.919,00
Maluku	16.607,00	17.557,00	16.688,00	17.053,00	17.717,00	18.393,00
Maluku Utara	20.309,00	21.525,00	21.915,00	25.191,00	30.526,00	36.267,00
Papua Barat	64.499,00	64.419,00	54.488,00	53.324,00	53.507,00	71.905,00
Papua	48.069,00	40.203,00	32.109,00	36.420,00	39.113,00	47.324,00
Jumlah	1.429.932	1.485.890	1.447.097	1.485.713	1.550.387	1.640.168

PDRB atas Harga Konstan 2012-2017

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	108914,9	111755,83	113490,36	112665,53	116374,3	121240978,7
Sumatera Utara	375924,14	398727,14	419573,31	440955,85	463775,46	487531231,9
Sumatera Barat	118724,42	125940,63	133340,84	140719,47	148134,24	155984364,1
Riau	425626	436187,51	447986,78	448991,96	458769,34	470983511,6
Jambi	104615,08	111766,13	119991,44	125037,4	130501,13	136501706,1
Sumatera Selatan	220459,2	232175,05	243297,77	254044,88	266857,4	281571013,1
Bengkulu	32363,04	34326,37	36207,15	38066,01	40076,54	42073515,59
Lampung	170769,21	180620,01	189797,49	199536,92	209793,73	220626096,8
Kepulauan Bangka Belitung	40104,91	42190,86	44159,44	45962,3	47848,37	49985153,67
Kepulauan Riau	128034,97	137263,85	146325,23	155131,35	162853,04	166081675,7
Dki Jakarta	1222527,92	1296694,57	1373389,13	1454563,85	1539916,88	1635359147
Jawa Barat	1028409,74	1093543,55	1149216,06	1207232,34	1275619,24	1343662142
Jawa Tengah	691343,12	726655,12	764959,15	806765,09	849099,35	893750296,2
Di Yogyakarta	71702,45	75627,45	79536,08	83474,45	87685,81	92300243,89
Jawa Timur	1124464,64	1192789,8	1262684,5	1331376,1	1405563,51	1482299577
Banten	310385,59	331099,11	349351,23	368377,2	387835,09	410136998,4
Bali	106951,46	114103,58	121787,57	129126,56	137296,45	144933312
Nusa Tenggara Barat	66340,81	69766,71	73372,96	89337,99	94524,29	94608209,35
Nusa Tenggara Timur	48863,19	51505,19	54107,97	56770,79	59678,01	62725410,47
Kalimantan Barat	96161,93	101980,34	107114,96	112346,76	118183,27	124289172,2
Kalimantan Tengah	64649,17	69410,99	73724,52	78890,97	83900,24	89544898,3
Kalimantan Selatan	96697,84	101850,54	106779,4	110863,12	115743,57	121858523,4
Kalimantan Timur	469646,25	438532,91	446029,05	440676,36	439003,83	452741908,2
Kalimantan Utara	-	44091,7	47696,35	49315,75	51064,74	54537307,24
Sulawesi Utara	58677,59	62422,5	66360,76	70425,33	74764,66	79484025,02
Sulawesi Tengah	62249,53	68219,32	71677,53	82787,2	91014,56	97474859,1
Sulawesi Selatan	202184,59	217589,13	233988,05	250802,99	269401,31	288814171,1
Sulawesi Tenggara	59785,4	64268,71	68291,78	72993,33	77745,51	83001687,01
Gorontalo	17987,07	19367,57	20775,8	22068,8	23507,21	25090130,64
Sulawesi Barat	20786,89	22227,39	24195,65	25964,43	27524,77	29282487,06
Maluku	21000,08	22100,94	23567,73	24859,2	26284,23	27814053,22
Maluku Utara	17120,07	18208,74	19208,76	20380,3	21556,68	23210864,65
Papua Barat	44423,34	47694,23	50259,91	52346,49	54711,28	56907958,54
Papua	107890,94	117118,82	121391,23	130311,6	142224,93	148818289,9

PDRB atas Harga Konstan 2018-2023

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	126824365,2	132069620,8	131580967,2	135274039,3	140971715,4	146932422,1
Sumatera Utara	512762626,9	539513845,6	533746358,3	547651824,7	573528766,2	602235951,9
Sumatera Barat	163996189	172205571,3	169426614,1	174999892	182629142,5	191071350,9
Riau	482064629	495607054,6	489995750,5	506471907,2	529532979,4	551828486,3
Jambi	142901995,8	149111088,4	148354254,9	153850628,5	161730023,6	169268774,3
Sumatera Selatan	298484068,4	315464752,4	315129216,7	326405184,9	343459878	360911009,8
Bengkulu	44164109,81	46345453,56	46338431,49	47853777,39	49916060,79	52040875,26
Lampung	232165987	244378313,2	240319592,2	246966491,2	257534189,7	269240539,5
Kepulauan Bangka Belitung	52208035,5	53941901,7	52705936,49	55369646,31	57805148,66	60338141,06
Kepulauan Riau	173498751,4	181877674,4	174959205,4	180952442,7	190163695,6	200043861,4
DKI Jakarta	1735208291	1836240550	1792291087	1856000695	1953488991	2050465970
Jawa Barat	1419624140	1490959687	1453380723	1507746390	1589984926	1669416855
Jawa Tengah	941091143,9	991516543,3	965227269,2	997321131,3	1050278092	1102563177
DI Yogyakarta	98024014,33	104485458,8	101698520,2	107372560,3	112901323,2	118626842,7
Jawa Timur	1563441825	1649895641	1611392547	1668754359	1757874930	1844808669
Banten	433782714,2	456620035	441148577,3	460952785,7	484131221	507427236,2
Bali	154072662,6	162693357,3	147498943,2	143871677,9	150830405,7	159447578,3
Nusa Tenggara Barat	90349129,08	93872438,65	93288873,64	95437864,24	102073661,2	103905924,5
Nusa Tenggara Timur	65929193,54	69389016,38	68809614,28	70540556,64	72695277,01	75257564,75
Kalimantan Barat	130596320,5	137243088,2	134743381,1	141212042,9	148368939,1	154980808,8
Kalimantan Tengah	94566247,89	100349285	98933613,64	102481474,3	109094720,7	113611548,1
Kalimantan Selatan	128052578	133283851,9	130864318	135424592	142341223,6	149230963,2
Kalimantan Timur	464694426,7	486523182,2	472393329,4	484439606,1	506158907,3	537630006,8
Kalimantan Utara	57459308,92	61417792,06	60746208,85	63168433,51	66528387,98	69816763,76
Sulawesi Utara	84249720,17	89009264,78	88126373,99	91790692,34	96768151,71	102070481
Sulawesi Tengah	117555833,6	127935056,5	134152694,8	149815856	172624824,8	193181361,5
Sulawesi Selatan	309156193,2	330506376,3	328154571,9	343395408,6	360895016,7	377162174,8
Sulawesi Tenggara	88310047,92	94053524,01	93445720,37	97275324,71	102656426,6	108152976,2
Gorontalo	26719272,12	28429970,02	28425375,46	29107910,85	30284286,32	31647601,52
Sulawesi Barat	31114142,71	32843808,46	32074018,93	32898297,97	33658219,79	35426006,16
Maluku	29457133,27	31049449,15	30765888,78	31881230,02	33574661,24	35322403,96
Maluku Utara	25034082,2	26597552,87	28031443,88	32738670,03	40248382,65	48494738,6
Papua Barat	60465521,38	62074519,17	61604125,49	61289399,91	62518525,55	64964019,18
Papua	159711852,6	134565888,6	137787286,8	158675151,4	172907287,9	181926534,5

Jumlah Penduduk 2012-2023

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aceh	47151	48111	49068	5002	50962	5190	5281	5372	5275	5334	5408	5483
Sumatera Utara	134082	135903	137669	139378	141029	14262	14415	14563	14799	14936	15115	15387
Sumatera Barat	50002	50665	51319	51963	52955	5322	5382	5441	5535	5580	5641	5757
Riau	58791	60333	61884	6444	65010	6658	6815	6972	6394	6494	6614	6643
Jambi	32271	32861	33444	34021	34859	3515	3570	3625	3548	3585	3631	3679
Sumatera Selatan	77143	78287	79415	80523	81609	8267	8370	8471	8467	8551	8657	8744
Bengkulu	17837	18144	18448	18749	19048	1934	1963	1992	2011	2033	2060	2086
Lampung	78353	79321	80262	81173	82051	8290	8371	8448	9008	9082	9177	9314
Kepulauan Bangka Belitung	12866	13151	13439	13728	14018	1431	1460	1489	1456	1473	1495	1512
Kepulauan Riau	18051	18614	19174	19730	20282	2083	2137	2190	2065	2118	2180	2153
DKI Jakarta	98621	99699	100753	101779	102776	10374	10468	10558	10562	10610	10680	10672
Jawa Barat	446435	453408	460296	467096	473794	48038	48684	49317	48274	48782	49406	49860
Jawa Tengah	329987	332643	335227	337741	37209	34258	34491	34718	36516	36743	37032	37541
DI Yogyakarta	35525	35949	36371	36792	390753	3762	3803	3843	3669	3713	3762	3737
Jawa Timur	381066	383632	386102	388476	122031	39293	39501	39699	40666	40879	41150	41528
Banten	111986	114525	117049	119552	342579	12448	12690	12927	11905	12062	12252	12308
Bali	40072	40563	41049	41528	42001	4247	4292	4337	4317	4363	4415	4404
Nusa Tenggara Barat	46468	47108	47738	48356	48962	4956	5014	5070	5320	5390	5474	5560
Nusa Tenggara Timur	48712	49540	50369	51201	52035	5287	5372	5456	5326	5388	5466	5569
Kalimantan Barat	45656	46414	47161	47896	48617	4933	5002	5069	5414	5471	5541	5623
Kalimantan Tengah	23298	23847	24399	24950	25502	2605	2660	2715	2670	2702	2741	2774
Kalimantan Selatan	37850	38545	39228	39898	40555	4120	4183	4244	4074	4123	4182	4222
Kalimantan Timur	37722	38708	39696	40686	41676	3575	3649	3721	3766	3808	3860	3910
Kalimantan Utara						691	716	742	702	714	728	730

Sulawesi Utara	23335	23604	23866	24121	24369	2461	2484	2507	2622	2639	2660	2682
Sulawesi Tengah	27393	27855	28313	28767	29217	2966	3010	3054	2986	3022	3066	3087
Sulawesi Selatan	82500	83420	84322	85203	86064	8690	8772	8851	9074	9140	9226	9362
Sulawesi Tenggara	23455	23967	24481	24995	25510	2602	2654	2705	2625	2659	2702	2749
Gorontalo	10803	10980	11156	11332	11508	1168	1186	1203	1172	1181	1193	1213
Sulawesi Barat	12107	12343	12581	12822	13065	1331	1356	1380	1419	1437	1459	1481
Maluku	15995	16284	16574	16865	17155	1745	1774	1803	1849	1863	1882	1921
Maluku Utara	10911	11149	11387	11623	11859	1209	1233	1256	1283	1299	1319	1337
Papua Barat	807	8283	8498	8715	8934	915	938	960	1134	1157	1183	1187
Papua	29738	30325	30910	31494	32074	3265	3323	3379	4304	4355	4419	4483

Gini Ratio 2012-2023

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	0,32	0,341	0,325	0,334	0,333	0,329	0,325	0,319	0,323	0,324	0,311	0,296
Sumatera Utara	0,332	0,354	0,321	0,336	0,319	0,315	0,318	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309
Sumatera Barat	0,364	0,363	0,334	0,342	0,331	0,318	0,321	0,306	0,305	0,306	0,3	0,28
Riau	0,404	0,374	0,353	0,364	0,347	0,325	0,327	0,334	0,329	0,326	0,326	0,324
Jambi	0,345	0,348	0,329	0,361	0,349	0,335	0,334	0,321	0,32	0,321	0,32	0,343
Sumatera Selatan	0,396	0,383	0,399	0,36	0,348	0,361	0,358	0,331	0,339	0,341	0,339	0,338
Bengkulu	0,354	0,386	0,356	0,376	0,357	0,351	0,362	0,34	0,334	0,326	0,315	0,333
Lampung	0,358	0,356	0,347	0,376	0,364	0,334	0,346	0,329	0,327	0,323	0,314	0,324
Kepulauan Bangka Belitung	0,294	0,313	0,303	0,283	0,275	0,282	0,281	0,269	0,262	0,256	0,236	0,245
Kepulauan Riau	0,354	0,362	0,402	0,364	0,354	0,334	0,33	0,341	0,339	0,343	0,342	0,34
DKI Jakarta	0,421	0,433	0,431	0,431	0,411	0,413	0,394	0,394	0,399	0,409	0,423	0,431
Jawa Barat	0,412	0,411	0,413	0,415	0,413	0,403	0,407	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
Jawa Tengah	0,383	0,387	0,376	0,382	0,366	0,365	0,378	0,361	0,362	0,372	0,374	0,369
DI Yogyakarta	0,434	0,439	0,419	0,433	0,42	0,432	0,441	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
Jawa Timur	0,357	0,364	0,369	0,415	0,402	0,396	0,379	0,37	0,366	0,374	0,371	0,387
Banten	0,387	0,399	0,395	0,401	0,394	0,382	0,385	0,365	0,363	0,365	0,363	0,368
Bali	0,431	0,403	0,415	0,377	0,366	0,384	0,377	0,366	0,369	0,378	0,363	0,362
Nusa Tenggara Barat	0,348	0,364	0,377	0,368	0,359	0,371	0,372	0,379	0,376	0,381	0,373	0,375
Nusa Tenggara Timur	0,356	0,352	0,355	0,339	0,336	0,359	0,351	0,356	0,354	0,346	0,334	0,325

Kalimantan Barat	0,381	0,396	0,391	0,334	0,341	0,327	0,339	0,327	0,317	0,313	0,314	0,321
Kalimantan Tengah	0,333	0,35	0,35	0,326	0,33	0,343	0,342	0,336	0,329	0,323	0,319	0,317
Kalimantan Selatan	0,378	0,359	0,359	0,353	0,332	0,347	0,344	0,334	0,332	0,33	0,317	0,313
Kalimantan Timur	0,362	0,371	0,348	0,316	0,315	0,33	0,342	0,33	0,328	0,334	0,327	0,322
Kalimantan Utara	-	-	-	0,294	0,3	0,308	0,303	0,295	0,292	0,292	0,272	0,277
Sulawesi Utara	0,427	0,422	0,424	0,368	0,386	0,396	0,394	0,367	0,37	0,365	0,365	0,37
Sulawesi Tengah	0,4	0,407	0,372	0,374	0,362	0,355	0,346	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304
Sulawesi Selatan	0,41	0,429	0,425	0,424	0,426	0,407	0,397	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377
Sulawesi Tenggara	0,404	0,426	0,409	0,399	0,402	0,394	0,409	0,399	0,389	0,39	0,387	0,371
Gorontalo	0,437	0,437	0,412	0,42	0,419	0,43	0,403	0,407	0,408	0,408	0,418	0,417
Sulawesi Barat	0,315	0,349	0,352	0,363	0,364	0,354	0,37	0,365	0,364	0,356	0,362	0,351
Maluku	0,383	0,37	0,351	0,34	0,348	0,343	0,343	0,324	0,318	0,314	0,301	0,288
Maluku Utara	0,338	0,318	0,325	0,28	0,286	0,317	0,328	0,312	0,308	0,3	0,279	0,3
Papua Barat	0,425	0,431	0,439	0,44	0,373	0,39	0,394	0,386	0,382	0,38	0,37	0,37
Papua	0,439	0,442	0,408	0,421	0,39	0,397	0,384	0,394	0,392	0,397	0,406	0,386

## Lampiran II. Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson 2012

Provinsi	Jumlah Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	$f_i$	$y_i (f_i/n)$	$(f_i/n)$		
Aceh	47.151,00	10891490	230,9917075	0,01926898731	33388,61208	643,3647425
Sumatera Utara	134.082,00	37592414	280,368834	0,05479468849	53871,63396	2951,879402
Sumatera Barat	50.002,00	11872442	237,4393424	0,02043409267	35786,47884	731,2642251
Riau	58.791,00	42562600	723,9645524	0,02402585381	456568,2671	10969,44244
Jambi	32.271,00	10461508	324,1767531	0,01318804457	76126,63482	1003,961453
Sumatera Selatan	77.143,00	22045920	285,7799152	0,0315256832	56412,7662	1778,450996
Bengkulu	17.837,00	3236304	181,4376857	0,007289366646	17734,64533	129,2743321
Lampung	78.353,00	17076921	217,9485278	0,03202016846	28792,09329	921,9276775
Kepulauan Bangka Belitung	12.866,00	4010491	311,7123426	0,005257890411	69403,87148	364,9179504
Kepulauan Riau	18.051,00	12803497	709,2957177	0,007376821065	436960,0268	3223,37593
DKI Jakarta	98.621,00	1,22E+08	1,24E+03	0,04030300095	1419329,391	57203,23381
Jawa Barat	446.435,00	1,03E+08	2,30E+02	0,1824425856	33158,32217	6049,49003
Jawa Tengah	329.987,00	69134312	209,5061684	0,1348543046	25998,32829	3505,986483
DI Yogyakarta	35.525,00	7170245	201,8365939	0,01451784213	23583,86673	342,386854
Jawa Timur	381.066,00	112446464	295,0839592	0,15572853	60919,0076	9486,827504
Banten	111.986,00	31038559	277,1646367	0,04576481545	52394,49554	2397,824419
Bali	40.072,00	10695146	266,8982332	0,01637604419	47799,96711	782,7743738
Nusa Tenggara Barat	46.468,00	6634081	142,7666566	0,01898986877	8930,336813	169,5859242

Nusa Tenggara Timur	48.712,00	4886319	100,3103753	0,01990691417	2708,596461	53,91979726
Kalimantan Barat	45.656,00	9616193	210,6227659	0,01865803238	26359,65537	491,8193034
Kalimantan Tengah	23.298,00	6464917	277,4880676	0,009521088979	52542,66585	500,2633967
Kalimantan Selatan	37.850,00	9669784	255,4764597	0,01546798944	42936,09285	664,1350306
Kalimantan Timur	37.722,00	46964625	1245,019485	0,01541568025	1432218,431	22078,62138
Kalimantan Utara		-			2329,625802	
Sulawesi Utara	23.335,00	5867759	251,4574245	0,009536209603	41286,6748	393,7183847
Sulawesi Tengah	27.393,00	6224953	227,2461213	0,01119457423	32033,81319	358,6048996
Sulawesi Selatan	82.500,00	20218459	245,0722303	0,03371490432	38732,61463	1305,866396
Sulawesi Tenggara	23.455,00	59785400	2548,940524	0,009585249464	6253372,09	59940,13147
Gorontalo	10.803,00	1798707	166,5006943	0,004414813471	13979,39627	61,71642697
Sulawesi Barat	12.107,00	2078689	171,6931527	0,004947713292	15234,21333	75,37451976
Maluku	15.995,00	2100008	131,2915286	0,006536604782	6893,205638	45,05816094
Maluku Utara	10.911,00	1712007	156,9065164	0,004458949346	11802,71893	52,62772583
Papua Barat	807	4442334	5504,750929	0,000329793064	29773225,63	9819,003308
Papua	29.738,00	10789094	362,8049633	0,01215289484	98934,63535	1202,34222
Indonesia	2.446.989,00	Rata-rata PDRB Perkapita	552,1798679	Jumlah	40781748,81	199699,171
						446,8771318
					INDEKS WILLIAMSON	0,8092963142

### Indeks Williamson 2013

Provinsi	Jumlah Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	$f_i$	$y_i (f_i/n)$	$(f_i/n)$		
Aceh	48.111,00	11175583	232,287481	0,0196613062	33863,83287	665,8071872
Sumatera Utara	135.903,00	39872714	293,3909774	0,05553886838	60086,15781	3337,11721
Sumatera Barat	50.665,00	12594063	248,5752097	0,02070503791	40123,70045	830,7627388
Riau	60.333,00	43618751	722,966718	0,02465601603	455220,7927	11223,93116
Jambi	32.861,00	11176613	340,1178601	0,01342915722	85177,39307	1143,860603
Sumatera Selatan	78.287,00	23217505	296,5690983	0,03199319654	61654,33066	1972,519118
Bengkulu	18.144,00	34326370	1891,885472	0,007414826957	3398932,029	25202,49283
Lampung	79.321,00	18062001	227,7076814	0,03241575667	32199,24623	1043,762931
Kepulauan Bangka Belitung	13.151,00	42190860	3208,18645	0,005374360081	9985096,002	53663,50135
Kepulauan Riau	18.614,00	13726385	737,4226389	0,007606899745	474936,601	3612,795109
DKI Jakarta	99.699,00	1,30E+07	1,30E+02	0,04074354237	6744,726535	274,8040514
Jawa Barat	453.408,00	1,09E+07	2,40E+01	0,1852922101	586,9009756	108,7481789
Jawa Tengah	332.643,00	72665512	218,4489438	0,1359397202	28962,16719	3937,108905

DI Yogyakarta	35.949,00	75627450	2103,742802	0,01469111631	4224984,074	62069,73242
Jawa Timur	383.632,00	11927898	31,0920309	0,1567771657	294,9519913	46,24173722
Banten	114.525,00	33109911	289,1064047	0,04680241717	58004,00551	2714,727664
Bali	40.563,00	11410358	281,2996573	0,01657669896	54304,59349	900,1908982
Nusa Tenggara Barat	47.108,00	69766710	1480,994948	0,0192514147	2052711,672	39517,60366
Nusa Tenggara Timur	49.540,00	51505190	1039,668753	0,02024528921	982879,0265	19898,67015
Kalimantan Barat	46.414,00	10198034	219,718921	0,01896780084	29396,03647	557,5781651
Kalimantan Tengah	23.847,00	69410990	2910,680169	0,009745446342	8193413,748	79848,47404
Kalimantan Selatan	38.545,00	10185054	264,2380075	0,01575201196	46643,82281	734,7340549
Kalimantan Timur	38.708,00	43853291	1132,925778	0,01581862444	1176486,405	18610,3966
Kalimantan Utara		44091700			2329,625802	
Sulawesi Utara	23.604,00	62422500	2644,572954	0,009646140624	6740808,774	65022,78935
Sulawesi Tengah	27.855,00	68219320	2449,087058	0,01138337769	5763940,805	65613,11519
Sulawesi Selatan	83.420,00	21758913	260,8356869	0,03409087658	45185,7879	1540,423119
Sulawesi Tenggara	23.967,00	64268710	2681,550048	0,009794486203	6934183,838	67916,76793
Gorontalo	10.980,00	19367570	1763,895264	0,004487147265	2943383,095	13207,39341
Sulawesi Barat	12.343,00	22227390	1800,809366	0,005044158351	3071407,557	15492,66608
Maluku	16.284,00	22100940	1357,218128	0,006654709114	1713355,157	11401,88018
Maluku Utara	11.149,00	18208740	1633,217329	0,004556211736	2512070,09	11445,52322
Papua Barat	8.283,00	47694230	5758,086442	0,003384976393	32602047,23	110357,1602
Papua	30.325,00	11711882	386,2121022	0,0123927815	114207,4347	1415,347783
Indonesia	2.488.181,00	Rata-rata PDRB Perkapita	1183,66494	Jumlah	93925621,61	695328,6273
						833,8636743
					INDEKS WILLIAMSON	0,7044761116

#### Indeks Williamson 2014

Provinsi	Jumlah Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	49.068,00	113490360	2312,920029	0,02005239909	5128656,979	102841,8765
Sumatera Utara	137.669,00	419573310	3047,696359	0,05626057167	8996581,293	506152,8066
Sumatera Barat	51.319,00	133340840	2598,274323	0,02097230515	6502541,443	136373,2834
Riau	61.884,00	447986780	7239,137418	0,02528985623	51708628,92	1307703,791
Jambi	33.444,00	119991440	3587,831599	0,01366740921	12528523,23	171232,4539
Sumatera Selatan	79.415,00	243297770	3063,624882	0,03245417123	9092387,997	295085,9169
Bengkulu	18.448,00	362071500	19626,59909	0,007539061271	383311118,8	2889806,011
Lampung	80.262,00	189797490	2364,724153	0,03280031091	5365977,462	176005,7291

Kepulauan Bangka Belitung	13.439,00	441594400	32859,17107	0,005492055747	1076555479	5912502,703
Kepulauan Riau	19.174,00	146325230	7631,439971	0,007835752429	57504524,48	450591,2174
DKI Jakarta	100.753,00	137338913	1363,1248	0,04117427581	1728853,146	71184,27627
Jawa Barat	460.296,00	114921606	249,6689217	0,1881070982	40563,05741	7630,199022
Jawa Tengah	335.227,00	764959150	2281,913897	0,1369957119	4989182,047	683496,5462
DI Yogyakarta	36.371,00	795360800	21867,99373	0,01486357315	476100509,7	7076554,752
Jawa Timur	386.102,00	126268450	327,0339185	0,1577865695	77711,44238	12261,82191
Banten	117.049,00	349351230	2984,657964	0,04783388891	8622396,606	412442,7614
Bali	41.049,00	121787570	2966,88275	0,01677531039	8518322,581	142897,5053
Nusa Tenggara Barat	47.738,00	733729600	15369,92752	0,01950887397	234753305,7	4579772,655
Nusa Tenggara Timur	50.369,00	541079700	10742,31571	0,02058407292	114362695	2354050,052
Kalimantan Barat	47.161,00	107114960	2271,261424	0,01927307397	4941707,776	95241,89951
Kalimantan Tengah	24.399,00	737245200	30216,20558	0,009971029702	910104566,7	9074679,667
Kalimantan Selatan	39.228,00	106779400	2722,019986	0,0160311305	7148959,321	114605,8998
Kalimantan Timur	39.696,00	446029050	11236,12077	0,01622238596	125168089,9	2030525,064
Kalimantan Utara		476963500			2329,625802	
Sulawesi Utara	23.866,00	663607600	27805,5644	0,009753210987	770467603,6	7514533,096
Sulawesi Tengah	28.313,00	716775300	25316,1198	0,0115705465	638464425,9	7387382,326
Sulawesi Selatan	84.322,00	233988050	2774,934774	0,03445949287	7434721,526	256196,7334
Sulawesi Tenggara	24.481,00	682917800	27895,82942	0,01000454027	775486777,4	7758388,696
Gorontalo	11.156,00	207758000	18622,98315	0,004559072395	345020109,8	1572971,658
Sulawesi Barat	12.581,00	241956500	19231,89731	0,005141420742	368011702,5	1892103
Maluku	16.574,00	235677300	14219,69953	0,006773222111	200829522,7	1360262,964
Maluku Utara	11.387,00	192087600	16869,02608	0,004653474127	282937963,1	1316644,491
Papua Barat	8.498,00	502599100	59143,22193	0,003472839477	3492213794	12127897,93
Papua	30.910,00	121391230	3927,247816	0,01263185082	15046498,4	190065,1231
Indonesia	2.521.648,00	Rata-rata PDRB Perkapita	12264,7597	Jumlah	10409166730	79980084,9
						8943,158553
					INDEKS WILLIAMSON	0,7291751956

### Indeks Williamson 2015

Provinsi	Jumlah Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	5.002,00	11266553	2252,409636	0,002044144865	4858248,299	9930,963315
Sumatera Utara	139.378,00	44095585	316,3740691	0,05695898102	71881,83091	4094,315842
Sumatera Barat	51.963,00	14071947	270,807055	0,02123548573	49524,43336	1051,675398

Riau	6.444,00	44899196	6967,597145	0,002633440526	47877140,76	126081,6028
Jambi	34.021,00	12503740	367,530055	0,01390320921	101929,4108	1417,145923
Sumatera Selatan	80.523,00	25404488	315,4935608	0,03290697261	71410,46383	2349,902177
Bengkulu	18.749,00	38066010	2030,295482	0,007662069588	3928440,087	30099,98132
Lampung	81.173,00	19953692	245,8168603	0,03317260519	39026,26445	1294,602863
Kepulauan Bangka Belitung	13.728,00	45962300	3348,069639	0,005610160078	10888702,75	61087,36548
Kepulauan Riau	19.730,00	15513135	786,2714141	0,008062970451	544651,7	4391,510563
DKI Jakarta	101.779,00	145456385	1429,139459	0,04159356662	1906810,965	79311,06891
Jawa Barat	467.096,00	120723234	258,4548658	0,1908860236	44179,27637	8433,206392
Jawa Tengah	337.741,00	80676509	238,8709366	0,138023097	36330,16665	5014,402114
DI Yogyakarta	36.792,00	83474450	2268,820668	0,01503562133	4930862,155	74138,57619
Jawa Timur	388.476,00	13313761	34,27177226	0,1587567414	195,8439322	31,0915445
Banten	119.552,00	36837720	308,1313571	0,04885677868	67529,90126	3299,29344
Bali	41.528,00	12912656	310,9385475	0,01697106117	68996,76355	1170,948295
Nusa Tenggara Barat	48.356,00	89337990	1847,50579	0,01976142925	3237263,113	63972,94598
Nusa Tenggara Timur	51.201,00	56770790	1108,782836	0,02092408262	1124695,542	23533,22243
Kalimantan Barat	47.896,00	11234676	234,5639719	0,01957344312	34706,86084	679,3327664
Kalimantan Tengah	24.950,00	78890970	3161,962725	0,0101962044	9695106,069	98853,28313
Kalimantan Selatan	39.898,00	11086312	277,8663592	0,01630493639	52716,23435	859,534848
Kalimantan Timur	40.686,00	44067636	1083,11547	0,01662696481	1070913,017	17806,03304
Kalimantan Utara		49315750			2329,625802	
Sulawesi Utara	24.121,00	70425330	2919,668753	0,009857420691	8244952,639	81273,96674
Sulawesi Tengah	28.767,00	82787200	2877,853096	0,01175608064	8006562,015	94125,78867
Sulawesi Selatan	85.203,00	25080299	294,3593418	0,03481952718	60561,83577	2108,734487
Sulawesi Tenggara	24.995,00	72993330	2920,317263	0,01021459434	8248677,327	84256,89277
Gorontalo	11.332,00	22068800	1947,476174	0,004630997524	3606998,534	16704,00128
Sulawesi Barat	12.822,00	25964430	2024,990641	0,005239909129	3907439,527	20474,62805
Maluku	16.865,00	24859200	1474,011266	0,006892143773	2032749,001	14009,99837
Maluku Utara	11.623,00	20380300	1753,445754	0,004749919186	2907637,321	13811,0423
Papua Barat	8.715,00	52346490	6006,481928	0,003561519892	35500334,69	126435,1482
Papua	31.494,00	13031160	413,7664317	0,01287051147	133590,4213	1719,377051
Indonesia	2.452.599,00	Rata-rata PDRB Perkapita	1578,650313	Jumlah	163353094,8	1073821,583
						1036,253629
					INDEKS WILLIAMSON	0,65641746

Indeks Williamson 2016

Provinsi	Jumlah Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	47.151,00	108915	23,09919196	0,01926898731	633,3781578	12,20455569
Sumatera Utara	134.082,00	3759240	28,03687296	0,05479468849	409,2255632	22,42338726
Sumatera Barat	50.002,00	1187240	23,74385025	0,02043409267	601,3455049	12,28794978
Riau	58.791,00	4256260	72,39645524	0,02402585381	582,2693484	13,98951824
Jambi	32.271,00	1046150	32,41765052	0,01318804457	251,1764349	3,312526019
Sumatera Selatan	77.143,00	2204590	28,5779656	0,0315256832	387,6264675	12,22018921
Bengkulu	17.837,00	323630	18,14374615	0,007289366646	907,3620634	6,614094761
Lampung	78.353,00	1707690	21,79482598	0,03202016846	700,7334994	22,4376047
Kepulauan Bangka Belitung	12.866,00	401050	31,17130421	0,005257890411	292,2353696	1,536541548
Kepulauan Riau	18.051,00	1280350	70,92958839	0,007376821065	513,6292957	3,788951408
DKI Jakarta	98.621,00	12225280	123,9622393	0,04030300095	5729,890772	230,9317932
Jawa Barat	446.435,00	10284100	23,03605228	0,1824425856	636,5602176	116,135692
Jawa Tengah	329.987,00	6913430	20,95061321	0,1348543046	746,1411343	100,6203438
DI Yogyakarta	35.525,00	717020	20,18353272	0,01451784213	788,6360496	11,44929367
Jawa Timur	381.066,00	11244650	29,50840537	0,15572853	351,8547581	54,79382426
Banten	111.986,00	3103860	27,71650028	0,04576481545	422,2900476	19,3260261
Bali	40.072,00	1069510	26,68970852	0,01637604419	465,5448678	7,623783327
Nusa Tenggara Barat	46.468,00	663410	14,27670655	0,01898986877	1155,285481	21,93871968
Nusa Tenggara Timur	48.712,00	488630	10,03099852	0,01990691417	1461,930425	29,1025235
Kalimantan Barat	45.656,00	961620	21,06229192	0,01865803238	740,0524677	13,80792291
Kalimantan Tengah	23.298,00	646490	27,7487338	0,009521088979	420,9663085	4,00805768
Kalimantan Selatan	37.850,00	966980	25,54768824	0,01546798944	516,1306536	7,983503498
Kalimantan Timur	37.722,00	4696460	124,5018822	0,01541568025	5811,879651	89,59407836
Kalimantan Utara					2329,625802	
Sulawesi Utara	23.335,00	586780	25,14591815	0,009536209603	534,5473079	5,097555171
Sulawesi Tengah	27.393,00	622500	22,7247837	0,01119457423	652,3638084	7,302935077
Sulawesi Selatan	82.500,00	2021850	24,50727273	0,03371490432	564,4864967	19,03160823
Sulawesi Tenggara	23.455,00	597850	25,4892347	0,009585249464	518,7900249	4,972731808
Gorontalo	10.803,00	179870	16,65000463	0,004414813471	999,5836389	4,412975314
Sulawesi Barat	12.107,00	207870	17,16940613	0,004947713292	967,010421	4,784490313
Maluku	15.995,00	210000	13,12910284	0,006536604782	1234,615407	8,070192971
Maluku Utara	10.911,00	171200	15,69058748	0,004458949346	1061,170355	4,73170486
Papua Barat	807	444230	550,4708798	0,000329793064	252209,5431	83,17695801
Papua	29.738,00	1078910	36,28051651	0,01215289484	143,6565439	1,745842872
Indonesia	2.446.989,00	Rata-rata PDRB Perkapita	48,2661973	Jumlah	285741,5375	961,4578752
						31,0073842

					INDEKS WILLIAMSON	0,6424244283
--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Indeks Williamson 2017

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita (RP/Tahun)	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	5189,5	121240978,7	23362,74761	0,01981550333	293538642,1	5816615,939
Sumatera Utara	14262,1	487531231,9	34183,69187	0,05445817323	39841661,93	2169704,127
Sumatera Barat	5321,5	155984364,1	29312,10451	0,02031953	125073189,7	2541428,431
Riau	6657,9	470983511,6	70740,55056	0,02542241827	914749953,8	23255155,93
Jambi	3515	136501706,1	38834,05578	0,01342161946	2761118,201	37058,67778
Sumatera Selatan	8267	281571013,1	34059,63627	0,03156657982	41423135,89	1307586,726
Bengkulu	1934,3	42073515,59	21751,28759	0,007385900006	351353636	2595062,822
Lampung	8289,6	220626096,8	26614,80611	0,0316528753	192679688,7	6098866,158
Kepulauan Bangka Belitung	1430,9	49985153,67	34932,66732	0,005463725544	30947522,38	169088,7685
Kepulauan Riau	2082,7	166081675,7	79743,44635	0,007952548179	1540384254	12249980
DKI Jakarta	10374,2	1635359147	157637,1332	0,03961267841	13722111378	543569585,1
Jawa Barat	48037,6	1343662142	27971,05063	0,1834259991	156867269,1	28773535,57
Jawa Tengah	34257,9	893750296,2	26088,88158	0,1308098143	207556908,6	27150480,67
DI Yogyakarta	3762,2	92300243,89	24533,58245	0,01436552396	254789741,3	3660188,134
Jawa Timur	39293	1482299577	37724,26582	0,1500357592	7680941,971	1152415,96
Banten	12448,2	410136998,4	32947,49429	0,04753200665	56975666,96	2708167,781
Bali	4246,5	144933312	34130,06288	0,01621476729	40521553,15	657047,5547
Nusa Tenggara Barat	4955,6	94608209,35	19091,17147	0,01892238333	458154571,7	8669376,43
Nusa Tenggara Timur	5287,3	62725410,47	11863,41053	0,02018894127	819808977,4	16551075,3
Kalimantan Barat	4932,5	124289172,2	25198,00753	0,01883417866	234019916,7	4407572,921
Kalimantan Tengah	2605,3	89544898,3	34370,283	0,009948035613	37520942,4	373259,6713
Kalimantan Selatan	4119,8	121858523,4	29578,74736	0,01573097805	119180227,3	1874821,54
Kalimantan Timur	3575,4	452741908,2	126626,9251	0,01365224985	7418585007	101280376
Kalimantan Utara	691,1	54537307,24	78913,77115	0,002638885124	1475946880	3894854,265
Sulawesi Utara	2461	79484025,02	32297,45023	0,009397042814	67211578,96	631590,0851
Sulawesi Tengah	2966,3	97474859,1	32860,75552	0,01132647221	58292637,69	660249,9406
Sulawesi Selatan	8690,3	288814171,1	33234,08526	0,03318290174	52731296,42	1749777,427
Sulawesi Tenggara	2602,4	83001687,01	31894,28489	0,0099369623	73984635,26	735182,5314
Gorontalo	1168,2	25090130,64	21477,59856	0,004460636089	361688831,1	1613362,253

Sulawesi Barat	1331	29282487,06	22000,36594	0,005082268991	342078013,2	1738532,479
Maluku	1744,7	27814053,22	15942,02626	0,006661934416	602883731,7	4016371,881
Maluku Utara	1209,3	23210864,65	19193,63653	0,004617571668	453778635	2095355,369
Papua Barat	915,4	56907958,54	62167,31324	0,003495348636	469658081,1	1641618,733
Papua	3265,2	148818289,9	45577,08252	0,01246778716	25820275	321921,6931
Jumlah Penduduk	261890,9	Rata - rata	40495,71706		Jumlah	816167266,9
						28568,64132
					Indeks Williamson	0,7054731561

### Indeks Williamson 2018

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita (RP/Tahun)	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	5281,3	126824365,2	24013,85364	0,02016603097	271651821,7	5478139,049
Sumatera Utara	14415,4	512762626,9	35570,47511	0,05504353149	24258008,25	1335246,441
Sumatera Barat	5382,1	163996189	30470,66926	0,02055092407	100501583,3	2065400,407
Riau	6814,9	482064629	70736,86026	0,02602190454	914526742,1	23797727,58
Jambi	3570,3	142901995,8	40025,20679	0,01363277609	221379,9106	3018,022752
Sumatera Selatan	8370,3	298484068,4	35659,90089	0,03196101888	23385118,04	747412,1991
Bengkulu	1963,3	44164109,81	22494,83513	0,00749663314	324031750,2	2429147,157
Lampung	8370,5	232165987	27736,21492	0,03196178256	162804894,8	5203534,647
Kepulauan Bangka Belitung	1459,9	52208035,5	35761,37783	0,005574458677	22413967,89	124945,7378
Kepulauan Riau	2136,5	173498751,4	81206,99806	0,008157977234	1657408401	13521100
DKI Jakarta	10467,6	1735208291	165769,4496	0,03996931547	15693508075	627258775
Jawa Barat	48683,7	1419624140	29160,15299	0,185893057	128495012,8	23886330,73
Jawa Tengah	34490,8	941091143,9	27285,28024	0,1316991159	174515640,8	22983555,61
DI Yogyakarta	3802,9	98024014,33	25776,12199	0,01452093219	216666478,9	3146199,247
Jawa Timur	39500,9	1563441825	39579,90386	0,1508296012	838713,806	126502,8689
Banten	12689,7	433782714,2	34183,84313	0,04845414636	39839752,5	1930401,199
Bali	4292,2	154072662,6	35895,96538	0,01638926744	21157715,49	346759,4576
Nusa Tenggara Barat	5013,7	90349129,08	18020,44978	0,01914423143	505137639,1	9670471,868
Nusa Tenggara Timur	5371,5	65929193,54	12273,88877	0,0205104492	796471591,8	16335990,12
Kalimantan Barat	5001,7	130596320,5	26110,38658	0,01909841083	206937733,1	3952181,842
Kalimantan Tengah	2660,2	94566247,89	35548,54819	0,01015766489	24474479,83	248603,5645
Kalimantan Selatan	4182,7	128052578	30614,81291	0,0159711544	97632266,83	1559300,008

Kalimantan Timur	3648,8	464694426,7	127355,4118	0,01393251923	7544606578	105115376,2
Kalimantan Utara	716,4	57459308,92	80205,62384	0,002735490237	1576876697	4313530,808
Sulawesi Utara	2484,4	84249720,17	33911,4958	0,009486392998	43351969,55	411253,8204
Sulawesi Tengah	3010,4	117555833,6	39049,90486	0,01149486294	2090372,904	24028,55002
Sulawesi Selatan	8772	309156193,2	35243,52408	0,0334948637	27585531,08	923973,6037
Sulawesi Tenggara	2653,7	88310047,92	33278,08265	0,01013284539	52094246,5	527862,9457
Gorontalo	1185,5	26719272,12	22538,39909	0,004526694131	322465268,7	1459701,639
Sulawesi Barat	1355,6	31114142,71	22952,30356	0,005176201235	307771357,1	1593086,479
Maluku	1773,8	29457133,27	16606,79517	0,006773049388	570680589,1	3865247,815
Maluku Utara	1232,6	25034082,2	20309,98069	0,004706540013	407463952,7	1917745,397
Papua Barat	937,5	60465521,38	64496,55614	0,00357973492	576040276,6	2062071,493
Papua	3322,5	159711852,6	48069,78257	0,01268658056	57366468,38	727784,3224
Jumlah Penduduk	265015,3	Rata - rata	41997,44281		Jumlah	889092405,9
						29817,65259
					Indeks Williamson	0,7099873371

Indeks Williamson 2019

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita (Rp/Tahun)	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	$f_i$	$y_i (f_i/n)$	$(f_i/n)$		
Aceh	5371,5	132069620,8	24587,10245	0,0205104492	253084018,8	5190866,911
Sumatera Utara	14562,5	539513845,6	37048,16107	0,05560521576	11885642,27	660903,7028
Sumatera Barat	5441,2	172205571,3	31648,45462	0,02077659056	78274052,58	1626267,942
Riau	6971,7	495607054,6	71088,40808	0,02662062714	935912743,8	24914584,19
Jambi	3624,6	149111088,4	41138,63278	0,01384011434	413340,6201	5720,681443
Sumatera Selatan	8470,7	315464752,4	37241,87521	0,03234438463	10587486,74	342445,7435
Bengkulu	1991,8	46345453,56	23268,1261	0,007605457082	296789890,3	2257222,773
Lampung	8447,7	244378313,2	28928,38443	0,0322565618	133803184,1	4316030,677
Kepulauan Bangka Belitung	1488,8	53941901,7	36231,79856	0,005684809972	18181000,94	103355,5354
Kepulauan Riau	2189,7	181877674,4	83060,54454	0,008361115258	1811764538	15148372,12
DKI Jakarta	10557,8	1836240550	173922,6496	0,0403137337	17802746316	717695174,1
Jawa Barat	49316,7	1490959687	30232,34902	0,188310094	105336723,4	19835968,29
Jawa Tengah	34718,2	991516543,3	28558,98472	0,1325674164	142485578,9	18888945,08
DI Yogyakarta	3842,9	104485458,8	27189,22137	0,01467366755	177062827,5	2598161,065
Jawa Timur	39698,6	1649895641	41560,54978	0,1515844957	1133868,723	171876,9186
Banten	12927,3	456620035	35322,15041	0,04936139438	26765791,9	1321196,81
Bali	4336,9	162693357,3	37513,74422	0,0165599492	8892162,005	147253,7511

Nusa Tenggara Barat	5070,4	93872438,65	18513,81324	0,0193607338	483204095,5	9355185,865
Nusa Tenggara Timur	5456,2	69389016,38	12717,46204	0,02083386632	771631451,9	16076066,51
Kalimantan Barat	5069,1	137243088,2	27074,44875	0,0193557699	180130443	3486563,408
Kalimantan Tengah	2714,9	100349285	36962,42404	0,01036653049	12484159,57	129417,4208
Kalimantan Selatan	4244,1	133283851,9	31404,50317	0,01620560317	82650170,02	1339395,858
Kalimantan Timur	3721,4	486523182,2	130736,5997	0,0142097339	8143416904	115715787,2
Kalimantan Utara	742,2	61417792,06	82750,99981	0,002834004542	1785508921	5060140,39
Sulawesi Utara	2507	89009264,78	35504,29389	0,009572688474	24914305,25	238496,8828
Sulawesi Tengah	3054	127935056,5	41890,98118	0,01166134448	1946761,975	22701,862
Sulawesi Selatan	8851,2	330506376,3	37340,29016	0,03379727971	9956718,913	336510,0141
Sulawesi Tenggara	2704,7	94053524,01	34774,10582	0,01032758297	32736835,17	338092,3815
Gorontalo	1202,6	28429970,02	23640,42077	0,004591988496	284101012,9	1304588,583
Sulawesi Barat	1380,3	32843808,46	23794,68844	0,005270515318	278924356,8	1470075,095
Maluku	1802,9	31049449,15	17221,9475	0,00688416436	541668349,4	3728933,946
Maluku Utara	1255,8	26597552,87	21179,76817	0,00479512652	373105881,4	1789089,907
Papua Barat	959,6	62074519,17	64687,91076	0,003664121205	585262236,3	2144471,77
Papua	3379,3	134565888,6	39820,63995	0,01290346476	455729,1074	5880,484478
Jumlah Penduduk	268074,3	Rata - rata	43192,8363		Jumlah	977765743,9
						31269,24598
					Indeks Williamson	0,7239451875

#### Indeks Williamson 2020

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita (RP/Tahun)	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	5274,9	131580967,2	24944,73206	0,02014159331	241833134,3	4870904,641
Sumatera Utara	14799,4	533746358,3	36065,40524	0,05650979091	19627662,84	1109155,123
Sumatera Barat	5534,5	169426614,1	30612,8131	0,02113284578	97671790,66	2064082,889
Riau	6394,1	489995750,5	76632,48158	0,02441512859	1305865750	31882880,21
Jambi	3548,2	148354254,9	41811,13097	0,01354838981	1730313,753	23442,96522
Sumatera Selatan	8467,4	315129216,7	37216,76272	0,03233178396	10751541,55	347616,5186
Bengkulu	2010,7	46338431,49	23045,92007	0,007677624538	304495414,8	2337801,469
Lampung	9007,8	240319592,2	26679,05506	0,03439523863	190900148,7	6566056,168
Kepulauan Bangka Belitung	1455,7	52705936,49	36206,59235	0,005558421465	18396590,73	102256,0048
Kepulauan Riau	2064,6	174959205,4	84742,42247	0,007883435431	1957770940	15433960,79

DKI Jakarta	10562,1	1792291087	169690,7894	0,04033015275	16691366729	673165369,7
Jawa Barat	48274,2	1453380723	30106,78008	0,1843294288	107930011,6	19894677,38
Jawa Tengah	36516	965227269,2	26432,99565	0,139432107	197760133,4	27574112,08
DI Yogyakarta	3668,7	101698520,2	27720,58772	0,01400850507	163203929,6	2286243,075
Jawa Timur	40665,7	1611392547	39625,3488	0,1552772548	757540,9019	117628,8716
Banten	11904,6	441148577,3	37056,98447	0,04545633315	11824881,84	537515,7683
Bali	4317,4	147498943,2	34163,83545	0,01648549071	40092724,71	660948,2408
Nusa Tenggara Barat	5320,1	93288873,64	17535,17296	0,02031418427	527186585,5	10709365,44
Nusa Tenggara Timur	5325,6	68809614,28	12920,53746	0,02033518538	760390530,1	15462682,39
Kalimantan Barat	5414,4	134743381,1	24886,115	0,02067425787	243659676,3	5037482,981
Kalimantan Tengah	2670	98933613,64	37053,78788	0,01019508505	11846876,47	120779,9132
Kalimantan Selatan	4073,6	130864318	32124,97987	0,01555456872	70069241,15	1089896,826
Kalimantan Timur	3766	472393329,4	125436,3594	0,01438003382	7214912716	103750688,9
Kalimantan Utara	701,8	60746208,85	86557,72136	0,002679741831	2121708240	5685630,325
Sulawesi Utara	2621,9	88126373,99	33611,64575	0,01001142079	47390437,79	474445,6139
Sulawesi Tengah	2985,7	134152694,8	44931,73956	0,01140054885	19678295,62	224343,3706
Sulawesi Selatan	9073,5	328154571,9	36166,2613	0,03464610645	18744187,16	649413,1036
Sulawesi Tenggara	2624,9	93445720,37	35599,72584	0,01002287594	23970729,96	240255,6526
Gorontalo	1171,7	28425375,46	24259,94321	0,004474000433	263600352,4	1179348,091
Sulawesi Barat	1419,2	32074018,93	22600,06971	0,005419050452	320254194,1	1735473,635
Maluku	1848,9	30765888,78	16640,10427	0,00705981002	569090261,6	4017669,131
Maluku Utara	1282,9	28031443,88	21850,06149	0,004898604724	347660471,7	1703051,229
Papua Barat	1134,1	61604125,49	54319,83554	0,004330429198	191106251,9	827572,0931
Papua	4303,7	137787286,8	32016,00641	0,01643317885	71905492,67	1181635,822
Jumlah Penduduk	270204	Rata - rata	42390,13836		Jumlah	943064386,4
						30709,3534
					Indeks Williamson	0,7244456987

### Indeks Williamson 2021

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita (Rp/Tahun)	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	$f_i$	$y_i (f_i/n)$	$(f_i/n)$		
Aceh	5333,7	135274039,3	25362,13872	0,02036611429	229025193,3	4664353,261
Sumatera Utara	14936,2	547651824,7	36666,07468	0,05703214583	14666160,73	836442,6174
Sumatera Barat	5580,2	174999892	31360,86376	0,02130734592	83445544,79	1778003,089
Riau	6493,6	506471907,2	77995,55057	0,02479505779	1406237513	34867740,4

Jambi	3585,1	153850628,5	42913,90158	0,01368928817	5847616,361	80049,7055
Sumatera Selatan	8550,9	326405184,9	38172,02691	0,03265061902	5399535,908	176298,1898
Bengkulu	2032,9	47853777,39	23539,66127	0,00776239266	287507828	2231748,654
Lampung	9081,8	246966491,2	27193,56198	0,03467779904	176947329,8	6136143,945
Kepulauan Bangka Belitung	1473,2	55369646,31	37584,60922	0,005625243183	8474548,818	47671,39797
Kepulauan Riau	2118,2	180952442,7	85427,45853	0,008088100808	2018861392	16328754,45
DKI Jakarta	10609,7	1856000695	174934,3238	0,04051190782	18073738973	732201647,3
Jawa Barat	48782,4	1507746390	30907,58942	0,1862699315	91932191,6	17124203,03
Jawa Tengah	36742,5	997321131,3	27143,52946	0,140296971	178280913,5	25012272,16
DI Yogyakarta	3712,9	107372560,3	28918,78594	0,01417727764	134025334	1900114,371
Jawa Timur	40878,8	1668754359	40821,99965	0,1560909524	106460,3315	16617,49454
Banten	12061,5	460952785,7	38216,87068	0,04605543759	5193140,822	239172,373
Bali	4362,7	143871677,9	32977,66931	0,01665846351	56521041,91	941553,7139
Nusa Tenggara Barat	5390	95437864,24	17706,46832	0,0205810893	519349858,1	10688785,81
Nusa Tenggara Timur	5387,7	70540556,64	13092,88874	0,02057230702	750915000,1	15448053,93
Kalimantan Barat	5470,8	141212042,9	25811,9549	0,02088961472	215612871	4504069,804
Kalimantan Tengah	2702,2	102481474,3	37925,19959	0,01031803701	6607560,059	68177,04926
Kalimantan Selatan	4122,6	135424592	32849,31645	0,01574166953	58467442,29	920375,1546
Kalimantan Timur	3808,2	484439606,1	127209,6019	0,01454116962	7519297833	109339385,2
Kalimantan Utara	713,6	63168433,51	88520,78687	0,002724798762	2306407330	6284495,838
Sulawesi Utara	2638,6	91790692,34	34787,64964	0,0100751878	32582033,65	328270,1079
Sulawesi Tengah	3021,9	149815856	49576,70871	0,01153877435	82464409,31	951538,2112
Sulawesi Selatan	9139,5	343395408,6	37572,66903	0,03489811979	8544209,776	298176,8563
Sulawesi Tenggara	2659,2	97275324,71	36580,67265	0,01015384651	15327572,72	155633,8207
Gorontalo	1181	29107910,85	24646,83391	0,004509511403	251187097	1132731,078
Sulawesi Barat	1436,8	32898297,97	22896,92231	0,005486254009	309717576,7	1699189,297
Maluku	1862,6	31881230,02	17116,51993	0,00711212188	546586858,4	3887392,355
Maluku Utara	1299,2	32738670,03	25199,09947	0,004960844382	233986509,7	1160770,662
Papua Barat	1156,8	61289399,91	52981,8464	0,004417106513	155903425,8	688642,0375
Papua	4355,4	158675151,4	36431,82058	0,0166305893	16515254,56	274658,4158
Jumlah Penduduk	272682,4	Rata - rata	43560,10514		Jumlah	1002413132
						31660,90857
					Indeks Williamson	0,7268326941

Indeks Williamson 2022

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita (RP/Tahun)	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	5407,9	140971715,4	26067,73708	0,02064943837	208166606,2	4298523,506
Sumatera Utara	15115,2	573528766,2	37943,84237	0,05771563655	6512064,425	375847,9435
Sumatera Barat	5640,6	182629142,5	32377,60921	0,02153797631	65903675,04	1419431,792
Riau	6614,4	529532979,4	80057,59848	0,02525631857	1565142462	39529736,61
Jambi	3631,1	161730023,6	44540,22848	0,01386493383	16358072,65	226803,595
Sumatera Selatan	8657	343459878	39674,23795	0,03305574955	674827,9184	22306,94266
Bengkulu	2060,1	49916060,79	24229,92126	0,007866252703	264576112,9	2081222,563
Lampung	9176,6	257534189,7	28064,22745	0,03503978183	154541933,8	5415115,644
Kepulauan Bangka Belitung	1494,6	57805148,66	38675,99937	0,005706956599	3311372,461	18897,85892
Kepulauan Riau	2179,8	190163695,6	87239,05663	0,008323313258	2184939794	18185938,36
DKI Jakarta	10680	1953488991	182910,9542	0,04078034021	20282099773	827110928,9
Jawa Barat	49405,8	1589984926	32182,15121	0,188650312	69115377,09	13038637,45
Jawa Tengah	37032,4	1050278092	28361,05929	0,1414039205	147249919,2	20821715,87
DI Yogyakarta	3761,9	112901323,2	30011,78212	0,01436437845	109912891,7	1578830,373
Jawa Timur	41150	1757874930	42718,71032	0,1571264981	4941699,063	776471,8685
Banten	12252	484131221	39514,46466	0,04678283972	962856,2699	45045,15055
Bali	4415,1	150830405,7	34162,39851	0,01685854682	40110923,81	676211,8871
Nusa Tenggara Barat	5473,7	102073661,2	18648,01893	0,02090068803	477321913,7	9976356,411
Nusa Tenggara Timur	5466,3	72695277,01	13298,80852	0,02087243199	739671834,1	15438750,05
Kalimantan Barat	5541,4	148368939,1	26774,6308	0,02115919263	188268208,1	3983603,281
Kalimantan Tengah	2741,1	109094720,7	39799,61355	0,01046657215	484560,1003	5071,68325
Kalimantan Selatan	4182,1	142341223,6	34035,82497	0,01596886337	41730205,78	666383,9546
Kalimantan Timur	3859,8	506158907,3	131136,0452	0,01473819823	8215669088	121084159,6
Kalimantan Utara	727,8	66528387,98	91410,26103	0,002779019813	2592290788	7204027,462
Sulawesi Utara	2659,5	96768151,71	36385,84385	0,01015499202	16891057,82	171528,5574
Sulawesi Tengah	3066,1	172624824,8	56301,10719	0,01170754692	249810357,3	2924666,479
Sulawesi Selatan	9225,8	360895016,7	39118,01868	0,03522764632	1898052,824	66863,93358
Sulawesi Tenggara	2701,7	102656426,6	37996,97473	0,01031612782	6243713,238	64410,94385
Gorontalo	1192,7	30284286,32	25391,36943	0,004554186495	228141317,3	1038998,106
Sulawesi Barat	1458,6	33658219,79	23075,70258	0,005569494778	303456904,3	1690101,644
Maluku	1881,7	33574661,24	17842,72798	0,007185053013	513157914,2	3687066,817
Maluku Utara	1319,3	40248382,65	30507,37713	0,005037593899	99766934,49	502585,3005
Papua Barat	1183,3	62518525,55	52834,04509	0,004518293686	152234338,5	687839,4506
Papua	4418,6	172907287,9	39131,69055	0,01687191117	1860568,306	31391,34317

Jumlah Penduduk	275774	Rata - rata	45365,29526		Jumlah	1104845471
						33239,21587
					Indeks Williamson	0,7327014114

Indeks Williamson 2023

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita (RP/Tahun)	Proporsi Penduduk	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i/n)$
	n	f <sub>i</sub>	y <sub>i</sub> (f <sub>i</sub> /n)	(f <sub>i</sub> /n)		
Aceh	5482,5	146932422,1	26800,25939	0,02093428981	187565560,7	3926551,807
Sumatera Utara	15386,6	602235951,9	39140,28778	0,05875194594	1837188,533	107938,4014
Sumatera Barat	5757,2	191071350,9	33188,24271	0,02198319987	53399181,33	1173884,876
Riau	6642,9	551828486,3	83070,41899	0,02536514251	1812605245	45976990,34
Jambi	3679,2	169268774,3	46006,95105	0,0140485981	30373700,13	426707,9059
Sumatera Selatan	8743,5	360911009,8	41277,63594	0,03338603976	611397,1337	20412,12902
Bengkulu	2086	52040875,26	24947,68709	0,007965148846	241741236	1925504,927
Lampung	9314	269240539,5	28907,07961	0,03556442778	134296517,9	4776178,812
Kepulauan Bangka Belitung	1511,9	60338141,06	39908,81742	0,005773014641	344451,1833	1988,521724
Kepulauan Riau	2152,6	200043861,4	92931,27448	0,008219453215	2749487682	22599285,37
DKI Jakarta	10672,1	2050465970	192133,3168	0,04075017498	22993961654	937007960,8
Jawa Barat	49860,3	1669416855	33481,88548	0,1903857675	49193833,43	9365805,734
Jawa Tengah	37541	1102563177	29369,57399	0,1433459505	123791059,6	17744947,1
DI Yogyakarta	3736,5	118626842,7	31748,11795	0,0142673915	76520490,21	1091747,791
Jawa Timur	41527,9	1844808669	44423,3556	0,1585694654	15426344,55	2446147,208
Banten	12307,7	507427236,2	41228,43717	0,04699552371	536878,7672	25230,89883
Bali	4404,3	159447578,3	36202,70605	0,01681730828	18429943,49	309942,0412
Nusa Tenggara Barat	5560,3	103905924,5	18687,10763	0,02123136008	475615445,4	10097962,78
Nusa Tenggara Timur	5569,1	75257564,75	13513,41595	0,02126496186	728044573,3	15481840,08
Kalimantan Barat	5623,3	154980808,8	27560,47318	0,02147191827	167320534,3	3592692,836
Kalimantan Tengah	2773,7	113611548,1	40960,28702	0,01059105146	215825,2468	2285,816297
Kalimantan Selatan	4222,3	149230963,2	35343,52442	0,0161223624	26545088,95	427969,5442
Kalimantan Timur	3909,7	537630006,8	137511,8313	0,01492873559	9412126421	140511146,7
Kalimantan Utara	730	69816763,76	95639,40241	0,002787420258	3040826034	8476060,088
Sulawesi Utara	2681,5	102070481	38064,69551	0,01023899647	5909865,787	60511,09491
Sulawesi Tengah	3086,8	193181361,5	62583,0509	0,01178658747	487850316,3	5750090,424
Sulawesi Selatan	9362,3	377162174,8	40285,20501	0,03574885573	44315,32361	1584,22211

Sulawesi Tenggara	2749	108152976,2	39342,6614	0,01049673738	1329537,342	13955,80431
Gorontalo	1213,2	31647601,52	26086,05467	0,004632463365	207638370,3	961877,1436
Sulawesi Barat	1481,1	35426006,16	23918,71323	0,005655408416	274797056	1554089,583
Maluku	1920,5	35322403,96	18392,29574	0,007333206308	488561234,2	3582720,324
Maluku Utara	1337,1	48494738,6	36268,59517	0,005105561133	17868559,47	91229,02272
Papua Barat	1187,3	64964019,18	54715,75775	0,004533567222	202209557,4	916730,6212
Papua	4482,7	181926534,5	40584,14225	0,01711666958	7819,013972	133,8354786
Jumlah Penduduk	278696,1	Rata - rata	47477,15474		Jumlah	1240450105
						35220,0242
					Indeks Williamson	0,7418309795

### Lampiran III. Analisis Indeks Ketimpangan

Provinsi	Kuadran	Rata - rata Indeks Gini Ratio (Persen)	Rata-rata Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen)
Aceh	3	0,32	2,87
Sumatera Utara	3	0,32	4,57
Sumatera Barat	3	0,32	4,60
Riau	3	0,34	2,51
Jambi	3	0,34	4,70
Sumatera Selatan	3	0,36	4,78
Bengkulu	3	0,35	4,63
Lampung	3	0,34	4,43
Kepulauan Bangka Belitung	4	0,27	3,94
Kepulauan Riau	3	0,35	4,47
DKI Jakarta	1	0,42	4,98
Jawa Barat	2	0,41	4,69

Jawa Tengah	3	0,37	4,44
DI Yogyakarta	2	0,43	4,77
Jawa Timur	2	0,38	4,80
Banten	2	0,38	4,79
Bali	2	0,38	4,08
Nusa Tenggara Barat	2	0,37	3,86
Nusa Tenggara Timur	3	0,35	4,14
Kalimantan Barat	3	0,34	4,58
Kalimantan Tengah	4	0,33	5,42
Kalimantan Selatan	3	0,34	4,20
Kalimantan Timur	3	0,34	2,43
Kalimantan Utara	3	0,29	4,73
Sulawesi Utara	1	0,39	5,32
Sulawesi Tengah	4	0,35	10,82
Sulawesi Selatan	1	0,40	6,11
Sulawesi Tenggara	1	0,40	6,07
Gorontalo	1	0,42	5,51
Sulawesi Barat	1	0,36	5,36
Maluku	4	0,34	5,05
Maluku Utara	4	0,31	9,84
Papua Barat	2	0,40	3,66

Papua	2	0,40	4,78
<b>Rata - Rata</b>		<b>0,359</b>	4,88

**Lampiran IV. Analisis Korelasi Pearson**

Korelasi Pearson 2013

		Laju_Pertumbuhan_Ekono mi	indeks_gin i
Laju_Pertumbuhan_Ekono mi	Pearson Correlatio n	1	-,021
	Sig. (2- tailed)		,909
	N	33	33
indeks_gini	Pearson Correlatio n	-,021	1
	Sig. (2- tailed)	,909	
	N	33	33

Korelasi Pearson 2014

		Laju_Pertumbuhan_Ekono mi	indeks_gin i
--	--	------------------------------	-----------------

Laju_Pertumbuhan_Ekono mi	Pearson Correlatio n	1	,254
	Sig. (2- tailed)		,153
	N	34	33
indeks_gini	Pearson Correlatio n	,254	1
	Sig. (2- tailed)	,153	
	N	33	33

Korelasi Pearson 2015

		Laju_Pertumbuhan_Ekono mi	indeks_gin i
Laju_Pertumbuhan_Ekono mi	Pearson Correlatio n	1	,186
	Sig. (2- tailed)		,293
	N	34	34
indeks_gini	Pearson Correlatio n	,186	1

	Sig. (2-tailed)	,293	
	N	34	34

Korelasi Pearson 2016

		Laju_Pertumbuhan_Ekonomi	indeks_gini
Laju_Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	1	.448**
	Sig. (2-tailed)		,008
	N	34	34
indeks_gini	Pearson Correlation	.448**	1
	Sig. (2-tailed)	,008	
	N	34	34

Korelasi Pearson 2017

		Laju_Pertumbuhan_Ekonomi	indeks_gini

Laju_Pertumbuhan_Ekono mi	Pearson Correlatio n	1	,059
	Sig. (2- tailed)		,739
	N	34	34
indeks_gini	Pearson Correlatio n	,059	1
	Sig. (2- tailed)	,739	
	N	34	34

Korelasi Pearson 2018

		Indeks_Gini	Pertumbuhan_Ekonomi
Indeks_Gini	Pearson Correlation	1	0,058
	Sig. (2-tailed)		0,746
	N	34	34
Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	0,058	1
	Sig. (2-tailed)	0,746	
	N	34	34

Korelasi Pearson 2019

		Pertumbuhan_Ekonomi	Indeks_Gini
Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	1	-0,095
	Sig. (2-tailed)		0,591
	N	34	34
Indeks_Gini	Pearson Correlation	-0,095	1
	Sig. (2-tailed)	0,591	
	N	34	34

Korelasi Pearson 2020

		Pertumbuhan_Ekonomi	Indeks_Gini
Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	1	-0,057
	Sig. (2-tailed)		0,747
	N	34	34
Indeks_Gini	Pearson Correlation	-0,057	1
	Sig. (2-tailed)	0,747	
	N	34	34

Korelasi Pearson 2021

		Pertumbuhan_Ekonomi	Indeks_Gini

Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	1	-0,249
	Sig. (2-tailed)		0,156
	N	34	34
Indeks_Gini	Pearson Correlation	-0,249	1
	Sig. (2-tailed)	0,156	
	N	34	34

#### Korelasi Pearson 2022

		Pertumbuhan_Ekonomi	Indeks_Gini
Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	1	0,032
	Sig. (2-tailed)		0,855
	N	34	34
Indeks_Gini	Pearson Correlation	0,032	1
	Sig. (2-tailed)	0,855	
	N	34	34

#### Korelasi Pearson 2023

		Pertumbuhan_Ekonomi	Indeks_Gini

Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	1	-0,259
	Sig. (2-tailed)		0,139
	N	34	34
Indeks_Gini	Pearson Correlation	-0,259	1
	Sig. (2-tailed)	0,139	
	N	34	34